



PILKADA DI TENGAH BADAI KRISIS EKONOMI

INDUSTRI BATERE
MOBIL LISTRIK
PILIHAN MASA DEPAN

AHOK
'SUPERMAN' DI
PERTAMINA

MERGER BANK
SYARIAH SIAPA
YANG UNTUNG?

KEMENANGAN
BIDEN UNTUNGAN
INDONESIA

ISSN 2614-2783



9 772614 278007

Rp 50.000,- JABOTABEK
Rp 75.000,- LUAR PULAU



RP 75.000
DI LUAR JABODETABEK

info indonesia

 **(021) 791 96781**

The collage features several Indonesian media covers and advertisements. At the top left is a portrait of a man with glasses, with the text "SOSOK CERIAS YANG BERAKTIF DALAM ANJARAN". To its right is the cover of "info indonesia" magazine, dated 12 SEPTEMBER 2020, featuring a photo of Jokowi with the headline "JOKOWI ANTARA WABAH DAN NAFKAH" and sub-headline "KELAPARAN LEBIH MENYERIKAN DARIPADA COVID-19". Further right is an advertisement for a smartphone, showing the back of a device with the headline "NOTE 20 DAPAT INI SPESIAL" and "Kamera terbaik yang pernah ada". Below the top left portrait is another portrait of a man with the headline "HERMAN DEROM MEMBANGUN SUMBER SEMAKIN MAJU". Below the top center magazine cover is another "info indonesia" magazine cover, dated 12 SEPTEMBER 2020, featuring a man with glasses and the headline "AHOK DIAM-DIAM JUAL SOLAR MURAH KE MALAYSIA". To the right of this is an advertisement for a temple, showing a temple with a white elephant and the headline "CAHAYA DI KOTA SANG GAJAH PUTIH".

- ADVERTORIAL/INFORIAL (FC) 1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN 1/2 CENTERSPEAD (FC)
- IKLAN 1/2 FACING PAGES (FC) (186 MM X 124 MM)
- IKLAN 1/2 HALAMAN (FC), UKURAN 186 MM X 124 MM (HORIZONTAL), 90MM X 250 MM (VERTIKAL)
- IKLAN ADVERTORIAL/INFORIAL (FC) 1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN CENTERSPREAD (FC), DILUAR EDISI KHUSUS, 1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN COVER 2 (FC) 1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN COVER 3 (FC) 1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN COVER 4 (FC) 1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN DISPLAY (FC), 1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN HALAMAN 13, 15 & 17 (FC) 1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN HALAMAN 3 (FC) 1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN HALAMAN 5 (FC) 1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297 MMK

JL. RAYA KALIBATA NO. 8, JAKARTA SELATAN 12750 Telp / Fax : 021-79196781 / 021-79196786

PENDIRI

Waherman St. Mangkuto, H. Zainuddin

DIREKTUR

Usman Rizal

PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

REDAKTUR PELAKSANA

Rio Taufiq Adam, Andika Salahudin

REDAKTUR

Andyanto, Zaki Almubarak, Muakbar,
Rusdiyono

REPORTER

Rifky Ilmi, Pras Budi Presetya, Ahmad Yani,
Dian Taresa, Yuni Watiana, Mario Ananta

FOTOGRAFER / VIDEO

Wahyu Ramadhan, Dede Suredec

EDITOR & GRAFIS

Al Amin

TATA LETAK

Sujatmiko

MEDIA SOSIAL

Bemby Berliandi Joandika
Aji

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Dra. Nurhamida

SEKRETARIS REDAKSI

Niken Sri Astuti

PENGEMBANGAN IT

Halim Wahyudin

PENGEMBANGAN BISNIS

Kiki Ibrahim

DISTRIBUSI

Abdul Muhctar

BANK ACCOUNT

A/N : PT. Wahana Multimedia
BCA : No Rek : 553-014-4321
KCP Olistia Jakarta Timur

OLIGARKI

Begitulah seharusnya jika intelektual mengungkapkan fakta. Rinci dan jelas. Seperti, salah satu contoh saja, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes.

Ia menyebut yang mempengaruhi peningkatan jumlah pasangan calon tunggal dalam Pilkada serentak 2020 adalah faktor petahana (*incumbent*), biaya politik, sistem dan pencalonan internal partai politik, serta basis partai.

Nah, bagi yang terbiasa dengan riset seperti Arya, dengan mudah dapat memahami empat faktor itu memiliki skala atau tolok-ukur berbeda. Misalnya, perbedaan antara biaya politik yang ukurannya rasio dana yang dikeluarkan paslon dan faktor basis partai. Tak mungkin membedakan basis partai dengan nilai uang yang dikeluarkan pasangan calon.

Jika faktor biaya politik dapat diukur dengan nilai uang, misalnya sekian miliar rupiah per paslon, akan sulit memahami jika menyebut Partai A sekian miliar dan Partai B sekian miliar, demikian seterusnya untuk partai lain. Tentulah basis partai itu sebenarnya boleh jadi menunjukkan posisi partai politik berdasarkan jumlah pendukungnya; dan tentu berbeda cara mengukurnya dengan biaya politik. Misalnya, partai (dan juga koalisi) yang mayoritas di parlemen atau minoritas.

Jika basis partai diukur dengan posisi mayoritas dan minoritas di parlemen, lantas apa yang dapat kita pahami mengenai faktor sistem dan pencalonan internal partai politik yang juga menjadi faktor pendorong meningkatnya jumlah paslon Pilkada serentak 2020? Terbuka kemungkinan misalnya perbedaan antar-partai antara yang menyukai politik dinasti dan yang tidak. Juga antara yang menyukai figur pesohor dan yang tidak.

Apakah uraian sejauh ini masih kurang jelas? Bagi yang merasa demikian, pastilah ia bukan politisi tangguh, apalagi tergolong sebagai pendukung oligarki: kelompok kecil elite yang sangat memahami taktik dan teknik mengelola organisasi politik sehingga dapat mencapai target-targetnya, tak terkecuali target memenangi Pilkada.

Paling tidak, itulah yang pernah dijelaskan oleh Robert Michels, pencetus hukum besi oligarki pada 1911 silam. Oligarki tak terhindarkan dalam demokrasi. Karena itulah Michels menyebutnya hukum besi.

Akhirnya, majelis pembaca yang mulia, apakah tanda-tanda meningkatnya kecenderungan oligarki di Indonesia tampak dalam penyelenggaraan Pilkada 2020? Silakan membuka halaman-halaman berikutnya. Selamat membaca... ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

JL. Raya Kalibata No. 8, Jakarta Selatan 12750
Telp / Fax : 021-79196781 / 021-79196786

Twitter : @1Infoindonesia
Facebook : infoindonesia.id
Instagram : @infoindonesia.idn
Email : redaksi@infoindonesia.id

DAFTAR ISI

EDISI
BULAN
NOVEMBER
2020



06 INFO UTAMA

Meski digelar di tengah wabah Covid-19 yang belum berakhir, para pemangku kepentingan seperti Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat berupaya keras pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berlangsung sukses. Apa ukurannya?



30 INFO EKONOMI

Seperti apa jika orang Indonesia, Korea, dan Tiongkok bergabung? Salah satu jawabannya adalah membangun pabrik baterai atau aki untuk kendaraan listrik.



92 INFO KHUSUS

Setidaknya ada 19 bank, yang juga tertulis di dalam dokumen Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), diduga menjadi tempat lalu lalang transaksi mencurigakan tingkat internasional. Tidak tanggung-tanggung, jumlah transaksi janggal yang terjadi pada 19 bank di Tanah Air itu mencapai USD 504,66 juta atau setara Rp 7,46 triliun.

90

INFO SELEBRITI

Pesohor yang menekuni karir politik memang kisah usang di negara-negara demokrasi. Namun, memang tetap menarik terlepas dari kegagalan dan keberhasilannya.





48 INFO SUMSEL

Bersyukurlah warga Sumatera Selatan lantaran Pemerintah Provinsi telah lima kali berturut-turut meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian dari Kementerian Keuangan RI. Ini tanda-tanda baik bahwa penggunaan APBD dapat dipertanggungjawabkan.



72 INFO INTERNASIONAL

Joseph R Biden tinggal menunggu pelantikan sebagai Presiden AS periode 2021-2025 setelah mengungguli Donald J Trump dalam pemilihan Presiden awal November 2020.



82 INFO WISATA

Seekor komodo berada persis di depan satu unit truk. Di bagian bak truk terlihat dua orang pekerja, sedang membawa baja konstruksi. Ban truk terlihat sedikit amblas, dari tanah, menandakan barang yang dibawa cukup berat. Truk tersebut berada di jalur yang terlihat telah beberapa kali dilewati. Terbukti dengan garis-garis bekas ban.

3 DARI REDAKSI

20 INFO PILKADA

24 INFO PROFIL

42 INFO NUSANTARA

54 INFO SULSEL

58 INFO KALTIM

62 INFO JATENG

66 INFO ISTANA

70 INFO TEKNOLOGI

72 INFO INTERNASIONAL

76 INFO SPORT

90 INFO SELEBRITI



MERAIH SUKSES PILKADA SERENTAK 2020

Meski digelar di tengah wabah Covid-19 yang belum berakhir, para pemangku kepentingan seperti Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat berupaya keras pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berlangsung sukses. Apa ukurannya?

S etidaknya ada tiga indikator sukses pelaksanaan pilkada pada 9 Desember mendatang, yakni seluruh tahapan berjalan sesuai dengan peraturan, partisipasi pemilih yang tinggi dan masyarakat aman dari covid-19. Ini dikemukakan oleh Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

"Saya katakan ada tiga indikator pilkada serentak sukses tahun 2020 ini. Yang pertama apabila seluruh tahapan yang sudah dirancang oleh KPU itu bisa berjalan dengan baik," ujar Doli, Rabu, 21 Oktober 2020.

Doli menilai sejauh ini sudah sampai ke tahapan kampanye yang berarti masih ada empat tahapan lagi yang perlu dilalui. Tahapan itu yakni, tahapan pemilihan, rekapitulasi, penetapan dan perselisihan penetapan pilkada. "Nah,

sejauh ini saya kira hampir 80 persen semua tahapan sudah berjalan," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu melanjutkan indikator kedua ialah tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat maka pelaksanaan Pilkada akan tetap terjaga kualitasnya dan KPU sudah menetapkan target partisipasi pemilih 77,5 persen.

"Kita punya *benchmark* sebetulnya di tahun 2019 kan rata-rata (partisipasi) 83 persen secara nasional, walaupun enggak bisa kita bandingkan *apple to apple* karena antusiasme masyarakat terhadap Pilpres lebih tinggi dibandingkan Pilkada. Namun saya kira target 77 persen itu realistis, tetapi juga harus didukung oleh kerja keras kita semua," terang Doli.

Karena itu, Doli selalu menekankan bahwa partisipasi pemilih ini bukan hanya dibebankan kepada penyelenggara saja dalam hal ini KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tetapi bagaimana pemerintah daerah (pemda) juga mampu meyakinkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan nyaman.

"Masyarakat merasa bahwa TPS itu tempat yang bersih dan aman. Itu juga perlu ada sosialisasi," sambung Legislator Dapil Sumatera Utara III itu.

Karena itu, dia menambahkan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 dilakukan dengan menerapkan adaptasi terhadap kebiasaan-kebiasaan baru. Salah satunya penerapan protokol kesehatan yang ketat, agar tidak terjadi penyebaran Covid-19, sehingga kualitas pilkada tetap terjaga dan masyarakat aman. Dan aman dari Covid-19 menjadi syarat yang tidak terpisahkan, bukan hanya penyelenggara dan peserta pilkada, tapi juga seluruh masyarakat.

"Sukses yang ketiga adalah jika semua tahapan berjalan dengan baik dan tingkat partisipasi tinggi, tetapi kita semua harus selamat dan aman, baik pemilih maupun penyelenggaranya," tandasnya.

Senada dengan Doli, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga mengatakan, ada dua indikator sukses Pilkada Serentak 2020 berdasarkan rangkuman diskusi dengan berbagai pihak, dan mengacu pada pengalaman negara-negara yang berhasil melaksanakan Pemilu di tengah wabah Covid-19.

Menurut dia, indikator pertama adalah antusiasme masyarakat untuk memberikan suara yang ditunjukkan oleh partisipasi pemilih yang meningkat. Sedangkan indikator kedua adalah terlaksananya Pilkada dengan aman Covid-19, dalam arti penyelenggaraan Pilkada tidak menjadi pemicu merebaknya wabah Covid-19.

Kasto mengatakan dua poin itu saat menjadi narasumber dalam Webinar bertajuk "Pilkada Aman Covid-19 dan Demokratis". Webinar itu hasil kerjasama dari Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada) dan

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).

Lebih jauh Kasto menambahkan, indikator sukses tersebut merupakan rangkuman dari berbagai pendapat yang dihimpun oleh pemerintah dan para stakeholder dalam rentang waktu lima bulan terakhir dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Indikator itu juga merupakan hasil pengkajian atas pengalaman beberapa negara yang melak-

untuk melanjutkan tahapan Pilkada Serentak yang akan diadakan pada bulan Desember," kata Kasto.

Ia menekankan, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dengan partisipasi masyarakat yang tinggi dengan dibarengi protokol kesehatan yang ketat sehingga tidak memicu penularan Covid-19, akan menjadi reputasi yang baik bagi bangsa Indonesia di mata dunia. Oleh sebab itu, ia mengatakan Kemendagri akan mengerahkan



Doli Kurnia Tanjung



Kastorius Sinaga

sanakan Pilkada di masa pandemik Covid-19, khususnya Korea Selatan.

"Dalam lima bulan terakhir, berbagai rapat dan pertemuan yang dikomandoi oleh Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian, dan oleh Pak Dirjen Otda, serta komponen lain di Kemendagri, untuk membicarakan dan kemudian memutuskan, memilih skenario optimis

seluruh sumber daya untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2020 bersama dengan elemen-elemen pemangku kepentingan lainnya.

Tentu saja untuk mengukur terpenuhinya tanda kesuksesan ini memerlukan upaya keras. Hasil dan dampaknya kita lihat di penutup 2020 dan awal 2020. ●

MASIH PERLU WAKTU MENUNGGU HASILNYA

Pilkada 2020 akan tercatat dalam sejarah karena pesta demokrasi ini berlangsung saat Indonesia masih darurat penyebaran COVID-19.

Tentu saja, bakal banyak perbedaan pada pelaksanaannya. Apa sajakah?

Suara-suara yang menginginkan Pilkada tahun ini ditunda dengan alasan pandemi Covid-19 terasa semakin kencang. Salah satunya tercermin dari Survei Indikator Politik pada Juli 2020 yang menemukan, antara lain, 63 persen warga berharap penundaan.

Namun, dalih yang menginginkan Pilkada tetap berlangsung dengan segenap kompleksitasnya masuk akal juga. Salah satu persoalan genting pasca penundaan Pilkada adalah gangguan terhadap kesinambungan jalannya pemerintahan yang justru memerlukan pengambilan kebijakan yang lebih baik saat banyak masalah di depan mata.

Maka, pemerintah berupaya dengan berbagai cara agar Pilkada tahun ini tetap terlaksana. Mulai dari penyesuaian rambu-rambu pengaman

dari wabah Covid-19 hingga uji coba di lapangan. Skalanya memang besar karena perhelatan ini akan melibatkan partisipasi sekitar 103 juta lebih warga yang terdaftar sebagai pemilih

Sebagai gambaran umum, Pilkada serentak 2020 akan derlangsung di 270 daerah. Rinciannya adalah sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Perhelatan ini seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.

Beberapa daerah kerap mendapat sorotan pada pertarungan politik Pilkada Serentak 2020 ini. Daerah itu di antaranya Surabaya, Tangerang Selatan, Depok, Medan, Solo, Makassar dan Sumatera Barat. Namun, bukan berarti daerah lain tak penting.

Pilkada 2020 di Solo dan Medan menjadi dua yang kerap mencuat ke



permukaan karena di dua kota ini akan berkompetisi calon kepala daerah yang berasal dari keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka adalah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi yang maju sebagai calon Wali Kota Solo serta Bobby Nasution, menantu Jokowi yang maju di Pilkada Medan.

Di Kota Surabaya, Jawa Timur, yang politiknya berwarna-warni sesuai dengan kekuatan partai politik, Wali Kota Tri Rismaharini sudah dua periode menjabat. Maka, dinamika politik lokal menjadi perhatian, apakah akan menunjukkan kesinambungan atau terjadi perubahan.

Selain itu di Kota Depok, Jawa Barat, apakah koalisi PDIP dan Gerindra sanggup mematahkan dominasi PKS menjadi pertanyaan utama. PKS sejauh ini boleh dibilang dominan di Kota Depok lantaran memenangkan Pilkada sejak pertama kali berlangsung pada 2006 di kota yang bertetangga angung dengan Ibu Kota ini.

Pertarungan politik di Pilkada 2020 ini menjadi penting untuk persiapan ajang Pemilihan Umum 2024. Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebutkan, hasil Pilkada kali ini akan ikut

menentukan dukungan konstituen terhadap partai untuk bersaing di 2024.

"Jika calon kepala daerah yang didukung oleh partai itu menang, maka kepala daerah terpilih tersebut akan berusaha memenangkan partai yang telah mendukungnya dan akan mendukung di Pilpres juga. Jadi semakin banyak memenangi Pilkada, maka semakin mudah untuk bisa bersaing di 2024. Pilkada 2020 ini modal. Investasi politik untuk 2024," tandas Ujang.

Ujang mengatakan kontestasi politik Indonesia itu begitu cair. Hal itu membuat arah peta politik susah ditebak hingga Pemilu 2024.

Misalnya saja Ujang melihat duet mesra partai papan atas PDIP dan Gerindra itu kembang-kempis. Mereka tak selalu mesra seperti yang kita lihat saat ini. "Kemesraan PDIP dan Gerindra hari ini tak menjamin mesra hingga 2024," kata Ujang.

Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) menilai koalisi antara PDIP dan Gerindra terbentuk bukan atas dasar ideologi, melainkan kepentingan dan pragmatisme belaka. Istilahnya boleh dibilang koalisi tapi bukan sejoli.

Jadi jika kepentingan keduanya sama di 2024, maka mereka akan bersatu. Begitu juga sebaliknya. Di politik Indonesia tak ada koalisi yang permanen, jadi mudah berubah sesuai kepentingan masing-masing," tandas Ujang.

Untuk membuktikannya, memang masih memerlukan waktu. Antara lain dinamika politik pasca Pilkada

Di sisi lain, untuk memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, pemerintah menelurkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2020 atau PKPU No 6/2020. *Beleid* itu berisi aturan penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada.

Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari dalam sebuah webinar 'Mengawal Instrumen Hukum Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19, yang diselenggarakan KPU Kota Denpasar, Sabtu 15 Agustus 2020 mengatakan, keberadaan regulasi tersebut sangat penting dalam menjaga

Jadi jika kepentingan keduanya sama di 2024, maka mereka akan bersatu. Begitu juga sebaliknya. Di politik Indonesia tak ada koalisi yang permanen, jadi mudah berubah sesuai kepentingan masing-masing," tandas Ujang.



kepastian hukum. Hal itu dapat memastikan seluruh jajaran KPU hingga tingkat daerah menerapkan dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 selama pelaksanaan tahapan Pilkada 2020.

Hasyim menambahkan, KPU juga menyiapkan simulasi proses pemungutan hingga penghitungan suara di tempat pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang melibatkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Pada penerapannya, KPU harus

agen sosialisasi penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Menurutnya kerja sama itu menjadi terobosan dalam menangani pandemi di Indonesia.

"Jajaran panwas kecamatan juga harus ingat menjalankan protokol kesehatan saat melakukan pengawasan," kata Bagja dalam webinar tersebut.

Selain penyelenggara, partai politik dan bakal calon yang akan hadir dalam pendaftaran juga diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Salah satu penerapannya antara lain saat penyerahan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada yang diatur Pasal 49 Ayat (1) PKPU 6/2020.

Dalam beleid itu diatur dokumen yang disampaikan harus dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair. Lalu sebelum diterima petugas, dokumen itu disemprot dahulu dengan cairan disinfektan.

Dalam aturan itu juga petugas penerima dokumen wajib mengenakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan sekali pakai. Aturan lainnya: membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan; dilarang membuat kerumunan; penyampaian dokumen harus berjarak dan antri; seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing; menghindari kontak fisik; penyediaan sarana sanitasi yang memadai; dan ruangan tempat kegiatan dijaga kebersihannya.

Selain proses pendaftaran, pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara juga dipastikan akan berbeda dari kondisi normal. Pada proses kampanye aturan protokol kesehatan tercantum pada Pasal 57-64.

Yang paling akan terasa berbeda pada Pilkada 2020 ini adalah, para pasangan calon harus sebisa mungkin membatasi diri bertemu dengan khalayak ramai. Dalam aturan itu juga diatur mengenai diskusi publik yang harus dilakukan di studio Lembaga Penyiaran. Pada pendukung tak diperkenankan hadir pada acara-acara tersebut.

Lantas beberapa tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang berpotensi menimbulkan keramaian perlu diantisipasi. Misalnya saja saat pengadaan logistik (19 Juli-1 Novem-



Gibran Rakabuming kampanye daring.



Bobby Nasution

mengedepankan penggunaan media digital dalam sosialisasi ataupun kampanye. Selain itu KPU juga membatasi peserta sosialisasi secara tatap muka dan membatasi jumlah massa yang mendampingi proses pendaftaran calon peserta pilkada ke KPU.

Senada dengan Hasyim, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengatakan, KPU dan jajarannya bersama Bawaslu menjadi

ber 2020), produksi dan distribusi logistik (24 September-8 Desember 2020), masa kampanye (26 September-5 Desember 2020), serta pemungutan suara (9 Desember 2020).

Untuk mewujudkan peraturan tersebut pemerintah telah menambahkan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhir Agustus lalu, total anggaran pilkada sebesar Rp15,22 triliun. Sementara yang telah dicairkan pemerintah daerah sebanyak Rp12,01 triliun atau 92,05 persen. Sehingga masih ada 7,95 persen atau Rp1,21 triliun yang belum dicairkan.

Jumlah itu sudah termasuk anggaran tambahan sebagai biaya untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) anggaran ditambahkan sebesar Rp4,7 triliun, Bawaslu Rp478 miliar, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rp39 miliar, dengan didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tapi, apakah arti aturan apabila tingkat partisipasi masyarakat rendah. Oleh karena itu menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini faktor krusial lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yakni kualitas calon kepala daerahnya itu sendiri.

"Untuk meyakinkan masyarakat bahwa pilkada itu penting dan perlu, tak bisa hanya dengan menjamin protokol kesehatan yang baik, tetapi juga membuat keyakinan kepada masyarakat bahwa pilkada ini diikuti oleh calon-calon yang kompeten dan bisa memberikan optimisme bagi perbaikan daerah di tengah situasi krisis yang sedang kita hadapi," tutur Titi dikutip Kompas.

Oleh karena itu, lanjut Titi, kesuksesan Pilkada 2020 ini juga membutuhkan komitmen partai politik. Jangan sampai investasi yang sangat mahal ini tidak diikuti oleh lahirnya pemimpin-pemimpin yang bisa mempercepat daerah melalui masa krisis.

Kompetensi calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19 menjadi kata kunci. Hal itu ka-

rena perlunya inovasi di tengah situasi penuh ketidakpastian guna memastikan daerah yang dipimpin mengalami kemajuan.

Dalam sebuah survei mengenai persepsi publik terhadap politik dinasti, kompetensi calon pemimpin daerah berkaitan dengan kemampuan berkompetisi di masa pandemi. Di antaranya keharusan untuk beradaptasi dengan model kampanye yang berubah, menjadi di ranah daring serta dari rumah ke rumah. Juga beradaptasi dengan kesulitan ekonomi yang dihadapi sebagian pihak sehubungan dengan konteks tersebut.

Dilemanya, berdasarkan hasil Survei Benturan Kepentingan dalam Pendanaan Pilkada oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK



Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari

pada tahun 2015, 2017, dan 2018, ditemukan bahwa potensi adanya benturan kepentingan berkaitan erat dengan profil penyumbang atau donatur.

Sumbangan donatur, sebagian besar adalah pengusaha, memiliki konsekuensi pada keinginan untuk mendapatkan kemudahan perizinan dalam menjalankan bisnis, keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnis. Temuan survei KPK pada 2018 memperlihatkan bahwa 83,8 persen calon berjanji akan memenuhi harapan donatur ketika calon memenangkan Pilkada.

Bagaimana dengan Pilkada 2020? Sekali lagi, masih perlu waktu menunggu hasilnya dan dinamika politik sesudahnya. ●

"Untuk meyakinkan masyarakat bahwa pilkada itu penting dan perlu, tak bisa hanya dengan menjamin protokol kesehatan yang baik, tetapi juga membuat keyakinan kepada masyarakat bahwa pilkada ini diikuti oleh calon-calon yang kompeten dan bisa memberikan optimisme bagi perbaikan daerah di tengah situasi krisis yang sedang kita hadapi," tutur Titi dikutip Kompas.

SUKSES PILKADA 2020 DAN ANGGARANNYA

Untuk meraih sukses Pilkada 2020, urusan anggaran memang sangat vital. Bagaimana perkembangan anggaran Pilkada 2020?

salurkan 3,45 triliun (99,61 persen). Sisanya yang belum tersalurkan tinggal Rp13,39 miliar (0,38 persen).

Nah, untuk aparat keamanan TNI/Polri realisasi baru mencapai 83,77 persen. Dari total alokasi Rp1,49 triliun, baru tersalurkan Rp1,25 triliun.

Menurut Tito, daerah yang paling tersendat realisasi anggaran pilkadan-

ya adalah Kota Bandar Lampung. Oleh sebab itu, Tito meminta penjabat Bandar Lampung untuk mengecek sesegera mungkin.

"Kota Bandar Lampung ini paling macet, saya juga enggak tahu kenapa. Kota Bandar Lampung, perasaan saya kalau dari rapat ini paling banyak saya tegur. Sekarang PJ (pejabat) nya kalau

Belum masuk November pencairan dana Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah se-Indonesia sudah sekitar 98 persen. Beberapa hari kemudian, angkanya sudah menanjak lagi 99 persen.

Per 19 Oktober 2020, misalnya, anggaran Pilkada 2020 yang sudah tersalurkan kepada penyelenggara dan pihak terkait tercatat 98,04 persen. Berarti tinggal 1,96 persen yang masih belum dan harus segera disalurkan.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, total alokasi anggaran Pilkada Serentak 2020 di seluruh Indonesia mencapai Rp15,11 triliun. Namun yang sudah tersalurkan sebesar Rp14,9 triliun, sehingga masih ada Rp297,88 miliar yang belum.

"Saya minta daerah yang belum menuntaskan sampai 100 persen untuk segera melunasi. Agar tidak ada lagi beban tanggungan kepada Bawaslu, KPU maupun aparat keamanan," tutur Tito dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020 di kanal Youtube KPK RI, Selasa 20 Oktober 2020.

Tito merinci, alokasi untuk KPU totalnya mencapai Rp10,24 triliun. Namun yang sudah tersalurkan Rp10,19 triliun (99,58 persen), sehingga masih tersisa Rp42,57 miliar (0,42 persen) yang belum.

Sedangkan untuk Bawaslu, dari total alokasi Rp3,47 triliun, sudah ter-



Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto

ada di sini tolong cek, daripada kami periksa dari Irjen nanti, mana uangnya,” kata Tito.

Ia menjelaskan, Kota Bandar Lampung merupakan daerah yang paling macet mengirimkan anggaran Pilkada kepada KPUD. Hal yang sama juga terjadi pada Kabupaten Paser, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Waropen dan Kabupaten Raja Ampat.

Maka Tito juga meminta Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk mendorong daerah-daerah lainnya yang belum menuntaskan 100 persen transfer anggaran. Ia meminta agar Dirjen Bina Keuangan Daerah bisa memerintahkan pejabat pelaksana tugas alias Plt daerah-daerah yang dimaksud untuk segera transfer dana supaya tidak menjadi beban penyelenggara pemilu.

“Tolong Dirjen Bina Keuangan Daerah perintahkan Plt daerah untuk segera mentransfer,” ujar dia.

Lebih lanjut, mantan Kapolri tersebut mengungkapkan realisasi anggaran Pilkada 2020 sudah hampir mendekati 100 persen. KPU sudah merealisasi anggaran Rp10 triliun lebih atau setara 99,58 persen. Kemudian Bawaslu juga sudah merealisasikan anggaran hingga 99,61 persen.

Sementara untuk aparat keamanan sudah merealisasikan anggaran sebanyak Rp1,2 triliun atau sekitar 83,77 persen.

Sedangkan daerah yang sudah merealisasikan 100 persen anggaran pilkada untuk KPUD, meliputi sembilan provinsi dan 256 kota/kabupaten. Sehingga hanya tersisa lima daerah yang

belum melunasi anggaran KPUD.

Untuk Bawaslu, realisasi anggaran sudah 100 persen di sembilan provinsi dan 257 kota/kabupaten, sisanya tinggal empat kota/kabupaten yang belum. Sedangkan untuk aparat keamanan, baru 168 daerah yang telah merealisasikan 100 persen anggaran, 93 daerah masih belum 100 persen.

Namun di 10 daerah, kata Tito, tidak menggabungkan hibah untuk aparat keamanan TNI/Polri karena sudah mengalokasikan anggaran di program kegiatan di SKPD terkait. Ke-10 daerah itu adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Malinau dan Kota Cilegon.



Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Perbaikan terjadi beberapa hari kemudian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan perkembangan pencairan anggaran Pilkada Serentak 2020 yang sudah mencapai 99 persen. Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, untuk realisasi anggaran penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu sudah di atas 99 persen.

Sementara untuk realisasi anggaran pengamanan masih di kisaran 80 persen. "(Realisasi) KPU yaitu sebesar Rp10,212 triliun atau 99,76 persen, Bawaslu Rp3,463 Triliun atau 99,86 persen, pengamanan Rp1,274 Triliun atau 85,17 persen," katanya, Kamis, 22 Oktober 2020.

Dia menyebutkan, jumlah pemda yang telah melunasi anggaran KPU sebanyak 266 daerah. Untuk anggaran Bawaslu yang sudah 100 persen sebanyak 268 daerah

Sementara itu, masih ada empat pemerintah daerah yang belum menuntaskan anggarannya baik ke KPU maupun Bawaslu. Keempat daerah itu adalah Kota Bandar Lampung dengan realisasi anggaran KPU 92,31 persen, dan Bawaslu: 89,47 persen.

"(Khusus Bandar Lampung) rencananya dilunasi tanggal 2 November 2020," ucapnya. •

BEGINI KATA WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Pilkada Kota Bandar Lampung pada 2020 sebenarnya tanpa Wali Kota petahana Herman Hasanusi. Ia telah dua kali menjabat masing-masing pada periode 2010-2015 dan 2016-2021. Apakah karena itu Pak Wali Herman HN menghambat pencairan dana Pilkada?

Per awal Oktober 2020, misalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, Lampung, belum mencairkan seluruh Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) milik Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) setempat. Akibatnya realisasi anggaran Pilkada 2020 secara keseluruhan juga terlihat macet sebagaimana dikemukakan Kemendagri di akhir bulan yang sama.

Herman HN membenarkan memang belum menyalurkan 100 persen NPHD Bawaslu di kotanya. Apa sebab? Rupanya ia kecewa atas kinerja Panwas (Panitia Pengawas).

"Bulan ini kita akan bayar lagi NPHD nya. Kalau perlu kita lunasi. Tapi, saya agak sedikit kecewa dengan Panwas. Makanya, saya lihat dulu perkembangannya. Karena *ngapain* bayar-bayar orang kalau *nggak* kerja. Misalnya, si A ini main *money politic* dibiarkan, sembako dibiarkan. Ini kan melanggar aturan. Kita sesuai aturan saja lah ya. Kalau pembiaran-pembiaran begini *ngapain* kasih honor. Ini kan uang rakyat, harus dipertanggungjawabkan," katanya Kamis, 1 Oktober 2020.

Mudah-mudahan jelas juga bagi para pasangan calon yang akan berkompetisi: Eva Dwiana - Dedi Amrullah, Yusuf Kohar - Tulus Purnomo, dan Rycko Menoza - Johan Sulaiman. •



Herman HN Walikota Bandarlampung

ANGGARAN PASANGAN CALON BAGAIMANA?

Anggaran penyelenggaraan Pilkada untuk penyelenggara memang ada. Namun, setiap pasangan calon juga tentu menyiapkan anggaran untuk kampanye pemenangnya. Bagaimana gambarannya?

Dari total 739 pasangan calon di Pilkada 2020, terdapat beberapa pasangan calon (paslon) yang memiliki Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) terbesar dibandingkan dengan paslon lainnya. Silakan cek laman infopemilu2.kpu.go.id yang berasal dari sumber resmi Komisi Pemilihan Umum.

KPU mencatat LADK paslon berkisar antara Rp300 juta hingga Rp1 miliar. Pasangan calon dengan LADK terbesar Rp1 miliar antara lain dari

Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, atas nama Surunuddin Dangga dan Rasyid. Yang juga mencapai Rp 1 miliar LADK-nya adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Melawi, Kalimantan Barat, Panji dan Abang Ahmadin.

Ada pula pasangan calon kepala daerah dengan LADK mencapai Rp600 jutaan. Antara lain paslon dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Jeje Wiradinata dan Ujang Endin, terdaftar dengan LADK sebesar Rp610 juta. Selanjutnya Paslon dari Sorong Selatan, Papua Barat, Yance Salambau dan Feliks Duwit

Kategori berikutnya adalah Paslon dengan LADK mencapai Rp500 jutaan. Di kategori ini bertengger antara lain paslon dari Kota Tangerang Selatan, Banten, Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan yang menyatakan LADK-nya sebesar Rp526 juta. Selanjutnya dari Kota Metro, Lampung atas nama paslo Wahdi dan Qomaru Zaman dengan LADK sebesar Rp501 juta.

Di kategori LADK Rp300

juta-an tercatat antara lain paslon dari Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Tony Herbiansah dan Baharudin. LADK pasangan ini pаса Rp300 juta.

Selanjutnya tercatat paslon dari Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Suardi Saleh dan Aska. LADK-nya tercatat senilai Rp300 juta. Lantas paslon Gubernur-Wakil Gubernur Sulawesi tengah, Mohamad Hidayat Lamakarte dan Bartholomeus Tandigala, mencatatkan LADK Rp 300 juta.

Tapi percayalah, itu baru LADK. Laporan awal. Jumlahnya akan meningkat seiring dengan keperluan. Tapi KPU memiliki batas teratas dana yang diperbolehkan untuk kampanye. Nanti akan ada audit terhadap dana itu. ●



**Surunuddin Dangga dan Rasyid
Rp1miliar**



Wapres Ma'ruf Amin di Mata Najwa

TARIK MENARIK ANTARA MENUNDA DAN LANJUTKAN PILKADA 2020

Tarik-menarik antara menunda dan melangsungkan Pilkada 2020 di masa wabah Covid-19 masih akan berlangsung hingga menjelang hari-H, 9 Desember 2020. Di mana titik temunya?

Memang sangat berbeda Pilkada langsung pada 2020 ini. Wabah Covid-19 masih menunjukkan tanda-tanda belum berhenti. Perbedaan pandangan pun tak terhindarkan.

Bahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sempat melontarkan kegaluannya tentang Pilkada 2020. Malah ia berpikir lebih baik Pilkada 2020 ditunda saja dulu. "Saya kira kalau saya lebih baik ditunda. Sebab anak saya kan

bukan *incumbent*. Yang berkepentingan tidak ditunda itu kan *incumbent*," kata Maruf dikutip dari kanal Youtube Najwa Shihab pada Rabu, 21 Oktober 2020.

Namun, konteks jawaban itu adalah pertanyaan presenter Najwa yang menanyakan apakah Pilkada 2020 tetap akan digelar karena ada beberapa anak dan menantu pejabat yang ikut dalam kontestasi? Malah Putri Wapres Ma'ruf sendiri, Siti Nur Azizah, menjadi kontestan Pilkada 2020 untuk memilih



Saraswati binti Hashim Djojohadikusumo

Wali Kota Tangerang Selatan, Banten.

Dalam konteks ini, Ma'ruf melihat bahwa petahana (*incumbent*) lebih berkepentingan untuk melangsungkan Pilkada 2020 dibandingkan dengan anaknya.

"Sebenarnya mungkin lebih baik kalau lawannya tidak *incumbent*, jadi saya kira tidak ke sana (Pilkada dilanjutkan)" ujar Maruf.

Ma'ruf Amin juga mengklarifikasi bahwa putrinya maju pilkada Tangerang Selatan bukanlah karena dorongan dirinya. Menurut dia, Situ Nur Azizah maju Pilkada Tangsel 2020 atas kemauannya sendiri. Terlebih dirinya tidak mempunyai partai politik sebagai kendaraan putrinya maju Pilkada.

Ia mengaku tidak mendorong anaknya maju di Pilkada. "Saya juga tidak punya partai. Saya masuk jadi Wapres juga bukan karena saya anggota partai," kata Ma'ruf Amin.

Sedangkan Siti Nur Azizah mempertanyakan wacana penundaan Pilkada Serentak 2020 karena maraknya pe-

langgaran protokol pencegahan virus corona (Covid-19) dan tak ada jaminan bahwa pilkada bebas dari pelanggaran protokol Covid-19 jika diundur beberapa bulan.

Dia yakin pasti akan ada pihak yang tetap melanggar. "Apakah menjamin kalau diundur beberapa bulan kemudian *enggak* ada yang melanggar gitu kira-kira? Apa iya? Juga tidak ada yang bisa menjamin," kata Azizah, dalam diskusi virtual Jumat, 18 september 2020.

Azizah juga mempermasalahkan wacana kampanye hanya boleh secara virtual. Menurutnya, kampanye tatap muka dengan menemui konstituen masih menjadi cara terbaik untuk mensosialisasikan diri dan janji-janji.

Meski begitu, Wakil Sekjen Partai Demokrat itu menyatakan siap mengikuti seluruh aturan. Dia tetap mengedepankan kesehatan masyarakat.

"Kalau memang itu untuk mengamankan keselamatan masyarakat, dan itu harus ditunda, ya kami harus siap," ujarnya.

Di acara diskusi yang sama, calon wakil wali kota Tangsel Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara menyatakan legawa jika pilkada harus ditunda. Kemenakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto itu menegaskan keselamatan masyarakat hal yang utama.

"Kalau kita bicara kerugian ya pasti ada hitung-hitungannya. Bagaimanapun, keselamatan masyarakat itu yang utama," ujar Sara, panggilan putri Hashim Djojohadikusumo itu.

Wacana penundaan pilkada menguat setelah maraknya pelanggaran protokol Covid-19 pada masa pendaftaran 4-6 September lalu. Bawaslu mencatat 316 bapaslun di 243 daerah melakukan pelanggaran.

Dalam konteks ini epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono menegaskan bahwa kondisi aman menjadi prasyarat untuk pilkada yang berkualitas, padahal sampai saat ini pandemi belum terkendali. "Regulasi (protokol kesehatan) memang ada,

• INFO UTAMA

tetapi siapa yang menjamin protokol kesehatan akan dipatuhi? Lalu begini, kalau paslon semua kena bagaimana? Kalau menang tetapi tidak bisa dilantik bagaimana?" ujarnya.

Pandu melihat persoalan Pilkada ini terutama terkait upaya menghadapi Covid-19. Tentu saja mitigasi atau upaya mengatasi risikonya.

beban sistem kesehatan kita yang saat ini sudah sangat terbatas," kata dia.

Selain Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 di masa pandemi, sembilan negara lainnya menyelenggarakan aneka pemilihan. Jadwal pemungutan suaranya berlangsung antara 1 Maret hingga 8 November 2020. Indonesia termasuk

menyelenggarakan pemilihan umum pada 10 Juli 2020. Myanmar juga menyelenggarakan pemilihan umum pada 8 Noveber 2020.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, partisipasi pemilih di Singapura dan Korea Selatan menunjukkan angka yang signifikan. Malah, partisipasi pemilih pemilu parlemen di Negeri



Pemilu Sukses di Korea Selatan

Dalam kaitan itu Elina Ciptadi selaku co-founder KawalCovid19.id berharap Indonesia bisa belajar dari kasus negara lain yang juga menggelar pemilihan dalam situasi pandemi. "Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ini pesta demokrasi, seharusnya ini momen bergembira bersama. Jangan kemudian momen bergembira yang hanya beberapa hari ini memberikan kedu-
kaan yang panjang dan menjadikan

akhir karena jadwal pemungutan suara Pilkada 2020 adalah 9 Desember 2020.

Sebut saja mulai dari kawasan Asia Barat seperti Tajikistan, Asrsakhian, Kirgistan, dan Tajikistan, juga Mongolia. Di Asia Selatan, ada Srilanka. Di Asia Timur Korea Selatan menyelenggarakan Pemilu Legislatif pada 15 April 2020. Kemudian di kawasan Asia Tenggara atau Asean, Singapura

Ginseng itu meningkat menjadi 66,2 persen dan menjadi partisipasi tertinggi sejak 1992.

Pada pemilu parlemen di Korsel itu, NEC (National Election Commission) melakukan sosialisasi kebijakan kode perilaku (*code of conduct*) bagi pemilih yang berpartisipasi dalam pemberian suara. Alhasil, partisipasi meningkat.

Satu bulan kemudian, Korea Selatan tidak memiliki kasus Covid-19 domes-

tik baru yang terkait langsung dengan pemilu 15 April, meskipun telah menjadi titik panas awal pandemi. Korea Selatan memiliki lebih dari 11.000 kasus yang dikonfirmasi dan 263 kematian pada pertengahan Mei.

Bagaimana Korea Selatan mempersiapkan dan berhasil melaksanakan pemilihan parlemen selama pandemi dapat menjadi pedoman bagi negara lain. Selandia Baru, Islandia, Republik Dominika, Mongolia, Burundi, dan Sri Lanka juga berencana mengadakan pemilihan mendatang sesuai jadwal. Sementara itu, setidaknya 58 negara dan wilayah telah menunda pemilihan umum karena Covid-19. Di Amerika Serikat, negara bagian Arizona, Florida, Illinois, dan Wisconsin mengadakan pemilihan pendahuluan sementara banyak negara bagian lain menunda pemilihan pendahuluan mereka. Pemilihan presiden AS dijadwalkan pada 3 November.

Bagaimana Korea Selatan, negara berpenduduk 51 juta orang, melakukannya, dan pelajaran apa yang bisa dipelajari oleh negara lain? Pertama, Korea Selatan berhasil meratakan kurva tersebut dengan memiliki rencana nasional yang terkoordinasi tentang cara menangani pandemi. Rencana itu termasuk ketentuan darurat untuk membuat tes dan memproduksi alat pelindung, serta sistem komprehensif untuk pengujian, pelacakan, dan pelacakan kontak, dan pedoman tentang jarak sosial dan acara publik. Korea Selatan tidak pernah melakukan *lock-down*.

Rencana itu termasuk ketentuan darurat untuk membuat tes dan memproduksi alat pelindung, serta sistem komprehensif untuk pengujian, pelacakan, dan pelacakan kontak, dan pedoman tentang jarak sosial dan acara publik.

Pemilihan dilakukan dengan petunjuk dan tindakan pencegahan yang jelas dan terorganisir untuk staf dan sukarelawan pemungutan suara serta 44 juta pemilih Korea Selatan, termasuk mereka yang berada di karantina sendiri dan memulihkan diri dari Covid-19. Protokolnya ketat dan tempat pemungutan suara dilengkapi dengan baik.

Studi yang dilakukan oleh Do Kyung Ryuk, JeongHyeon Oh & Yewon Sung mencontohkan bagaimana praktiknya. Dua hari sebelum pemilihan, Junyeong, seorang sarjana di Universitas Hallym di Chuncheon timur laut Seoul, ditanya oleh kantor distrik setempat di rumahnya di Incheon apakah dia bersedia memberikan suara. Dia mengatakan ya, dan kemudian menerima instruksi melalui SMS tentang proses pemungutan suara untuk mereka yang berada di bawah karantina sendiri.

Junyeong diminta memasang aplikasi karantina mandiri di ponselnya

(2 meter) sambil menunggu dalam antrian. Beberapa TPS menandai jarak dengan selotip sementara TPS lain menggunakan kerucut plastik atau sabuk yang bisa dilipat untuk menegakkan jarak sosial.

Begitu tiba giliran mereka, suhu tiap pemilih diukur. Mereka dengan suhu di atas 99,5 derajat Fahrenheit (37,5 Celcius) dikirim ke area terpisah. Masker itu wajib. Sarung tangan plastik dan pembersih tersedia di setiap TPS. Wastafel ditempatkan di pintu masuk beberapa TPS.

Setiap relawan menerima dua



Azizah binti Ma'ruf Amin

untuk melaporkan pergerakannya tiga kali: keberangkatannya dari rumah, kedatangannya di TPS, dan kepulangannya ke rumah. Kedengarannya rumit. Meski demikian, dia mengaku masih ingin menggunakan hak pilihnya.

"Saat dunia menderita pandemi, Korea Selatan mengadakan pemilihan dan memberikan kesempatan untuk memilih," tulisnya kepada kami. "Saat-saat seperti itu menciptakan mekanisme bagi masyarakat untuk memilih jalan baru bagi negara untuk mempercepat strategi pencegahan penularan baru terhadap penyebaran virus," katanya.

Aturan mengharuskan setiap TPS memasang tanda dan peralatan untuk membantu orang menjaga jarak sosial. Para pemilih diharuskan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter (1 meter), dan pemilih di karantina diperintahkan untuk berdiri dengan interval 2 meter

masker wajah, sarung tangan dan pelindung wajah, menurut seorang teman, Sewon Kim, yang merupakan relawan pemungutan suara di Incheon. Setiap sudut meja registrasi dan meja penghitungan suara dipenuhi hand sanitizer.

Namun, "Saya khawatir apakah saya akan tertular virus?" katanya. "Ada lebih dari 800 orang yang terkurung di TPS, menghitung dan memvalidasi surat suara."

Para pemilih juga memiliki pilihan untuk memberikan suara mereka dua hari sebelum hari pemilihan. Panduan mengharuskan petugas untuk mendisinfeksi setiap TPS secara berkala.

Alhasil, pemilu berakhir dengan lancar dan hanya satu kasus orang yang terinfeksi (Pasien No. 128). Tapi bukan di hari pemilihan. Sukses!!!

Bagaimana dengan Indonesia? Ya tergantung penyelenggaraannya. •



Pasangan OKU Sumsel Kuryana Azis-Johan Anuar

SEJARAH BARU PILKADA DENGAN CALON TUNGGAL DI 25 DAERAH

Sejak 2005 atau 15 tahun sejarah penyelenggaraan Pilkada secara langsung di Indonesia, setidaknya ada dua sejarah baru yang layak catat. Pertama, memang perhelatan demokrasi beriring dengan wabah Covid-19. Selain itu, terdapat 25 calon tunggal dalam Pilkada 2020 kali ini.

Ini salah satu contoh saja. Pasangan Atos Pratama - Muhammad Saleh sangat boleh jadi kecewa. Atos, Wakil Bupati Pasaman, Sumatera Barat, periode 2016-2021, dan Saleh yang masih menjabat Sekretaris Daerah di kabupaten yang sama, gagal maju Pilkada di wilayahnya sendiri.

Dari posisi Atos, yang tergolong petahana, dan Saleh pasangannya yang menjadi pejabat struktural tertinggi di kabupaten itu, apa kurangnya hingga akhirnya gagal maju di Pilkada 2020. Dengan begitu, Pariaman juga masuk sebagai salah satu daerah yang memiliki calon tunggal dalam Pilkada

2020.

Ternyata Atos-Saleh harus gigit jari lantaran hanya mendapatkan dukungan lima kursi dari Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Pasaman. Walaupun ada satu Parpol yakni Hanura yang memiliki satu kursi, dukungan itu pun masih tak cukup untuk mengikuti Pilkada tersebut yang mensyaratkan dukungan minimal 25 persen atau tujuh kursi di legislatif atau Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) setempat.

Dukungan partai-partai di legislatif Pariaman sudah diborong oleh pesaingnya, Benny Utama dan Sabar AS. Pasangan Benny-Sabar mendapat



Pasaman (Sumatera Barat) Benny Utama-Sabar AS

dukungan dari delapan partai atau 29 dari 35 kursi alias hampir 83 persen total dukungan legislatif. Jadilah Pilkada Pariaman berlangsung hanya dengan satu pasangan calon tunggal melawan kotak kosong.

Secara keseluruhan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki data daerah Pilkada yang hanya diikuti oleh calon tunggal seperti Pariaman. "Jumlah daerah yang terdapat calon tunggal sebanyak 25 Kabupaten/Kota," kata Komisioner KPU Ilham Saputra, Senin, 14 September 2020.

Relatif sedikit memang dibandingkan dengan 612 kabupaten kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020 yang berjumlah 224 kabupaten, 37 kota, dan sembilan provinsi. Tak sampai 10 persen kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada.

Sedangkan total bakal pasangan calon yang mengikuti Pilkada tahun 2020 ialah sebanyak 738 bakal pasangan calon. Mereka terdiri dari 25 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan 612 pasangan calon bupati dan wakil bupati. "Kemudian jumlah bakal pasangan calon wali kota

dan wakil wali kota sebanyak 101," ujar Ilham.

Ditinjau dari gender, jumlah bakal calon laki-laki tercatat 1.321 orang dan bakal calon perempuan 155. Sementara jumlah bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sebanyak 647.

"Sisanya jumlah bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati/ bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang melalui jalur perseorangan sebanyak 66," beber Ilham.

Ilham juga merinci, total pasangan yang mendaftar selama masa perpanjangan pendaftaran hanya tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Setelah masa pendaftaran, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan kesehatan terhadap bakal pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya.

Ini termasuk calon independen tanpa dukungan partai politik yang harus menyediakan dokumen dukungan nyata berupa salinan atau foto copy kartu tanda penduduk pendukungnya.

Jumlahnya tergantung tingkat wilayah dan jumlah pemilihnya.

Angka syarat minimal dukungan dihitung dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing wilayah. Untuk pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, di daerah dengan jumlah DPT 0-2 juta, maka syarat minimal dukungan sebesar 10 persen.

Di daerah dengan jumlah DPT 2-6 juta, syarat minimal dukungan sebanyak 8,5 persen. Daerah dengan jumlah DPT 6-12 juta syarat minimal 7,5 persen, dan 6,5 persen untuk daerah dengan jumlah DPT lebih dari 12 juta. Syarat dukungan tersebut haruslah tersebar pula di lebih dari 50 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Sementara itu, untuk pemilihan calon bupati dan wali kota, daerah dengan jumlah DPT 0-250.000, syarat minimal dukungannya sebesar 10 persen. Di daerah dengan jumlah DPT 250.000-500.000, syarat minimal dukungan sebanyak 8,5 persen. Daerah dengan jumlah DPT 500.000 - 1 juta syarat minimalnya 7,5 persen, dan 6,5 persen untuk daerah dengan jumlah DPT lebih dari 1 juta. Syarat dukungan

• INFO PILKADA

tersebut haruslah tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Setelah tahapan penyerahan syarat dukungan selesai, KPU akan melakukan serangkaian verifikasi untuk memastikan kelengkapan syarat. Hanya calon dengan jaringan massa dan biaya yang memadai dapat memenuhi syarat sebagai calon independen dalam Pilkada. Alhasil, jadilah 25 kabupaten dan kota hanya memiliki calon

lang Bawang Barat, Kabupaten Pati, Kabupaten Landak, Kabupaten Buntar, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Jayapura, Kabupaten Tambora, dan Kota Sorong.

Namun, pada Pilkada 2020 kali ini angka calon tunggal mencapai 25 orang merupakan rekor baru. Entah bagaimana dalam Pilkada-pilkada selanjutnya.

Toh di mata Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan

cara daring, Rabu, 16 September 2020.

Menurut dia, keberadaan calon tunggal membuat masyarakat hanya dihadapkan kepada dua pilihan, yakni memilih calon yang ada atau tidak memilih kandidat sama sekali. "Seandainya calonnya lebih banyak itu menjadi kabar baik bagi demokrasi karena kita memberikan pilihan kepada publik," ucap dia.

Wijayanto menilai adanya fenomena calon tunggal membuat visi misi calon kepala daerah menjadi tidak tajam lantaran tidak ada pembandingan dengan visi misi dari kandidat lain. "Tidak ada yang mengkritik visi misi salah seorang pasangan calon sehingga visi misi menjadi tidak tajam, tidak ada yang mempertajam. Kita kehilangan peluang untuk mengontestasikan visi misi dari lebih dari satu calon," ucap dia.

Keberadaan calon tunggal pada Pilkada 2020, lanjut dia, membuktikan partai politik gagal dalam menjalankan kaderisasi untuk menelurkan pemimpin selanjutnya. Wijayanto berpandangan, macetnya kaderisasi dan regenerasi pada partai politik saat ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Ia menilai di saat reformasi sudah memasuki masa dua dekade masih ada partai yang menganut oligarki. "Adanya pemimpin partai yang tidak berganti-ganti, adanya ketidaksetaraan di sana, padahal partai politik adalah pilar demokrasi," kata dia.

Namun, ada satu faktor lagi yang berpengaruh, yaitu ketentuan Undang-Undang yang mengatur pencalonan, Menurut Aryoati Ardiwandana, peneliti di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, selain kegagalan partai politik, ujarnya. Undang-Undang tentang Pilkada ke depan harus lebih bersifat antisipatif, sehingga segala risiko dan kemungkinan teknis yang terjadi di Pilkada dapat diantisipasi dengan baik.

Nilai-nilai demokrasi, kata Aryo, sebetulnya sudah tampak pada spirit UU yang sekarang, bahwa minimal harus ada dua pasangan calon untuk pelaksanaan Pilkada. Tapi kenapa masih ada calon tunggal pada 2020? •



Pasangan Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Anak Pramono Anung-Dewi Mariya Ulfa



Pasangan OKU Selatan Sumsel Popo Ali Martopo-Sholehien Abuasir

tunggal.

Memang Pilkada 2020 bukan yang pertama berhiaskan calon tunggal. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunjukkan, pada Pilkada terakhir 2017, terdapat sembilan (dari 101 daerah) yang hanya memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal. Kesembilan daerah itu antara lain: Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Tu-

Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto, keberadaan calon tunggal pada Pilkada 2020 menjadi preseden atau pertanda buruk bagi demokrasi di Indonesia. "Adanya calon tunggal adalah preseden buruk bagi demokrasi karena pilihan publik terbatas. Kalau calonnya hanya satu pasang maka publik terbatas pilihannya," ujar Wijayanto dalam diskusi yang digelar se-

Daftar Pilkada 2020 dengan Calon Tunggal

1. Kabupaten Humbang Hasundutan (Sumatera Utara)

Dosmar Banjarnahor-Oloan P Nababan.

Pengusung: Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, Demokrat.

2. Kota Gunungsitoli (Sumatera Utara)

Lakhomizaro Zebua-Sowa'a Laoli

Pengusung: PDI-P, Demokrat, Hanura, Gerindra, Golkar, Perindo, PKPI, PAN.

3. Kota Pematangsiantar (Sumatera Utara)

Asner Silalahi-Susanti Dewayani

Pengusung: Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, PAN, Hanura, Demokrat, PKPI.

4. Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat)

Benny Utama-Sabar AS

Pengusung: Golkar, Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, Nasdem, PDI-P.

5. Kabupten Ogan Komering Ulu (Sumatera Selatan)

Kuryana Azis-Johan Anuar

Pengusung: PKB, Gerindra, Golkar, PDI-P, Nasdem, PKS, PPP, Hanura, Demokrat, PBB, PKPI.

6. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Sumatera Selatan)

Popo Ali Martopo-Sholehien Abuasir

Pengusung: PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, PKS, Perindo, PPP, PAN, Hanura, Demokrat, PBB.

7. Bengkulu Utara (Bengkulu)

Mian-Arie Saptia Hadinata

Pengusung: PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, Hanura, PKPI

8. Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah)

Mohammad Said Hidayat - Wahyu Irawan

Pengusung: PDI-P

9. Kabupaten Grobogan (Jawa Tengah)

Sri Sumarni-Bambang Pujiyanto

Pengusung: PDI-P, PKB, Gerindra, PPP, Hanura, Golkar, PKS, Demokrat, PAN.

10. Kabupaten Kebumen (Jawa Tengah)

Arif Sugiyanto-Ristawati Purwaningsih

Pengusung: PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, Demokrat.

11. Kota Semarang (Jawa Tengah)

Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Pengusung: PDI-P, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, Nasdem, PSI, Golkar, PKS.

12. Kabupaten Sragen (Jawa Tengah)

Kusdinar Untung Yuni Sukowati-Suroto

Pengusung: PDI-P, PKB, Golkar, PAN, Nasdem.

13. Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah)

Afif Nurhidayat- Muhammar Albar

Pengusung: PDI-P, PKB, Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, Hanura.

14. Kediri (Jawa Timur)

Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa

Pengusung: PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, Demokrat.

15. Kabupaten Ngawi (Jawa Timur)

Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko

Pengusung: PDI-P, Golkar, PKB, Gerindra, PKS, PAN, Nasdem, Demokrat, Hanura dan PPP.

16. Kabupaten Badung (Bali)

I Nyoman Giri Prasta-I Ketut Sulasa.

Pengusung: PDI-P, Golkar, Demokrat.

17. Kabupaten Sumbawa Barat (NTB)

W Musyafirin-Fud Syaifuddin

Pengusung: PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, PKS, PAN, PKPI.

18. Kota Balikpapan (Kalimantan Timur)

Rahmad Mas'ud-Thohari Azis

Pengusung: Golkar, PDI-P, PKS, Gerindra, Demokrat, PKB, Perindo, PPP.

19. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur)

Edi Damansyah-Rendi Solihin

Pengusung: Golkar, PDI-P, Gerindra, PAN, PKS, Nasdem, PPP, Perindo, Hanura.

20. Kabupaten Gowa (Sulawesi Selatan)

Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Malaganni

Pengusung: PKB, PDI-P, Golkar, Nasdem, PKS, Perindo, PPP, PAN, Demokrat.

21. Kabupaten Soppeng (Sulawesi Selatan)

HA Kaswadi Razak-Lutfi Halide

Pengusung: PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, Demokrat

22. Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat)

HM Aras T-H Muh Amin Jasa

Pengusung: PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, PKS, Perindo, PAN, Hanura, Demokrat.

23. Kabupaten Manokwari Selatan (Papua Barat)

Markus Waran-Wempie Welly Rungkung

Pengusung: PDI-P, Golkar, Nasdem, Perindo, Hanura, PKPI.

24. Kabupaten Arfak (Papua Barat)

Yosias Saroy-Marinus Mandacan

Pengusung: PDI-P, PKB, Golkar, Nasdem, PKS, Perindo, PPP, PAN, Hanura, PKPI.

25. Kabupaten Raja Ampat (Papua Barat)

Paslon Abdul Faris Umlati-Orideko L Burdam

Pengusung: Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat. •



RIDWAN KAMIL

PEMENANG HATI RAKYAT

Usiayan masih tergolong muda. 49 tahun. Namun, namanya kini bersanding dengan beberapa tokoh nasional yang mampu bersaing dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Dia adalah Mochamad Ridwan Kamil.

Pria yang kini menduduki kursi Gubernur Jawa Barat sejak 5 September 2018 lalu, memiliki sepak terjang luar biasa dalam karir politik. Mengawali sebagai Walikota Bandung pada 2013, pria yang akrab disapa Kang Emil ini moncer diperhitungkan dalam kancah politik nasional.

Padahal secara pendidikan, pria yang lahir di Bandung 4 Oktober 1971 ini tidak pernah mengenyam bangku ilmu politik atau soial. Secara akademik, Kang Emil terdidik sebagai seorang arsitek.

Sejak kecil Emil memang selalu aktif. Bakat bisnis-

nya bahkan telah diasah dengan cara berjualan es mambo. Untuk urusan organisasi, Emil juga tergabung dalam organisasi siswa intra sekolah (OSIS). Lalu pernah menjadi anggota Paskibra, juga bergabung dengan klub sepakbola.

Pria yang saat kecil hobi membaca komik ini memang memiliki imajinasi yang tinggi. Dia kemudian membayangkan kota yang dapat membuat nyaman masyarakat. Imajinasinya kemudian dituangkan dalam sejumlah proyek rancang bangunnya. Dan mimpinya untuk menghijaukan kota tidak juga pudar.

Lewat imajinasi tersebut, sebagai

kerja. Tapi, apes. Krisis moneter membuatnya dipecat.

Tak mau kalut dengan kondisi, di Negeri Paman Sam, Emil bertahan hidup dengan cara bekerja paruh waktu, sembari tetap menjadi mahasiswa.

Setelah berhasil mendapatkan gelar Master of Urban Design, Emil muda pulang ke Tanah Air. Dia lalu mendirikan jasa konsultan perencanaan, arsitektur dan desain bernama Urbane (Urban Evolution) pada 2004. Perusahaan tersebut bahkan masih eksis hingga sekarang, dengan posisi Emil sebagai komisaris.

Berbekal bisnis tersebut, nama Emil pun naik daun di kalangan arsitek dunia. Beberapa penghargaan berhasil

di Beijing, Ras Al Kaimah Waterfront Master di Qatar, dan masih banyak proyek di berbagai negara maupun di dalam negeri yang dikerjakan Emil.

Karya-karya Emil yang mendunia, menjadikannya sebagai tokoh arsitektur yang cukup dipandang dari Indonesia di era millenium.

Bisnisnya Urbane bahkan masuk ke dalam BCI Asia Top 10 Awards dari 2008 sampai 2010. Penghargaan itu kembali diraih pada 2012.

Jakarta Berkebun

Tak mau hanya masyarakat luar negeri saja yang merasakan karya-karyanya. Satu dekade yang lalu, Emil



KEMESRAAN - Ridwan Kamil bersama sang istri Atalia Praratya Kamil berfoto dengan motor kesayangan.

putra asli Bumi Parahyangan, Emil muda masuk ke Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan arsitektur. Dia kemudian lulus dari salah satu kampus terbaik di negeri ini pada 1997.

Berbekal ijazah sarjana, RK, pun mengejar mimpi masyarakat dunia. Yakni meraih kesuksesan di Negeri Paman Sam. Mengejar sebuah slogan 'American dreams'.

Ambisi dan mimpi dipadukan kerja keras, serta otak yang cemerlang, membawa hasil sesuai harapan. Emil pun mendapat beasiswa dari University of California, Berkeley.

Sembari kuliah, Emil pun mencari tambahan pemasukan dengan be-

diraih. Seperti penghargaan Young Creative Entrepreneur Award dari British Council.

Karena kiprahnya mulai terangkat, beberapa proyek besar berhasil didapatkannya. Salah satu yang fenomenal adalah dia menjadi juara dalam merancang Museum Tsunami di Aceh pada 2007.

Setelah saat itu, beberapa proyek internasional pun menjadi portofolionya sebagai arsitektur ternama dari Indonesia. Bahkan, ia juga terlibat dalam rancangan desain Marina Bay Waterfront Master Plan di Singapura.

Lalu, sejumlah rancangan lainnya adalah Beijing Islamic Centre Mosque

menggagas sebuah konsep memanfaatkan ruang-ruang di perkotaan untuk menjadi perkebunan. Konsep tersebut dinamakan 'Jakarta Berkebun'.

Gagasan ini untuk pertama kali disampaikan ke public pada November 2010 silam. Gagasan ini dicetuskannya lewat media sosial, *Twitter*. Ternyata idenya disambut oleh banyak orang.

Emil yang masih menjadi dosen di ITB tersebut melihat, masih banyak lahan di Jakarta untuk bisa dimanfaatkan sebagai kebun. "Masih ada lahan di Jakarta yang menganggur, tidak terurus karena di situ belum didirikan bangunan," kata Emil dalam sebuah wawancara pada media pada 22 Ma-



DICINTAI - Ridwan Kamil saat masih menjadi Walikota Bandung bertemu dengan masyarakat.

ret 2011 silam.

Ayah dua anak ini merasa kehidupan kota-kota metropolitan di Indonesia saat itu, sangat tidak dekat dengan alam. Atau hijau. Dengan kacamata itulah, dia merasa perlu melakukan sebuah gerakan partisipatif dari masyarakat untuk membuat kota semakin lebih hijau.

Dia berpendapat, berkebun bisa menjadi pilihan aktivitas untuk menghilangkan stress. Tidak hanya itu, di tengah ancaman krisis pangan dunia, masyarakat kota bisa ikut berperan serta untuk memproduksi pangan.

"Lahan yang menganggur bisa dimanfaatkan untuk rekreasi dan rileks dengan aktivitas berkebun. Ini juga sekaligus bisa memproduksi pangan," tuturnya.

Konsep dari Jakarta Berkebun mengacu pada prinsip 3E. Yakni, ekologi, ekonomi dan edukasi.

Ekologi karena berkontribusi pada hijaunya kota. Ekonomi lantaran ada nilai materi dari hasil kebun. Edukasi lantaran bisa mengajarkan kepada anak-anak, bagaimana mencintai alam.

"Lahan yang kita garap pertama kali adalah di Springhill Golf Residence, Kemayoran, Jakarta Pusat," ucapnya berkacamata ini.

Lahan itu merupakan pinjaman dari klien Emil. Luas lahan yang dipinjam-

kan adalah satu hektar. Aktivitas berkebun di tanah ini dimulai pada 20 Februari 2011, dengan menanam kangkung.

"Jenis tanamannya disesuaikan dengan kondisi tanahnya. Di komunitas ini ada ahli yang meneliti unsur tanah," sambung Emil.

Menurutnya, masyarakat yang ingin berkebun ada dua, yakni warga yang dekat lahan yang dijadikan kebun atau kelompok sosial yang memang ingin bergabung. Yang jelas siapa saja bisa bergabung dalam komunitas ini, dari semua kalangan dan semua generasi.

Menghijaukan kota dengan cara berkebun bisa menjadi budaya baru masyarakat. Kegiatan ini memang bukan pertama kali, sebab di negara-negara lain, berkebun bersama sudah banyak dilakukan. Dengan berkebun bersama, maka warga kota memiliki pilihan rekreasi yang murah dan menyenangkan.

Ide dan proyek 'Jakarta Berkebun' pun berkembang pesat seiring dengan booming-nya media sosial di tanah air, terutama Twitter. Dari sekadar komunitas kecil, di dunia maya, konsep itu berkembang menjadi skala nasional. Lalu lahirlah 'Indonesia Berkebun'.

Teori semut digunakan untuk menghidupkan kegiatan ini. Yakni, masing-masing orang bisa berpartisipasi dengan caranya sendiri. Misalnya, yang

punya lahan bisa meminjamkan.

Bagi yang punya waktu untuk menyiram, maka bisa menyumbang waktu menyiram. Bagi yang memiliki bibit tanaman, maka bisa menyumbangkan bibit tanamannya.

Semua orang bekerjasama, memberikan kontribusi yang dimiliki, meski hanya sedikit. Karena menurut Emil hidup adalah untuk memberi.

Membangun Dunia dari Bandung

Memiliki nama besar di level nasional, bahkan internasional, membuat Emil sadar ada yang kurang dalam hidupnya. Yakni memberikan sesuatu bagi tanah kelahirannya, Kota Kembang.

Karena tak cukup membereskan Kota Bandung hanya dengan berkebun. Emil memang tak memiliki massa, layak para politisi saat hendak mencalonkan diri sebagai Walikota Bandung pada 2012.

Tapi, di media sosial, ia telah memiliki ratusan ribu pengikut. Jauh sebelum ada profesi sebagai influencer, Emil satu dekade yang lalu, mampu memengaruhi banyak orang pada setiap cuitan-cuitan di Twitter.

Tenar di media sosial, memiliki bisnis, dan jaringan komunitas 'Indonesia Berkebun', membuat Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera, kepincut untuk meminangnya maju sebagai



Calon Walikota Bandung, berdampingan dengan Oded Muhammad Danial sebagai wakil.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra saat itu, Hashim Djojohadikusumo beralasan partainya mendukung Emil untuk maju merebut kursi Bandung 1, karena karya-karyanya telah diakui level internasional. Serta dia dinilai telah menunjukkan kualitas sebagai pemimpin yang diharapkan mampu menjadikan Bandung menjadi kota impian.

"Di tengah bangsa Indonesia terjadi dekadensi moral yang begitu besar, praktik-praktik pembohongan publik, korupsi dan mementingkan diri sendiri ataupun golongan yang menghancurkan kesempatan dan masa depan rakyat banyak. Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai visi, idealisme tinggi. Ridwan Kamil memenuhi kriteria pemimpin tersebut, ucap adik kandung Prabowo Subianto itu.

Gerindra dan PKS tak salah langkah. Nama Emil harum mulai dari masa kampanye hingga hari pencoblosan. Pasangan Ridwan Kamil-Oded Muhammad Danial menang di 6 zona pemilihan.

Dia berhasil mengantongi 434.130 suara, atau sekitar 45,24 persen. Keduanya pun berhasil menggagalkan 7 pesaing lainnya lagi.

Sejak saat itu, suami Atalia Praratya Kamil ini mulai disorot oleh media-

media nasional, karena gayanya yang khas, dan mampu menarik simpati publik, sebagai pemimpin gaul.

Tak hanya dikenal sebagai 'Walikota Gaul', Emil juga menerapkan konsep partisipasi dalam kepemimpinannya selama satu periode di Bandung. Dia mendorong anak-anak muda Kota Kembang untuk lebih kreatif berkontribusi kepada masyarakat.

Komunitas-komunitas pun dihidupkannya melalui bantuan pemerintah. Sebagai wadah resmi, Emil bersama Oded mendirikan Bandung Creative Hub yang diresmikan pada 2017 silam.

Bangunan setinggi enam lantai yang berada di Jalan Laswi No. 7 tersebut, akan menjadi surga bagi para insan kreatif di Kota Bandung.

"Visi misi dari saya dan Mang Oded dulu ingin membawa Bandung menjadi kota kreatif dunia. Caranya adalah memfasilitasi ruangan, fasilitas teknologi yang biasanya sangat mahal dan tidak mudah," ujar Emil saat meresmikan Bandung Creative Hub.

Ya, visi dan misi yang ditawarkan Emil dan Oded saat kampanye Pilkada Bandung 2013 silam, adalah 'Membangun Dunia dari Bandung'. Mimpi itu mungkin belum terwujud semua. Tapi, dapat dilihat progress yang luar biasa, walaupun hanya satu dekade dia menjadi walikota.

Meski hanya 5 tahun, Kang Emil mampu mengukir prestasi luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan ratusan penghargaan yang berhasil diraih Pemkot Bandung sejak 2013 hingga 2017.

Selama kurun waktu tersebut, tercatat 299 penghargaan diterima Pemkot Bandung, terdiri dari 86 penghargaan provinsi, 200 penghargaan nasional, dan 13 penghargaan internasional.

Meskipun telah berhasil membawa Kota Bandung sebagai kota berprestasi, namun tak lantas membuatnya berbangga diri.

"Hidup itu bukan untuk mencari penghargaan, bekerja bukan untuk mencari penghargaan. Tetapi penghargaan itu adalah bukti telah terjadinya perubahan," ungkapnya usai mendapat penghargaan '10 Kepala Daerah Teladan' versi Tempo, di Grand Sahid Jaya Hotrel, Jakarta, pada 3 Maret 2017.

Memberi Lebih untuk Tanah Pasaundan

Sederet prestasi yang diraih selama 5 tahun, membuat banyak pihak untuk memintanya maju sebagai Calon Gubernur Jawa Barat pada 2018 silam. Awalnya, Emil sempat menolak.

Dia masih ingin untuk berbuat banyak kepada warga Kota Bandung. Namun, setelah meminta petunjuk dari Sang Pencipta, dan mendapat restu dari ibunya, Emil pun memantapkan diri bersaing dalam Pilgub Jawa Barat.

"Kalau ada sebagian masyarakat yang menginginkan saya tetap di Bandung juga itu hak mereka. Tapi ada beberapa masyarakat juga yang mendukung untuk di Pilgub," ujar Emil sebagaimana dikutip dari Antara.

Bedanya, Ridwan Kamil kali ini cerai dengan Partai Gerindra dan PKS yang mengusungnya maju dalam Pilwali Bandung 2013 silam. Sebagai teknokrat dan pebisnis, dia memang tidak pernah mengucapkan sumpah bahkan janji dengan salah satu partai politik.

Kerja sama dengan parpol hanya sebatas saat pilkada. Tidak pernah lebih dari itu. Emil mengaku adalah orang bebas. Bukan kader atau petugas partai.

"Jadi kalau ditanya kenapa enggak ikut mundur kayak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama, Red), ya masuk aja enggak, gimana keluar. Tolong dibedakan," ujar Emil member klarifikasi mengenai hubungan dengan Partai Gerindra dan PKS.

PKS legawa dengan keputusan Emil tersebut. Walaupun Partai Gerindra sempat 'sakit hati'. Walaupun pada akhirnya ikhlas, dan mengakui sempat terjadi drama yang tidak mengenakan.

PKS dan Partai Gerindra, menjadi lawan politik Emil saat Pilgub Jawa Barat. Kedua partai itu lebih memilih mengusung pasangan Sudrajat dan Akhmad Syaikh.

Banyak yang menyangsikan Emil bakal menang dalam kontestasi politik saat itu. Terlebih, dia juga menghadapi pasangan petahanan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi.

Ridwan Kamil bisa dibilang *underdog*, tak diperhitungkan. Mengaca pada kontestasi sebelumnya, hegemoni dominasi partai-partai besar yang menguasai kursi di Jawa Barat, biasa-

• INFO PROFIL

nya memudahkan calon pilihannya melangkah ke kursi Jabar-1.

Belum lagi drama terombang-ambingnya status Ridwan Kamil sebelum pencalonan, ketidakjelasan akan lewat partai mana ia maju, ditarik-ulur berbau politis.

Tapi, Emil tak gentar. Tetap maju. Beruntung, partai pengusungnya, yakni NasDem, PPP, dan PKB, kompak untuk memenangkan dia yang berpasangan dengan Uu Ruzhanul Ulum yang kala itu juga menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya.

Membawa visi 'Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi', kedua pasangan ini berhasil menumbangkan lawan-lawan-

oleh masyarakat awam, membuatnya dinobatkan sebagai 'Gubernur Mile-nial'.

Sebagai gubernur, ide-idenya mulai berkembang. Dari yang hanya seka-dar merancang bangunan, makin luas hingga ke ranah sosial, dan ekonomi. Luasnya wilayah Jawa Barat dengan sejumlah potensi yang dimiliki, Emil pun merancang Bumi Pasundan dengan sketsa dan pemikirannya sendiri.

Bahkan beberapa program infrastruktur yang ada di daerah berawal dari de-sain yang dia buat. Bahkan, dia juga ikut menuangkan buah pikiran dalam desain calon Ibu Kota Negara baru.

Menurut Emil, poin paling penting dalam desain ibu kota negara yang

lan utama yang bisa digunakan untuk parade. Selanjutnya harus kontekstual, artinya bisa memanfaatkan kondisi lingkungan di wilayah tersebut.

"Ketiga harus kontekstual yaitu ka-rena suhu tropis, banyak sungai, ba-nyak bukit itu harus masuk, jangan di-negatifkan, justru harus jadi hal positif," katanya.

Ketersediaan fasilitas untuk pejalan kaki juga menjadi satu hal penting yang menjadi pertimbangan Emil dalam memberikan penilaian. Selain itu, sis-tem transportasi publik juga menjadi satu keharusan.

Relawan Vaksin

Pandemi Covid-19 ikut membuat Emil yang menjabat sebagai gubernur pusing. Sebab, wilayah pimpinannya, Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek), menjadi salah satu episentrum penye-baran virus Corona di Indonesia.

Ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan DKI Jakarta pada pertengahan April 2020, Ridwan Kamil juga ikut membuat kebijakan se-rupa di seluruh wilayah Jawa Barat.

Wilayah Bandung Raya pun menjadi sepi selama beberapa pekan. Pintu-pintu tol dibatasi dengan ketat. Efeknya, perekonomian pun sempat terganggu. Tapi, Emil berhasil menekan angka pe-nyebaran Covid-19, meskipun wilayah seperti Bodebek masih tetap rawan un-tuk kembali meningkat.

"Melaporkan pengendalian Covid di Jabar secara umum banyak berita baik. Kasus dan angka yang dilaporkan menunjukan jauh lebih baik dibanding-kan sebelumnya," ujar dia di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Senin (12/10/2020).

Sebelum memantapkan niatnya menjadi relawan, Emil sempat menemui ibundanya. Emil mendapatkan nasihat berharga dari sang ibunda. "Nasihat dari Ibu saya, kalau ada rebutan rezeki, rakyat di depan, pemimpin belakangan. Kalau ada ramai kekhawatiran, pemimpin di depan duluan, baru rakyat belakangan," kata Emil menirukan ibunya.

Di balik keikutsertaan Emil men-jadi relawan, ada alasan besar dan rasa tanggung jawabnya sebagai pe-mimpin. Saat itu ia mengatakan, dirinya ingin mengikis keraguan masyarakat



RELAWAN - Ridwan Kamil memperlihatkan tangan yang disuntikan vaksin Covid-19.

nya. Meski hanya menang tipis, pasan-gan dengan jargon RINDU ini mampu meraup 7.226.254suara, atau sekitar 32,88 persen.

"Jangan khawatir saya akan me-nolong warga Bandung dengan cara baru. Kalau dulu dengan cara Walikota Bandung sekarang dengan cara seba-gai Gubernur Jabar. Masalah banjir dan transportasi akan dibantu saat menjadi gubernur," ucap Emil

Sebagai orang nomor satu di Jawa Barat, Emil pun makin naik kiprahnya di kancah politik nasional. Dengan gaya kepemimpinan yang santai, cara ko-munikasi yang lebih mudah diterima

baru adalah nilai keberlanjutan dan penggunaan simbol negara serta bu-daya, sosial, dan politik di kota baru ini.

"Kemudian ada nilai-nilai smart city, kecerdasan kota dan lain-lain," kata Emil yang juga termasuk dalam salah satu dari 13 juri desain IKN.

Selain karakteristik tersebut, Emil berfokus pada geometris yang ada dalam desain tersebut mengingat di-rinya juga merupakan arsitek yang juga memiliki pengalaman dari mendesain sebuah kota.

Karakteristik lainnya adalah, ibu kota baru ini harus monumental dengan adanya alun-alun yang besar dan ja-

mengenai upaya pemerintah yang tengah berupaya mencari vaksin bagi virus mematikan ini.

"Kalau pemimpinnya ikut, rakyat juga yakin bahwa semuanya berproses secara ilmiah. Jadi tidak ada istilah rakyat dikorbankan, pemimpinnya saja enggak yakin masa rakyatnya harus ikutan," ujar Emil.

Jika vaksin Covid-19 telah lulus uji klinis, Emil dapat membuktikan bahwa vaksin ini aman digunakan. Sehingga, warga tak perlu ragu divaksinasi jika uji klinis ketiga vaksin buatan Sinovac ini berhasil diproduksi massal.

Upaya Emil menjadi relawan penyuntikan dibarengi dengan usaha menjaga fisik agar bugar hingga hari penyuntikan vaksin. Emil mengaku terus mengatur pola makan dan tidurnya agar fisiknya terjaga.

Proses penyuntikan vaksin buatan Sinovac dilakukan di Puskesmas Garuda, Bandung, Jumat (28/8/2020).

"Ada sekitar sembilan potensi reaksi yang harus dilaporkan jika terjadi mulai gejala ringan sampai agak berat. Itu rutin diisi setiap hari dan nanti bertemu lagi 14 hari dari sekarang dan kami akan mendapatkan penyuntikan kedua karena memang tipe vaksin ini dosisnya harus dua kali," jelas dia.

Dua pekan setelah penyuntikan pertama, Emil dijadwalkan kembali menjalani penyuntikan kedua. Selama proses menunggu, tim peneliti mengimbuhi supaya Emil mengurangi aktivitas khususnya di luar daerah.

Emil menilai melawan Covid-19 bak menghadapi medan pertempuran. "Jabar mengklasifikasikan Covid-19 ini sebagai perang. Kalau perang semua harus bela negara tidak hanya yang punya jabatan semua rakyat berjuang," ungkap dia.

Romantisme dengan Si Cinta

Di balik pria hebat, konon ada wanita yang juga hebat di belakangnya. Atalia Praratya Kamil adalah 'Si Cinta' bagi Kang Emil.

Romantisme dua sejoli yang berstatus pejabat publik, tak pernah meredup sejak Atalia mengenal Ridwan Kamil dulu pada 1994.

Sosok Atalia mengubah stigma bahwa ibu pejabat tak lagi berkesan

mewah nan glamor. Kesederhanaan 'Si Cinta' sejak menjabat sebagai Ibu Walikota sudah begitu, Atalia yang dulu berpredikat lulusan terbaik Universitas Pasundan, memutarbalikkan kultur, bahwa istri pejabat tak lagi melulu cuma bermodalkan paras cantik wajah.

Atalia memupuk romantisme itu agar tetap hangat, ritual Atalia yang selalu memeluk Kang Emil, selalu dilakukan sejak mereka menikah pada 1996. Saat hendak memulai atau menutup sebuah hari.

Atalia peduli dan aktif dalam pergerakan sosial, ia terlibat di Lembaga Swadaya Masyarakat Cipta Dewi Bandung, lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan kaum hawa.

'Si Cinta' Kang Emil ini pernah berkariir sebagai host televisi lokal dan penyiar radio, makanya wajar bila melihat Atalia tak pernah canggung dan terlihat mudah saat di hadapan publik banyak.

Statusnya sebagai Ibu Gubernur didapatkan karena sosok Kang Emil, walaupun tingkat kepopulerannya dikabarkan melebihi para calon Walikota Bandung di pilkada 2018, Atalia tak bergeming untuk tergoda maju sebagai pejabat. Cukuplah ia menemani sang suami.

"25 tahun kenal, 24 tahun menikah dan hidup bersama. Saya menyaksikan setengah dari masa hidupnya yang terus bertumbuh dan berkembang," tulis Atalia Praratya di akun Instagramnya, saat merayakan ulang tahun ke-49 sang suami.

"Dari yang pendiam-melankolis, kini menjadi lebih terbuka dan sedikit sanguinis. Dari seorang arsitek, kini menjadi seorang gubernur. Dari yang mengurus 1 keluarga, kini mengurus jutaan keluarga. Dari yang dulu rambutnya sorodot gaplok, kini serepet *stock on u*," lanjutnya.

Meski banyak sifat Ridwan Kamil yang telah berubah, Atalia Praratya membeberkan satu sifat yang selama ini tetap ada dalam diri Ridwan Kamil.

"Tapi ada yang tidak berubah. Beliau tetap pribadi yang tidak pernah berhenti belajar dan sangat menyukai tantangan. Meskipun mungkin tantangan terbesar dalam hidupnya-bisa jadi-adalah saya," tulis Atalia kepada Kang Emil.

•ra

PROFIL RIDWAN KAMIL

Nama lengkap : H. Mochamad Ridwan Kamil S.T., M.U.D
Tempat/tgl lahir: Bandung, 4 Oktober 1971.
Profesi : Akademisi, Birokrat
Agama : Islam.
Pasangan : Atalia Praratya.
Anak :
 ▲ Emmiril Khan Mumtadz,
 ▲ Camillia Laetitia Azzahra.
Laporan Harta Kekayaan:
 ▲ Rp. 10.154.049.675 (2015/LHKPN)

PENDIDIKAN:

- ▲ Master of Urban Design University of California, Berkeley, Amerika Serikat (1999-2001).
- ▲ Sarjana Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, Indonesia (1990-1995).
- ▲ SMP Negeri 2 Bandung, Jawa Barat, Indonesia (1984-1987).
- ▲ SDN Banjarsari III Bandung, Jawa Barat, Indonesia (1978-1998).

PERJALANAN KARIR:

- ▲ Gubernur Jawa Barat, Indonesia (2018-2023).
- ▲ Walikota Kotamadya Bandung, Jawa Barat, Indonesia (2013-2018).
- ▲ Dosen Tidak Tetap Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, Indonesia (2002-2016).
- ▲ Pendiri PT. Urbane Indonesia (2004-2016).

FAKTA MENARIK RIDWAN KAMIL

- ▲ Museum Tsunami Aceh, adalah karya Ridwan Kamil yang berhasil memenangkan sayembara internasional di tahun 2007. Museum yang dibangun untuk mengingatkan kedahsyatan bencana Tsunami dan perjuangan publik Aceh saat restorasi.
- ▲ Gubernur yang memiliki followers (pengikut) terbanyak di Instagram dengan 11,9 juta pengikut per April 2020.
- ▲ Perjalanan kisah hidupnya direfleksikan dirinya lewat karya tulis dalam buku "Ridwan Kamil, Pemimpin Kreatif Era Milenial."



INDUSTRI BATERE MOBIL LISTRIK JADI PILIHAN MASA DEPAN

Seperti apa jika orang Indonesia, Korea, dan Tiongkok bergabung? Salah satu jawabannya adalah membangun pabrik baterai atau aki untuk kendaraan listrik. Langkah ke arah itu tampaknya akan memicu demam nikel dan efek bergandanya di dalam negeri.

Di tengah ingar-bingar dinamika politik dalam negeri, apakah industri masih bisa berkelanjutan? Memang bisa ya dan tidak. Terlebih lagi, ketidakpastian wabah virus corona (Covid-19) masih membayangi sebagai potensi kendala. Apapun, harus ada terobosan, termasuk memilih bidang industri untuk mengantisipasi masa depan.

Dalam situasi begitu, Indonesia menjajaki pembangunan pabrik baterai untuk kendaraan listrik. Sanggupkah? Pilihannya menggandeng mitra luar negeri untuk berinvestasi. Demikian-

lah, tersiar kabar Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) asal Tiongkok, dan LG Chem Ltd dari Korea (Selatan) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Aneka Tambang Tbk telah menandatangani kesepakatan awal (heads of agreement) untuk mengembangkan industri baterai mobil listrik beserta rantai pasoknya.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto, mengungkapkan perusahaan-perusahaan tersebut menandatangani kesepakatan awal



sepakat untuk menjajaki pilihan usaha patungan, meskipun rencananya masih dalam tahap yang sangat awal. Pihak LG mengemukakan, perjanjian lengkap akan berarti LG Chem mendapat akses yang stabil untuk bahan baku nikel.

Sedangkan CATL sejauh ini telah menjadi bagian dari konsorsium yang membangun pabrik pemrosesan nikel dan infrastruktur rantai pasokan baterai lainnya di Sulawesi Tengah. Akan halnya Aneka Tambang, BUMN ini mengaku menjajaki kerja sama dan mempelajari rencana pengembangan industri hilir bijih nikel.

Dari dalam negeri, penanganan rencana besar ini akan melibatkan beberapa BUMN dalam bentuk konsorsium yang melibatkan Antam, PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara. Tampaknya terobosan ini merupakan ujian bagi holding BUMN pertambangan Mind Id.

CEO Group Mind Id, Orias Petrus Moedak mengemukakan, Mind Id dan anak usahanya Aneka Tambang akan menangani sektor hulu pertambangan. Sedangkan produk tengah (intermediate) hingga hilir akan menjadi tanggung jawab Pertamina dan PLN. Saat ini, ketiga BUMN sedang menyusun skema konsorsiumnya dengan pembentukan PT Indonesia Battery.

"Di hulu ada Antam, yang intermediate ada Pertamina, hilir ada PLN. Sekarang lagi diproses. Itu nanti ada Indonesia Battery, itu holding company yang terlibat dalam pembuatan baterai dari hulu ke hilir," ujarnya Selasa, 13 Oktober 2020.

Menurut Orias, Holding Indonesia Battery akan menggandeng mitra dan membentuk perusahaan patungan atau joint venture (JV). Ada dua proyek hilirisasi nikel menjadi baterai yang akan menjadi garapan konsorsium tersebut. Rencananya, proyek itu terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan memenuhi value chain industri domestik.

Orias mengungkapkan nilai investasi dari hulu hingga hilir untuk kedua proyek baterai itu mencapai US\$ 12 miliar. Setara dengan Rp176,4 triliun pada kurs Rp14.700 per dolar AS)

"Dari hulu ke hilir, dari tambang sam-

secara terpisah dengan Aneka Tambang Tbk pada September 2020 lalu. Kesepakatan awal ini bertujuan memproduksi produk-produk bernilai lebih tinggi untuk baterai dari produk nikel milik BUMN.

Seto menyatakan, strateginya mencakup pengembangan kapasitas baru untuk pemrosesan logam hingga perakitan baterai siap pakai. "Ini adalah perlombaan teknologi. LG Chem dan CATL adalah dua pelopor dalam teknologi baterai lithium," ungkapnya.

Sedangkan Analis Bloomberg Alan Ray Restauro melihat kurangnya pasokan baterai lithium berbahan baku nikel di dalam negeri menjadi tantangan bagi Indonesia untuk memajukan industri kendaraan listrik. Di sisi lain, Indonesia juga masih tertinggal dari sisi penelitian dan pengembangan. Jadi, kata dia, memang perlu banyak terobosan untuk meningkatkan per-

mintaan kendaraan listrik di dalam negeri.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah membangun pabrik smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang mampu mengolah nikel kadar rendah menjadi bahan baku komponen baterai. Seto mengungkapkan, setidaknya salah satu pabrik akan mulai memproduksi pada akhir 2021 jika izin lingkungan dan pengolahan limbah disetujui.

Mudah dipahami rencana-rencana besar ini lantaran Indonesia memiliki hampir seperempat cadangan nikel global, logam utama untuk energi mobil listrik, dan sedang berupaya memanfaatkan keuntungan tersebut, bersama dengan harga listrik yang murah dan biaya produksi yang rendah, untuk membangun industri baterai dalam negeri.

LG Chem dan Aneka Tambang telah



pai battery pack, untuk dua perusahaan calon mitra. Nilainya sekitar US\$ 12 miliar. Kami sedang membicarakan prosesnya, mudah-mudahan tercapai,” ungkap Orias.

Dia pun berharap industri dapat menyerap batere ini nantinya. Jika industri tidak menyerap, maka ekspor tidak akan terhindarkan. Ini akan sangat disayangkan karena artinya kita malah memberikan subsidi bagi negara lain.

“Kalau kita menghasilkan sesuatu dengan harga yang tidak terlalu mahal di dalam negeri, kemudian dibeli perusahaan luar negeri, itu sama saja memberikan subsidi secara tidak langsung,” ungkapnya.

Menurut rencana, sumber pendanaan kedua proyek itu akan dipenuhi melalui ekuitas para pemegang saham

serta pinjaman perbankan. Orias berharap, ada perbankan domestik yang ikut mendanai proyek ini. Jika tidak, maka pendanaan terpaksa akan ditutupi utang global.

“Jangan sampai untuk mengembangkan ini (nikel menjadi batere), perbankan tidak berpihak, itu akan sulit. Nanti mau nggak mau pinjam dari luar negeri. Nanti jadi isu lain lagi kalau terlalu sering pinjam ke luar negeri,” ujarnya.

Produk batere dari kedua proyek untuk mendukung keperluan kendaraan listrik atau *electric vehicle* (EV) dan penyimpanan energi listrik (*storage*) khususnya dalam rangka melengkapi pemanfaatan energi surya. Untuk pasokan nikel sebagai bahan baku, Orias mengungkapkan saat ini BUMN melalui Mind Id menguasai 30,4 per-

sen cadangan nikel di Indonesia, yang dimiliki Aneka Tambang dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Saat ini, Mind Id memiliki 20 persen saham INCO.

Sejauh ini Indonesia merupakan produsen sekaligus eksportir nikel, bahan baku utama EV Battery. Pada 2019, Indonesia tercatat sebagai produsen bijih nikel terbesar di dunia. Data Badan Geologi Kementerian ESDM menginformasikan, total produksi nikel dunia pada tahun 2019 mencapai 2.668.000 ton Ni.

Kepala Badan Geologi, Eko Budi Lelono mengatakan, produksi bijih nikel Indonesia sebanyak 800.000 ton Ni pada tahun lalu atau menjadi yang terbesar di dunia. Berikutnya adalah Filipina sebanyak 420.000 ton Ni dan Rusia 270.000 ton Ni, Kaledonia Baru sebesar 220.000 ton Ni, dan negara

APA ITU HEAD AGREEMENT?

Dalam bisnis global, kesepakatan awal (*head of agreement*) merupakan persyaratan komersial utama dari suatu transaksi, tetapi mempertimbangkan bahwa perjanjian selanjutnya akan mengatur transaksi tersebut. *Head of agreement* biasanya tidak mencantumkan ketentuan akhir dari transaksi tersebut, karena tahap berikutnya lazim memerlukan negosiasi lebih lanjut.

Jika para pihak bermaksud agar *head of agreement* mengikat, itu harus berisi unsur-unsur berikut untuk memastikan itu mengikat para pihak secara hukum dan tidak dianggap hanya sebagai 'kesepakatan untuk disepakati', yang umumnya tidak memiliki kekuatan atau dampak:

- ▲ Perlu penegasan dalam naskah kesepakatan yang menyatakan bahwa kesepakatan awal segera mengikat secara hukum. Misalnya, bahwa para pihak bermaksud melanjutkannya dengan perjanjian pengelolaan resmi, dengan tujuan agar kesepakatan awal ini mengikat secara hukum. Contoh penegasan lain, misalnya, bahwa tindakan para pihak dalam menegosiasikan persyaratan baru atau syarat tambahan tidak akan mengurangi sedikitpun perikatan yang sekarang disepakati.
- ▲ Penggabungan elemen-elemen kunci dari kesepakatan yang direncanakan; ketentuan-ketentuan tertentu segera diberlakukan; dan
- ▲ Unsur kesepakatan, pertimbangan, kapasitas dan formalitas seperti yang diuraikan di atas terpenuhi.
- ▲ Akan bermanfaat pula memasukkan mekanisme penyelesaian perselisihan dan pengecualian tegas dari jenis hubungan hukum lainnya, misalnya lembaga yang dipilih.
- ▲ Frasa (anak kalimat) seperti 'tunduk pada kontrak' dan 'tunduk pada persiapan kontrak formal' perlu dihindari karena menyiratkan bahwa para pihak tidak bermaksud untuk terikat secara kontrak sampai kontrak formal dilaksanakan. Hal ini tidak menghalangi pelaksanaan satu atau lebih ketentuan kesepakatan awal bersyarat pada pelaksanaan kontrak formal.
- ▲ Frasa lain yang harus dihindari termasuk kewajiban yang 'diusulkan' dan janji untuk 'berkonsultasi' dibandingkan dengan 'bernegosiasi' atau 'bermusyawarah'. ●

lainnya dengan total 958.000 ton Ni.

"Sumber daya dan cadangan nikel Indonesia masih cukup tinggi," kata dia. Eko memaparkan, hingga Juli 2020, total neraca sumber daya bijih nikel Indonesia mencapai 11,88 miliar ton. Sedangkan total sumber daya logam nikel 174 juta ton. Adapun neraca cadangan bijih nikel hingga Juli 2020 mencapai 4,34 miliar ton dan total cadangan logam nikel 68 juta ton.

Terobosan ini tentulah mendapat tanggapan positif dari Menteri BUMN Erick Thohir, "Rencana pengembangan ini juga merupakan langkah bagus untuk memperkuat rantai pasok di Indonesia, serta pengembangan industri baterai untuk mobil listrik sebagai bagian dari proses transformasi sistem energi," ungkapnya. ●





MERGER - Proses penandatanganan CMA untuk integrasi dan peningkatan nilai bank syariah milik BUMN, di Jakarta, Senin (12/10/2020).

BANK SYARIAH MERGER, SIAPA YANG UNTUNG?

► Saham BRIS seperti Roller Coaster, Jangan Sekadar "Jual" Agama

Tiga anak perusahaan milik bank pelat merah, menggabungkan diri. PT BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT BNI Syariah (BNIS). Dengan penggabungan tersebut, resmi menjadikan mereka bank syariah terbesar di Indonesia. Ketiganya sudah melakukan penandatanganan conditional merger agreement (CMA) pada Senin, 12 Oktober 2020. Lalu siapa yang sebenarnya diuntungkan dari langkah bisnis ini?

Otak di balik penggabungan tiga bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut ialah Erick Thohir. Selaku Menteri BUMN, dia memang berhak menentukan langkah

seluruh perusahaan pelat merah. Baik dari segi pengawasan, hingga bongkar-pasang para pimpinan BUMN. Erick lah yang punya kuasa selain presiden dan wakil presiden.

Proses penggabungan BSM, BRIS, dan BNIS bisa terbilang cukup cepat. Sejak Erick berbicara kepada media pada pertengahan Juli 2020, ketiganya kini sudah melakukan penadantangan kesepakatan. Finalisasi diharapkan rampung pada Februari tahun depan.

"Rekan-rekan pegawai bank syariah yang saya banggakan. Tentunya sebagai negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia, sudah sepatutnya kita memiliki bank syariah yang



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kuat. Indonesia harus menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia," ucap Erick dalam video berdurasi 3 menit 35 detik yang dibagikannya kepada sejumlah media di Jakarta, 13 Oktober 2020 lalu.

"Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN berinisiatif untuk melakukan penandatanganan conditional merger agreement," imbuhnya masih dalam video tersebut.

Dengan ditekennya CMA tersebut menjadikan tonggak sejarah untuk merealisasikan rencana penggabungan bank-bank tersebut. "Dengan bergabungnya rekan semua dalam satu bank satu keluarga Insya Allah Indonesia akan memiliki bank syariah terbesar," jelas pengusaha yang pernah memiliki klub sepak bola Internazionale dan tim bola basket NBA, Philadelphia 76ers.

Dia mengatakan penggabungan tiga bank ini, bisa menjadi satu tujuan ekonomi, untuk umat dengan sistem yang berkeadilan dan transparan. Hal tersebut dapat dibuktikan di tengah kondisi pandemi, bank syariah justru

menorehkan kinerja yang positif.

"Saat ini kita masih tertinggal dari negara Islam lainnya. Karena itu kita harus bangkit. Namun kita juga harus yakin bila kita bersatu Insya Allah kita mampu jadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia," terang dia.

Ucapanannya memang bukan sekadar isapan jempol belaka. Manis di bibir, dan enak juga dirasakan secara kenyataan. BNI Syariah misalnya, mampu membukukan total aset Rp 50,76 triliun sampai triwulan II 2020 atau naik sebesar 19,46 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode sama 2019 yaitu Rp 42,49 triliun.

Pertumbuhan aset ini semakin mengokohkan posisi BNI Syariah sebagai bank syariah BUKU III dengan peringkat aset kedua terbesar di Indonesia. Kenaikan aset tersebut didorong oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Di triwulan II 2020, BNIS mampu meraup hasil DPK hingga Rp 43,64 triliun atau naik 20,15 persen secara yoy dibandingkan 2019, sebanyak Rp 36,32 triliun.

Sementara itu, BRIS yang sudah lebih dulu masuk ke bursa saham Indonesia,

dibandingkan kedua "teman-temannya" bahkan mampu meningkatkan asetnya hingga Rp 51,8 triliun. Setelah dilakukan penandatanganan CMA pun, sahamnya langsung meroket.

IDX mencatat, pada hari dilakukan kesepakatan CMA, saham BRIS langsung "terbang" 19,44 persen di level Rp 1.065 per lembar saham dengan nilai transaksi Rp 244,63 miliar dan volume perdagangan 234 juta saham.

Tidak hanya saat itu saja sebenarnya saham BRIS meningkat drastis. Dalam 5 hari, perdagangan terakhir saham anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ini mencuat 27 persen. Lalu, pada 3 bulan terakhir melesat 146 persen. Bahkan dalam 6 bulan terakhir saham BRIS melesat 474 persen dan year to date naik 227 persen.

Rezeki nomplok yang didapatkan BRIS itu juga dirasakan Bank Mandiri selaku pemegang saham terbesar juga beruntung dengan penggabungan ini. Artinya, Bank Mandiri akan punya anak usaha yang sudah terbuka dengan aset tambahan Rp 100 triliun.

Direktur Utama Bank BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo membocorkan tidak ada ego yang dibawa, saat rapat membahas mengenai penggabungan tiga bank syariah tersebut. BRIS, BNIS, BSM, dan tiga induk perusahaan beserta Kementerian BUMN, memiliki visi yang sama dalam proses merger ini.

Firman menerangkan, semangat gotong royong adalah hal pertama yang ada di dalam benaknya, ketika wacana merger dicetuskan oleh Menteri BUMN.

"Insya Allah, merger ini akan menghasilkan bank syariah yang lebih kuat, solid, dan terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, kami (BNIS) siap bekerja sama, bergotong-royong, untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Bahkan tidak hanya di Indonesia, karena ke depan, kita bisa berikhtiar menjadi pemimpin ekonomi syariah dunia," kata Firman.

Sebab, tidak hanya soal pengelolaan dana nasabah saja yang akan dikembangkan oleh merger bank ini. Firman menambahkan, bahwa hasil merger ini akan membantu mengembangkan industri halal yang menjadi alasan utama.

Terlebih potensinya secara global, diprediksi mencapai Rp 30 ribu triliun,

yang mencakup industri makanan halal, fesyen, kosmetik, media, pariwisata, kesehatan, serta yang terpenting adalah haji dan umrah.

"Kami berharap bank syariah hasil merger mampu mengoptimalkan potensi ekosistem halal, demi mewujudkan Indonesia sebagai produsen produk-produk halal dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ucap dia.

Sebagai bank dengan aset terbesar di antara yang lainnya, Bank Syariah Mandiri tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada karyawan. Tapi juga nasabah. Terutama mengenai pelayanan, dan jaminan. Namun, Direktur Utama Bank Mandiri Syariah, Toni EB Subari memberikan janji bahwa tidak ada karyawan yang akan dipecat. Nasabah pun terangnya juga akan lebih dimudahkan, dengan pelayanan, karena nantinya dapat melakukan transaksi di cabang BNIS dan BRIS juga.

"Selama proses integrasi maupun setelah integrasi, ketiga bank syariah dan para pemegang saham menjamin tidak akan ada PHK (pemutusan hubungan kerja). Sedangkan bagi para nasabah, merger ini belum berlaku efektif. CMA merupakan langkah awal dari proses merger," ujar Toni.

Jika ditotal ketiga bank syariah tersebut setidaknya punya 1.200 kantor cabang di Indonesia. "Sebelumnya ketiga bank ini kan kompetitor, nah cabang-cabang yang berdekatan ini akan dipindahkan ke lokasi lain agar lebih efektif jika merger rampung," jelas dia

Selain produk-produk serupa yang dimiliki ketiga bank ini turut diintegrasikan. Meski demikian, dia juga memastikan sampai proses merger rampung, nasabah masing-masing bank tetap tak perlu khawatir, lantaran operasional mereka akan berjalan normal.

"Nasabah tak perlu khawatir, tidak akan ada berubah sama sekali sampai merger berlaku efektif. Setelah efektif pun, baru kita akan relokasi cabang, product mapping, kalau berkaca pada pengalaman Bank Mandiri prosesnya bisa sampai satu tahun," sambungnya.

Bahkan Toni menerangkan, penggabungan tiga bank syariah BUMN ini akan mampu meningkatkan inovasi ekonomi dan keuangan syariah men-

jadi lebih modern.

"Kami optimis bank syariah nasional yang bersatu dan bersinergi ini akan menciptakan bank syariah yang modern, inovatif, berbasis digital, berskala global, sehingga harapannya bisa memberikan manfaat lebih luas, lebih besar kepada lebih banyak stakeholders," terang dia.

Pasca-penandatanganan CMA, yang paling aktif tentu saja BRIS. Sahamnya di bursa bak "roller coaster". Naik turun. Kadang meroket sampai Rp 1.500 per lembar saham. Namun, bisa tiba-tiba anjlok, harganya hanya Rp 781 per lembar saham. Para investor pun dibuat jantungan.

Tapi, Direktur Utama BRIS Ngatari mengatakan bahwa investor di bursa saham tak perlu khawatir. Sebab fundamental perusahaan sangat baik. Dalam 9 bulan, atau di triwulan III 2020, BRIS mampu membukukan laba sebesar 238 persen menjadi Rp 190,58 miliar, dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni Rp 56,46 miliar.

Di sisi aset, perseroan mencatatkan sebesar Rp 56 triliun pada triwulan III 2020, meningkat 51,40 persen dibandingkan triwulan III 2019. "Peningkatan laba bersih BRIS di triwulan III 2020 didukung oleh optimalisasi fungsi intermediasi yang diikuti dengan pengendalian beban biaya dana," jelas Ngatari, dalam siaran persnya, Senin (26/10/2020).

Memang di tengah pandemi ini BRIS mampu menjalankan bisnis sangat sehat. Hingga triwulan III 2020 perseroan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 40 triliun, tumbuh mencapai 57,90 persen yoy. Pertumbuhan pembiayaan yang signifikan ditopang oleh segmen Ritel (SME, mikro dan konsumen) untuk memberikan imbal hasil yang lebih optimal.

Secara rinci, pada triwulan III 2020, komposisi pembiayaan konsumen menjadi yang dominan dalam penyaluran pembiayaan di BRIS. Pembiayaan konsumen ini menjadi salah satu fokus penyaluran pembiayaan karena memiliki risiko rendah. Hal ini dikarenakan pembiayaan konsumen ini berdasarkan aset seperti KPR atau berbasis gaji, yakni pembiayaan multiguna.

Total pembiayaan konsumen yang



Menteri BUMN Erick Thohir

disalurkan BRIS hingga triwulan III 2020 mencapai Rp 12,2 triliun atau tumbuh sebesar 53,77 persen yoy.

Selain segmen konsumen, pembiayaan mikro BRISyariah juga memberikan kontribusi besar terhadap total pembiayaan. Penyaluran pembiayaan mikro tercatat sebesar Rp 10,9 triliun, tumbuh sebesar 185 persen yoy.

Pembiayaan KUR yang masuk di segmen mikro mencatat pertumbuhan positif. Penyaluran KUR di bulan September 2020, bahkan telah mencapai 95 persen dari target total di tahun



2020. "Total target KURBRIS di tahun 2020 adalah Rp 4,5 triliun. *Alhamdulillah* di bulan September 2020 kami telah menyalurkan Rp 4,3 triliun. Artinya hampir tercapai 100 persen dari target," bebernya.

Saham Roller Coaster

Sebagai satu-satunya yang telah masuk ke lantai bursa, di antara tiga bank yang akan merger, saham BRIS mengalami peristiwa cukup aneh. Di saat hari penandatanganan, sahamnya memang langsung meroket. Bahkan

ditutup positif hingga 19,44 persen.

Tapi beberapa hari kemudian, harganya melorot tajam. Para investor pun nyaris jantungan. Bagaimana tidak, harga per lembar saham hanya Rp 781 pada Kamis, 22 Oktober 2020. Rupanya fenomena ini terjadi lantaran ada investor luar negeri yang hendak memborong saham BRIS.

Sehari setelahnya, tepatnya pada Jumat, 23 Oktober 2020, harga BRIS membaik menjadi Rp 1.255 per lembar saham setelah sempat melesat naik 4,62 persen saat dibuka. Pada hari itu

tercatat transaksi BRIS mencapai Rp 702 miliar yang. Total dana asing yang masuk Rp 8,3 miliar.

Broker yang banyak memborong saham BRIS di harga ARB-nya sendiri adalah PT Samuel Sekuritas (IF) yang membeli saham sebanyak 251 ribu lot di harga rata-rata Rp 1.212 per unit dekat dengan harga ARB BRIS yakni Rp 1.210 per unit dan menjadi broker bertransaksi besar dengan pembelian rata-rata terendah di saham BRIS pada Jumat.

Selain IF, data perdagangan mencatat broker-broker lain yang getol mem-



10 BESAR DUNIA - Penggabungan tiga bank syariah, akan meningkatkan aset serta peluang untuk menjadi “top 10” bank syariah global.

beli BRIS di harga ARB-nya adalah PT Semesta Indovest Sekuritas (MG) dan PT Jasa Utama Capital Sekuritas (YB). Sedangkan broker dengan beli bersih saham BRIS terbanyak tengah jatuh kepada PT Valbury Sekuritas (CP) dengan beli bersih sebanyak 63.674 lot saham BRIS.

Di tengah kegaduhan itu, Ustaz Yusuf Mansur yang juga memiliki saham BRIS cukup banyak mengaku tetap tenang. Dia berkeyakinan, menjadi

investor bagi salah satu bank syariah yang melantai di bursa saham, tidak sekadar berbisnis.

“Harus ada kemauan untuk kebersamai industri syariah dan ekonomi umat, yang bukan bicara cash in, cash out. Bukan chip in, chip out. Memuaskan diri menjadi pemegang saham dan dapat bagi hasil dari Allah, di dan dari setiap kegiatan dan aktivitas perbankan syariah, entar keberkahan dunia, ngikut,” katanya.

Pendiri Paytren ini adalah salah satu dari sekian banyak pemegang saham BRIS dari investor ritel di bawah 5 persen. Sehingga tidak tercatat dalam laporan keuangan.

Dia mengatakan berkaitan merger BRIS dengan BNIS, dan juga BSM, Yusuf Mansur menegaskan adalah keniscayaan di investasi mana pun. “Sebenarnya gak ada pilihan. Ke depan pasti dilusi itu keniscayaan. Makanya, jaga niat banget (untuk niat investasi) atau



ya mangga ditarik, dilepas (jika ingin jangka pendek)," jelas dia.

"Dilusi, seperti keharusan sebuah perjalanan perbankan, nambah modal terus-menerus. Kecuali sudah jadi Bank BUKU 4. Mudah-mudahan kategori merger ini menjadikan bank syariah gabungan ini jadi dan berkelas bank BUKU 4 (bank dengan modal inti di atas Rp 30 triliun)," terang dia.

Persoalan terdilusi sebagai sebuah sistem, menurutnya sudah terjadi di

hampir semua bentuk dan wujud usaha apapun. Termasuk perbankan. Jika demikian, lanjutnya, maka kelak bisa saja umat yang membersamai di awal, bisa "zero" sahamnya.

"Jika ini yang terjadi, semoga segala keberkahan nawaitu berjuang karena Allah, sudah membawa kepada pulang modal dan untung dunia akhirat dari semua pintu rizki, di dan dengan berbagai bentuknya," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan niat berinvestasi jangan disertai dengan mental mengambil untung sesaat di bank syariah. "Tapi kan yang begini-begini, suka bikin nyesek diri sendiri. Diserang sana sini sendiri, diomongin yang engga-engga," tutur dia sembari tertawa.

Sebenarnya, sebelum kejadian saham naik turun ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sinyal "lampu kuning" kepada seluruh investor BRIS. Sebab, dengan adanya merger tersebut, diharapkan akan langsung menjadi Tbk. atau melantai di bursa saham. BRIS pun akan menjadi survivor.

"Kenapa BRIS jadi survivor? Karena nanti diharapkan bank hasil merger ini langsung berstatus Tbk, dan dari 3 bank syariah itu kan cuma BRIS yang Tbk," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana

OJK mengapresiasi langkah Kementerian BUMN yang melakukan merger bank Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara) syariahnya. Hal ini memang sesuai dengan keinginan OJK yang berharap agar bank-bank bisa melakukan konsolidasi baik merger maupun akuisisi.

"Karena dengan konsolidasi, tentu akan meningkatkan skala usaha, juga akan meningkatkan daya saing, tentu bank besar (hasil dari merger) ini akan lebih efisien dalam operasional. Bank skala besar dan efisien bisa memberikan pelayanan yang baik, pada akhirnya memberikan kontribusi besar bagi ekonomi," terang dia.

Seperti "bunga desa" yang dipersebutkan oleh banyak pemuda, posisi BRIS di bursa saham pun demikian. Kekuatan ketiga kelompok ini tarik-menarik cukup kuat sehingga saham BRIS bergerak liar. Setidaknya ada tiga kelompok investor yang berusaha "mempermainkan" saham BRIS.

Ketua LP3M Investa Hari Prabowo membeberkan, investor yang pertama adalah mereka yang percaya bahwa harga BRIS akan kembali turun ke tingkat harga appraisal sebesar Rp 781,29 per saham. Selanjutnya, adalah investor yang mempercayai bahwa harga wajar BRIS tidak sekecil itu. Namun, akan menjual dalam jangka pendek, jika levelnya melesat signifikan. Investor ini disebut "copet" dalam pasar modal. Terakhir, adalah mereka yang percaya dengan prospek merger bank syariah akan meningkatkan valuasi BRIS, hingga lebih dari Rp 2.000. Kelompok ini cenderung mengakumulasi barang ketika harga saham BRIS turun.

Kekuatan ketiga kelompok ini tarik-menarik cukup kuat sehingga saham BRIS bergerak liar. Sempat melesat naik, lalu dibanting, dan nyaris "ping-san" dan terkena ARB ke level Rp 1.210. "Psikologi pasar sangat mempengaruhi pergerakan saham BRIS," ujarnya.

Naik Kelas

Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) Edwin Sebayang menilai harga saham BRIS saat ini belum mahal. Karena perhitungannya harga wajar setelah merger sekitar Rp 1.900-an.

Menurutnya, kejatuhan saham BRIS saat ini adalah kesempatan untuk melakukan pembelian saham tersebut, karena ke depan saham BRIS bisa mencapai minimal Rp 2.800 per lembar saham.

Edwin mencontohkan Bank Mandiri yang merupakan bank hasil merger empat bank, yakni Bank Exim, Bank Bumi Daya, Bapindo, dan Bank Dagang Negara pada 1999. Saat masuk bursa, dan mulai mencatatkan sahamnya pada 2003, harganya hanya Rp 675 per saham. Sekarang, harga saham BMRI sudah mencapai Rp 5.525.

Jika 1 Juli lalu harga saham BRIS masih bertengger di level Rp 306 per saham. Harga sahamnya terus naik hingga Rp 1.500 pada 20 Oktober 2020. Artinya, dalam kurun waktu kurang empat bulan, harga saham bank ini melonjak empat kali lipat.

Pemerintah yang Untung

Jika ditanya siapa yang paling untung? Tentu saja pemerintah. Sesuai

namanya yakni bank BUMN, sudah selayaknya negara memiliki kuasa penuh pada induk tiga bank syariah tersebut. Maka sudah sewajarnya pemerintah yang paling diuntungkan.

Apalagi dengan penggabungan tiga bank syariah tersebut, akan membuat aset total mencapai Rp 215,6 triliun dengan modal inti lebih dari Rp 20,4

kan total asetnya dipegang oleh Al Rajhi Bank di Arab Saudi.

Total aset yang dimiliki Al Rajhi Bank sebesar US\$ 97,29 miliar atau setara dengan Rp 1.430 triliun (kurs Rp 14.700/USD). Berdasarkan situs resminya, bank ini didirikan pada 1957 dan menjadi salah satu bank terbesar di dunia dengan total aset SR (Saudi

25,84 miliar atau setara Rp 380 triliun.

Ketua Project Management Office Integrasi (PMO) dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN, Hery Gunardi mengatakan tidak hanya memiliki aset jumbo, bank hasil leburan ini juga memiliki total pembiayaan sebesar Rp 165 triliun atau setara dengan 44,99 persen total pembiayaan seluruh bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) di Indonesia yang berada di angka Rp 368 triliun.

Karena telah masuk pasar modal lebih dulu, maka peleburan ini juga membuat BRIS berpotensi masuk sebagai 10 besar bank syariah global. "Integrasi ini lebih dari sekadar *corporate action*," kata Hery Gunardi yang juga eks Wakil Dirut Bank Mandiri ini.

"Mengawal dan membesarkan bank syariah terbesar di negeri ini sesungguhnya adalah amanah yang besar," imbuh dia.

"Saya, mewakili PMO, diamanahkan oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk terus mengawal tidak hanya sampai legal merger. Tapi juga memastikan hadirnya bank syariah nasional terbesar ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi orang banyak dan membawa nama Indonesia ke kancah global sebagai pusat ekonomi syariah dunia," tutupnya.

Tidak Sekadar Jual "Agama"

Pengamat Ekonomi Syariah dari INDEF Fauziah Rizki Yuniarti menilai, tugas utama bank syariah hasil merger adalah menarik nasabah dari bank konvensional, serta orang-orang yang belum terliterasi inklusi keuangan perbankan. Sebab, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional masih rendah.

Tidak hanya bagi masyarakat pelosok, masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan pun masih banyak yang menganggap bank syariah dan bank konvensional sama. "Nilai-nilai universal dari bank syariah harus ditonjolkan untuk menarik nasabah-nasabah tersebut," kata Fauziah.

Fauziah mengingatkan, bank syariah hasil merger jangan lagi terjebak pada slogan "Indonesia merupakan populasi muslim di terbesar di dunia".



Direktur Utama Bank Mandiri Syariah, Toni EB Subari



Ketua Project PMO dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN, Hery Gunardi

triliun. Diprediksi pada 2025 nilai aset bank merger ini mencapai Rp 350 triliun, yang akan menempatkannya ke dalam 10 besar bank syariah terbesar di dunia.

Berdasarkan data dari The Asian Banker, per akhir 2019, posisi pertama 10 besar bank syariah dunia berdasar-

riyal) 343 miliar (USD 80 miliar), modal disetor SR 25 miliar (USD 6,67 miliar) dan basis karyawan lebih dari 9.600 karyawan.

Adapun di posisi ke-10, mengacu data The Asian Banker, dipegang oleh Bank Rakyat di Malaysia, dengan total aset yang dimilikinya sebesar USD

Bank BRISyariah Tbk PT

IDX: BRIS

[+ Follow](#)

1,210.00 IDR **-90.00 (6.92%)** ↓

Oct 23, 15:14 GMT+7 · Disclaimer

[1 day](#)
[5 days](#)
[1 month](#)
[6 months](#)
[YTD](#)
[1 year](#)
[5 years](#)
[Max](#)


| | |
|-----------|----------|
| Open | 1,210.00 |
| High | 1,360.00 |
| Low | 1,210.00 |
| Mkt cap | 11.76T |
| P/E ratio | 75.54 |

| | |
|------------|----------|
| Div yield | 0.091% |
| Prev close | 1,300.00 |
| 52-wk high | 1,690.00 |
| 52-wk low | 135.00 |

NAIK TURUN - Grafis harga saham Bank BRI Syariah sejak penandatanganan CMA hingga 23 Oktober 2020.

Sebab, selama hampir dua dekade, bisnis perbankan syariah mager alias malas bergerak dari pangsa pasar 5-6 persen. "Bank syariah harus "menjual" hal lain selain agama," imbuah dia.

Bank syariah hasil merger juga harus bisa jadi bank BUKU IV. Saat ini, bank Buku IV adalah BRI, Bank Mandiri, BCA, BNI, CIMB, dan Bank Danamon, Bank Panin dan Bank Permata. Sedangkan posisi bank syariah tertinggi, ya itu tadi, hanya di kelompok Buku III.

Lalu, dari mana tambahan modal bank syariah hasil merger untuk naik ke BUKU IV? Hal ini, kata Fauziah, penting untuk diperhatikan. Apakah nantinya penambahan modal berasal dari pemerintah, dari bank induk sebelum penggabungan, atau dari publik.

Menurut Fauziah, menjadi bank BUKU IV sangat penting bagi bank

syariah hasil merger. Alasannya, hal ini akan membuka kesempatan bank syariah hasil merger untuk masuk ke ceruk bisnis layanan keuangan digital alias LKD (online wallets), seperti Gopay, Dana, Ovo, dan lain-lain.

Di masa pandemi ini, digitalisasi ekonomi menjadi tulang punggung. Semua lini bisnis harus merambah menjadi digitalisasi jika ingin bertahan hidup. Apalagi, pangsa pasar LKD masih sangat besar dan terus berkembang. "Bank syariah baru harus investasi masif di IT infrastructure. Masuk ke digital banking," saran Fauziah.

Pendapat senada diungkapkan Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Agustianto Mingka. Pemerintah kata dia, harus menambah modal bank syariah hasil merger untuk bisa masuk

ke BUKU IV. Pasalnya, kalau hanya bercokol di BUKU III, ruang gerak bank syariah hasil merger masih terbatas.

Selain itu, banyak bank konvensional yang juga bertengger di kelompok BUKU III. Bank syariah hasil merger akan bersaing ketat dengan banyak bank konvensional di kelompok ini.

"Jadi, pemerintah harus suntik modal ke bank syariah baru hasil merger. Dana bisa diambil dari penyertaan modal negara (PMN) atau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)," kata Agustianto.

Meski demikian, pemerintah optimis, bank syariah hasil merger bisa masuk ke dalam bank BUKU IV. "Melalui penggabungan, harapan untuk memiliki bank syariah BUKU IV akan sangat terbuka," tandas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana. ●



AHOK 'SUPERMAN' DI PERTAMINA

► Komisaris Utama Kerjaan Direktur Utama

Tidak ada kata "tenang" di dalam kamusnya Ba suki Tjahaja Purnama (BTP). Ada saja kegaduhan yang dibuatnya. Setelah marah-marah terhadap pada jajaran direktur di Pertamina lantaran mengaku mengalami kerugian, kini Ahok, panggilan akrabnya, mengaku mengerjakan banyak hal. Sampai kerjanya menyamai direktur utama.

Tentu Ahok hanya berkelakar. Sebab, sebagai komisaris, dia memiliki jadwal hingga empat kali dalam sepekan dengan jajaran direksi perusahaan pelat merah tersebut.

Padahal, kata dia, kewajiban komisaris menggelar rapat bersama direksi hanya empat kali dalam setahun. "Kami bisa rapat seminggu kadang-kadang tiga kali empat kali. Makanya ada yang ngeledekin ini komut rasa dirut,

saya suka becanda, saya bukan komut rasa dirut. Dirut nyaru komut," tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga bercerita upaya yang telah ia lakukan untuk membenahi Pertamina, layaknya "Superman". Dia merombak sistem jenjang karir, dengan melakukan lelang jabatan terbuka bagi seluruh pekerja tanpa pandang masa jabatan dan umur.

Ia menyebut sebelum perombakan, pegawai perusahaan yang ingin naik ke

jenjang jabatan vice president, wajib memiliki masa kerja minimal 20 tahun. Padahal, seorang karyawan harusnya layak menempati posisi tersebut jika telah memiliki penilaian baik dan memenuhi standar kompetensi yang disyaratkan.

"Jadi kalau orang mau jadi vice president, orang mesti kerja mungkin di atas 20 tahun, ini urut kacang. Sekarang saya potong. Kami masuk yang kedua kali, kami tes, tadi baru rapat juga bahwa kalau kamu tes bagus juga



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



SEMBUNYIKAN IDENTITAS - Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama menutup muka sambil berjalan mendahului Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.

bisa langsung loncat 4-5 kali," jelas dia.

Meski demikian, Ahok mengaku kurang puas dan lebih suka mengocok ulang seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) di Pertamina saat ini. Hal tersebut dapat dilakukan mengetes ulang seluruh pekerja seperti yang pernah ia terapkan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Saya maunya kocok ulang kayak yang di DKI dulu. Waktu di DKI kan kalau nggak salah ada 10 ribu atau

11 ribu jabatan struktur kita pangkas. Semua dikocok ulang, tinggal 6.000 orang, kalau nggak salah," tutur Ahok.

Dia meyakini banyak pihak yang berkompeten di dalam tubuh perseroan. Pihak-pihak ini dipercaya bisa memimpin perusahaan pelat merah pada masa mendatang. "Saya percaya teori kalau atasan lurus, enggak mungkin bawahnya enggak lurus," tuturnya.

Ahok mengakui, sebagai komisaris, ia memang memiliki banyak urusan.

Ia juga tengah menjalankan fungsi pengawasan. Misalnya, memastikan tercapainya digitalisasi manajemen di berbagai bidang untuk menghindari kecurangan.

Lebih jauh, Ahok juga ingin memastikan kinerja perusahaan pelat merah membaik dan kian transparan. Saat ini, entitas telah menggandeng komite audit profesional untuk mendukung tatakelola perusahaan.

Dia juga membentuk tim khusus



DITINGGAL INVESTOR - Pembangunan kilang minyak di Bontang, Kalimantan Timur yang terancam gagal karena investor mengundurkan diri.

yang terdiri dari jajaran direksi hingga komisaris. Fungsinya adalah mengawal negosiasi pembangunan kilang-kilang minyak milik Pertamina.

Sekaligus juga bernegosiasi ulang dengan calon investor yang sempat berminat menggarap proyek kilang dengan Pertamina. "Untuk negosiasi ulang semua investor yang pernah dan mau kerjasama dengan Pertamina," ucap dia.

Penyebab dibentuknya tim khusus ini, karena ada sejumlah calon investor yang angkat kaki dari pembangunan kilang. Diduga karena terjadi "kongkalikong" antara pejabat lelang pembangunan kilang sebelumnya, dengan calon investor yang hendak bekerja sama dengan Pertamina, dalam proyek tersebut.

Padahal, pembangunan kilang adalah salah satu proyek strategis nasional yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN). "Iya banyak (yang berminat), asal jangan kita ngotot yang desain dan sebagainya. Investor yang mau kerja sama, kenapa ditolak," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Pertamina tengah menggarap empat proyek *Refinery Development Master Plan* (RDMP) dan dua *Grass Root Refinery* (GRR), demi memacu kapasitas kilang menjadi 2 juta barel per hari pada 2026 dengan volume produksi BBM sebesar 200 juta liter per hari.

Bahkan, nantinya kualitas produk BBM Pertamina juga meningkat menjadi EURO V dari saat ini EURO II. Selain itu, dampak proyek kilang ini membuat volume produksi petrokimia melesat menjadi 6.000 kilo ton per tahun dari yang saat ini 600 kilo ton per tahun.

Namun demikian, jika proyek kilang tersebut selesai, Pertamina memproyeksikan impor minyak mentah bakal naik hingga 900.000 barel per hari (bph) pada 2027. Padahal saat

ini impor minyak mentah berada di kisaran 300.000—350.000 bph. Sebaliknya, impor BBM diproyeksikan turun dengan selesai proyek kilang.

"Tidak dijalankan proyek kilang, impor BBM yang banyak. Atau bangun, tapi impor *crude*-nya yang naik," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Kendati sejumlah mitra yang sebelumnya telah bergabung memilih mengundurkan diri dari proyek kilang karena tekanan fluktuasi harga minyak, baik pemerintah maupun Pertamina sebenarnya masih optimistis proyek kilang tetap diminati oleh investor asing.

Sebelumnya mitra yang telah mengundurkan diri adalah Overseas Oil and Gas LLC yang berbasis di Oman, dari proyek Kilang Bontang di Kalimantan Timur, sehingga pada saat ini proyek tersebut ditunda. Selain itu, Saudi Aramco juga baru saja mundur dari proyek Kilang Cilacap.



Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Maritim dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan melakukan investigasi terkait dengan mundurnya mitra Pertamina di proyek Kilang Bon-tang.

Dia mengakui bahwa dengan harga minyak yang rendah akan membuat beberapa negara menahan investasi terlebih dahulu. Namun, bukan berarti tidak ada yang tertarik untuk menanamkan modal di proyek kilang nasional.

Investor China pun juga ikut melirik proyek kilang di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). "China akan investasi USD 5 miliar hingga USD 6 miliar di Batam. Kepri minta dukungan kami untuk dukung investasi itu," tuturnya.

Purbaya masih optimistis investasi kilang masih jalan apabila dikawal dengan baik. Dia menambahkan Abu Dhabi juga tertarik untuk membangun kilang di Balongan dan Dumai. "Inves-

tasi kilang prospeknya masih sangat besar," kata Purbaya.

Utang yang Menumpuk

Kemarahan Ahok pada Pertamina bukan hanya sekadar pembangunan kilang yang lambat, atau struktur karyawan yang gemuk di atas, tapi kinerjanya buruk. Pun soal utang yang semakin membengkak.

Pasalnya, Pertamina terus ingin menambah utang yang sekarang sudah mencapai USD16 miliar. Ditambah, Pertamina selalu berkeinginan mengakuisisi lapangan minyak dan gas bumi di luar negeri. Sedangkan di dalam negeri masih ada potensi yang masih bisa dieksplorasi.

"Minjem duit, sekarang sudah ngutang USD16 miliar, minjem duit terus mau akuisisi terus lagi, tidak berpikir untuk beresplorasi. Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak punya gas, ngapain di luar negeri, jangan-jangan ada komisi," kata Ahok.

Tanpa Ahok menyampaikan ke-gusarannya ke publik, sebenarnya Pertamina sedang melakukan berupaya mengakuisisi blok migas milik Occidental Petroleum Corp di Afrika dan Timur Tengah. Nilainya sekitar USD 4,5 miliar.

Informasi ini dibocorkan oleh Vice President Relations Pertamina Hulu Energi, Ifki Sukarya. "Masih dalam proses," singkat Ifki.

Tak mau dimarahi lagi, jajaran direksi lalu buru-buru membentuk tim Satuan Tugas Tender dan Negosiasi Investor/ Contractor (Satgas TNIC). Satgas ini merupakan gabungan tim investasi induk anak usaha dengan komite investasi pada dewan komisaris.

Pembentukannya kurang dari sebulan usai Ahok mengkritik kinerja perusahaan. Namun saat dikonfirmasi langsung terkait efektifitas dari satgas tersebut, ia memilih tak berkomentar. "Tanya ke corpcomm," singkat Ahok.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan pembentukan Satgas TNIC bukan untuk melakukan proses investigasi tapi akselerasi bisnis proses perusahaan.

Satgas TNIC terangnya, merupa-

kan hasil rapat bersama direksi dan komisaris. Tim ini dibentuk untuk mempercepat proyek hulu hingga hilir migas perusahaan, terutama berkaitan dengan proses tender, negosiasi, dan penjadwalan kerja sama dengan mitra nasional maupun internasional.

Selain itu, Tim Satgas juga akan memangkas proses pengambilan keputusan. Koordinasi dan komunikasi seluruh komponen perusahaan akan lebih efektif dan efisien.

Induk dan anak usaha bersama dewan komisaris akan bersama-sama melakukan proses pemilihan mitra strategis. "Pada tingkat operasional, Satgas juga diperkuat oleh tim kerja dan tim pendukung di tingkat manajemen," ujar dia.

Adapun, pada saat ini Pertamina memiliki aset lapangan migas luar negeri yang tersebar di 14 negara yaitu Aljazair, Malaysia, Irak, Kanada, Prancis, Italia, Namibia, Tanzania, Gabon, Nigeria, Kolombia, Angola, Venezuela, dan Amerika Serikat.

Dirut Pertamina Nicke beralih, upaya akuisisi blok migas tahun ini adalah sebagai upaya penambahan sumber daya, seiring dengan meningkatkan kebutuhan yang disebabkan dengan peningkatan kapasitas kilang di dalam negeri.

"Kalau tidak temukan cadangan baru atau akuisisi maka dalam 7 tahun cadangan akan habis," kata Nicke.

Menurut Nicke, cara yang paling cepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan cara mengakuisisi blok-blok migas baru.

"Akuisisi saat ini kita sedang proses akuisisi blok migas luar negeri untuk tingkatkan RTP dari 7 tahun dan tingkatkan produksi yang bisa dibawa ke dalam negeri, kita prioritas di oil. Dengan bangun kilang kita butuh tambahan kilang untuk feedstock," jelas dia.

Saat ini kapasitas pengolahan kilang-kilang Pertamina ujar dia, sebesar 1 juta bph. Sementara itu, dengan rampungnya empat proyek RDMP dan 1 GRR akan meningkatkan kapasitas pengolah menjadi 1,8 juta bph dan juga meningkatkan kualitas kilang sehingga dapat mengolah jenis sulfur yang lain.

"Jika kebutuhan untuk kilang harus

kita penuh, maka penting melakukan akuisisi luar negeri dan membawa minyaknya ke dalam. Ini bagaimana kita meningkatkan ketahanan dari penyediaan crude,” ucap dia memberi alasan.

Risiko Penyediaan Cadangan

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memang tengah merancang peraturan terkait dengan penyediaan cadangan niaga umum BBM. Tujuannya menjamin kontinuitas pasokan energi dan kesinambungan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM.

Pemegang izin usaha wajib melakukan penyediaan cadangan niaga umum BBM secara berkesinambungan pada jaringan distribusi niaganya

menjadikan kita kemudian menunda-menunda pembangunan infrastruktur untuk ketahanan energi nasional,” katanya.

Kendati demikian, dia menilai dibalik rencana tersebut terdapat keuntungan bisnis dari skema yang ditawarkan Pertamina untuk memastikan pemasok untuk memiliki tempat penyimpanan untuk BBM dan LPG di Indonesia.

Hal itu akan berdampak positif terhadap investasi infrastruktur Pertamina dan juga biaya transportasi yang lebih efisien.

“Yang perlu diperhatikan tentu adalah detail klausul kerja sama bisnisnya spt apa, bagaimana ketentuan-ketentuan klausul kerja samanya. Itu yang menjadi kunci apakah hal tersebut kita akan lebih banyak mendapat keuntun-

“Jangan sampai nanti justru pembangunan RDMP dan GRR yang memakan biaya besar akhirnya tidak feasible untuk dilakukan,” ucap dia.

Namun, dengan rencana itu, diharapkan bisa meningkatkan cadangan BBM Indonesia akan bertambah mengingat penyimpanan yang telah dilakukan di dalam negeri.

Selain itu, dengan perjanjian jangka panjang tersebut, nantinya dapat meningkatkan efisiensi dalam proses distribusi BBM dan LPG yang dijalankan Pertamina.

“Kita perlu mendapatkan penjelasan lebih detail lagi dari Pertamina terkait dengan rencana ini. Jangan sampai nanti justru akan memberatkan Pertamina dengan term and conditions yang ada,” tuturnya.

Di lain pihak, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, pemindahan penyimpanan stok BBM dan LPG ke dalam negeri akan berdampak positif bagi ketahanan energi nasional.

Rencana itu akan lebih baik apabila nantinya tidak menimbulkan konsekuensi pembiayaan dari Pertamina. Namun, jika nantinya timbul konsekuensi pembiayaan yang harus dikeluarkan Pertamina maka harus dikaji lebih matang seberapa besar biaya dan manfaatnya.

Jika ditilik lagi, kalau nanti impor BBM dari Singapura untuk jangka panjang ini terealisasi, misalnya selama 10 tahun, hingga 2031 paling tidak kita masih mempunyai stok BBM impor.

Di sisi lain, dengan total investasi sekitar USD 48 miliar, apabila proyek kilang rampung, nantinya kilang yang saat ini berkapasitas 1 juta bph akan meningkat menjadi 2 juta bph pada 2026 sehingga kebutuhan BBM dapat terpenuhi bahkan harapannya tanpa perlu impor lagi.

Didukung Kementerian BUMN

Selain melakukan perombakan cara kerja, Ahok juga melempar ide dan wacana kepada Pertamina. Yakni pembentukan super holding BUMN.

Wajar saja Ahok melempar ide tersebut, mengingat persero yang telah berusia 52 tahun itu memiliki 142 anak dan cucu perusahaan. Dia menyaran-



BERSAHABAT - Menteri BUMN Erick Thohir menyalami Ahok usai disahkan menjadi Komisaris Utama Pertamina pada 2019 lalu.

di dalam negeri selama 23 hari dalam kurun waktu 5 tahun setelah peraturan ini diundangkan.

Namun, Staf Pengajar Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto menilai proyek pembangunan kilang yang hingga saat ini masih berjalan, perlu menjadi pertimbangan Pertamina terkait dengan rencana impor ‘borongan’ tersebut.

“Perlu diperhatikan agar hal itu tidak

gan atau tidak,” jelasnya.

Senada, Direktur Executive Energi Watch Mamit Setiawan menjelaskan hal yang perlu dicermati adalah besaran kapasitas yang akan dibeli dan disimpan nanti harus diperhitungkan.

Pasalnya, rencana itu harus mempertimbangkan kemampuan kilang dan juga kebutuhan kilang jika nantinya proyek pengembangan dan pembangunan kilang telah rampung.

kan agar dibentuk super holding meniru yang sudah dilakukan pemerintah Singapura lewat Temasek.

Sebagai informasi, Temasek merupakan bentuk dari super holding pengelolaan perusahaan yang sahamnya dimiliki negara. Seluruh saham Temasek dikuasai pemerintah Singapura. Sementara Temasek sendiri merupakan induk dari berbagai perusahaan, baik di Singapura maupun di luar Singapura.

Dikutip dari laman resmi Temasek, perusahaan-perusahaan di bawah Temasek yang cukup besar antara lain DBS Group, Singapore Telecommunications, Keppel Corporation, Sembcorp, Singapore Airlines, SMRT, dan Pavilion Energy.

Sementara untuk investasi, Temasek juga melakukan penempatan investasi di perusahaan global seperti Alibaba, Dell Technologies, Tencent Meituan Dianping, Bayer, Visa, Master Card, PayPal, dan ICBC. Temasek sudah berinvestasi di seluruh benua, terbanyak di China.

Selain itu, ada ratusan investasi lain yang sifatnya tak langsung. Seperti kepemilikan saham Telkomsel di Indonesia yang diwakili oleh Singapore Telecom atau Singtel.

"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," ucap Ahok beberapa waktu lalu.

Ide ini sempat ditolak dengan keras oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Tapi, lama-lama melunak juga. Bahkan ikut mendukung. Kelinci percobaan dalam perombakan ini adalah, Pertamina.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengibaratkan Pertamina itu adalah kapal yang besar dan kuat, sehingga tidak bisa fleksibel bergerak. Untuk memudahkan pergerakan, maka organisasi dipecah menjadi beberapa subholding.

"Apakah melanggar UU? ini perlu kita pikirkan, kita kasih contoh tantangan ke depan. Ke depan, yang namanya bisnis fosil akan ditinggalkan. Energi fosil akan ditinggalkan," paparnya dalam acara webinar 'Sub Holding Pertamina Melanggar Hukum?' yang digelar oleh Ruang Energi, Kamis

(22/10/2020).

Lebih lanjut Arya mengatakan bahwa bisnis perseroan ke depan diperkirakan akan masuk ke dalam bisnis baterai. Dengan perubahan penggunaan energi ke depan, menurutnya akan ada perubahan pandangan.

Misalnya saja, lanjutnya, kaitan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menyebut bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ke depan, makna dari Pasal 33 UUD 1945 tersebut bisa saja berpindah ke industri hilir yang menggunakan sumber daya alam dan mineral dalam negeri, bukan hanya memanfaatkan sumber energi fosil.

"UUD Pasal 33, ke depan bisa dikatakan fosil bukan lagi sesuatu yang vital. Tapi malah baterai yang menjadi vital ke depannya," jelasnya.

"Dulu nikel bukan sesuatu yang penting. Penting iya tapi bukan yang terpenting. Sekarang nikel jadi perebutan orang jadi ada perubahan di sumber daya juga ini yang kita bilang ada, fleksibilitas kita harus lebih kuat daripada kaku tapi akhirnya kita tidak melihat perubahan ke depan," tegasnya.

Pada 12 Juni 2020 lalu Menteri BUMN merombak struktur organisasi Pertamina dengan membentuk lima subholding dan satu perusahaan kapal.

Arya juga sudah tidak lagi kesal dengan komentar-komentar Ahok. Meski sempat bersitegang, kini ia juga ikut mendukung Ahok untuk membuka "borok" Pertamina.

"Beliau (Ahok, red) diminta untuk menyelesaikan di internal karena beliau punya wewenanglah di sana. Dan beliau pengawas di situ dan beliau juga punya hak untuk memanggil

Lima subholding Pertamina:

1. **Upstream Subholding, yang dioperasikan PT Pertamina Hulu Energi**
2. **Gas Subholding, yang dioperasikan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS)**
3. **Refinery & Petrochemical Subholding, yang dioperasikan PT Kilang Pertamina Internasional**
4. **Power & New Renewable Energy Subholding, yang dioperasikan PT Pertamina Power Indonesia**
5. **Commercial & Trading Subholding, yang dioperasikan PT Patra Niaga.**
6. **Shipping Company, yang dioperasikan PT Pertamina International Shipping.**

Sumber: Kementerian BUMN

Melihat perubahan-perubahan semacam ini, Arya menyebut akan terjadi banyak perubahan cara pandang terhadap UU. Sejumlah pandangan ini menurutnya akan menjadi tantangan baru dan membuat bisnis harus terus berjalan, tidak berhenti, namun terus berkembang.

"Pandangan-pandangan ini yang menjadi tantangan-tantangan kita, bisnis itu tidak ada yang namanya stuck. Bisnis harus terus bergerak, apalagi sumber daya akan terus bergerak," tuturnya.

Arya mencontohkan kebutuhan pada mineral nikel dulu bukan sesuatu yang penting. Tapi dengan adanya pergeseran pemanfaatan energi dari fosil ke energi baru terbarukan (EBT), pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik. Dengan demikian, keberadaan nikel saat ini menurutnya menjadi sangat penting.

rapat semua direksi," jelas Arya.

Menurut Arya, jika ada yang salah, Ahok bisa melakukan pembenahan. "Kalau dia merasa ada yang tidak benar itu harus dibenarkan, kan komut salah satu tugasnya itu melakukan pembenahan. Jadi Pak Erick minta itu kepada Pak Ahok melakukan transformasi di Pertamina," terangnya.

Arya juga menepis jika Erick Thohir menegur Ahok. Menurut Arya, konten yang disampaikan Ahok sangat baik. "Saya nggak ngomong menegur loh, memanggil aja, memanggil nanya, ini gimana, kontennya diterima, masukannya Pak Ahok bagus banget itu bagian transformasi di Pertamina. Bagaimana membuat transparan, bagaimana membuat rantai birokrasi di sana menjadi bagus, atau juga misalnya ada proyek-proyek yang belum dilaksanakan juga didorong itu kan tugas dari komut juga," tutup dia. •ra



► Status Wajar Tanpa Pengecualian 5 Tahun Berturutan

6 KALI MALAH

Bersyukurlah warga Sumatera Selatan lantaran Pemerintah Provinsi telah lima kali berturut-turut meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian dari Kementerian Keuangan RI. Ini tanda-tanda baik bahwa penggunaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dapat lebih dipertanggungjawabkan.

Sama-sama bahagia seharusnya. Baik yang menerima maupun yang menyerahkan piagam penghargaan penghargaan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI atas LKPD Provinsi Sumsel Tahun 2019 serta plakat penghargaan setelah lima tahun berturut-turut meraih WTP.

Yang menerima adalah Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru didampingi Kepala BPKAD Sumsel, Ahmad Mukhlis. Sedangkan yang menyerahkan adalah Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Sumsel Taukhid.

Dalam kesempatan itu Taukhid didampingi beberapa stafnya. Antara lain Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang, Gustani. Kabid Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Mahmud, Kabid Pembinaan Pelaksana Anggaran I, Tantowi serta Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Sundari.

Acara penyerahan penghargaan berlangsung sederhana di Ruang Rapat Gubernur pada Senin, 2 November 2020. Namun, untuk meraih status, opini, atau pendapat WTP ini bukanlah soal sederhana. Apalagi selama lima tahun berturut-turut, antara 2014-2019.

Malah, kata Gubernur HD, sudah enam kali berturut-turut. "Bukan hanya

dalam lima tahun berturut-turut tanpa terputus kita dapat WTP. Bahkan kita sudah dapat keenam kalinya. Dan ini harus dipertahankan,” ujarnya.

Namun, Gubernur HD tetap merendah. “Alhamdulillah mewakili masyarakat Sumsel dan segenap jajaran Saya sangat berterima kasih sekali. Sebenarnya Orientasi kita bukan hanya piala tapi lebih kepada pelayanan ke masyarakat. Selama ini kita berupaya melakukan pelayanan sebaik-baiknya dan ini artinya kerja keras kita dihargai,” ujarnya.

HD berharap Pemprov Sumsel dapat terus melakukan pengelolaan keuangan yang sesuai standar. “Saya berkomitmen pengelolaan akan tetap akuntabel dan berjalan sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Harap maklum, status WTP dari pemerintah pusat menandakan keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Setidaknya, uang yang masuk dan keluar dari kas daerah relatif sangat bersesuaian antara laporan dan kenyataan konkretnya di lapangan. Lebih dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat juga menjadi indikasi bahwa upaya menekan kebocoran anggaran, atau malah korupsi, semakin sempit ruang geraknya.

Nah, terkait perkembangan kebijakan fiskal, soal pemasukan dan pengeluaran anggaran di APBD, Gubernur HD tetap optimis arahnya konsisten menuju pertumbuhan ekonomi Sumsel.

Sebab itu Pak Gub tetap optimistik Sumsel masih bisa lebih baik dan tangguh dibandingkan dengan provinsi lain. Caranya, kata Gubenru HF, selain

“
Alhamdulillah mewakili masyarakat Sumsel dan segenap jajaran Saya sangat berterima kasih sekali.

berinovasi dan berimprovisasi, Pemprov juga mendorong sektor UMKM dan pertanian agar secepatnya bangkit kembali. “Sekarang ini kita sudah masuk lima besar penghasil pangan terbesar di Indonesia,” ungkapnya mencontohkan.

Sedangkan Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumsel Tauhid, terang-terangan mengapresiasi raihan penghargaan yang luar biasa kepada Pemprov Sumsel ini. Tak hanya menyerahkan penghargaan, Tauhid juga menyampaikan perkembangan kebijakan fiskal Provinsi Sumsel secara singkat.

Tauhid mengungkapkan, kebijakan fiskal diawali dengan optimisme yang luar biasa. Bahkan melihat perkembangan pendapatan belanja negara triwulan III tahun 2020 Sumsel secara umum tidak menunjukkan terpengaruh negatif dari pandemi Covid-19 yang mulai menyerang Maret 2020. Bahkan kinerja TKDD Pemprov Sumsel triwulan III menunjukkan realisasi mencapai 83 persen.

Jadi, bersyukurlah warga Sumsel. Pemasukan dan pengeluaran APBD-nya lebih dapat dipertanggungjawabkan. ●



APA ITU WAJAR TANPA PENGECUALIAN?

Laporan keuangan mendapat opini wajar tanpa pengecualian jika auditor (pemeriksa, bisa instansi pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Badan Pemeriksa Keuangan, juga auditor swasta nasional maupun global) tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan, dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Di Indonesia, standardnya sudah mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) yang diakui secara global.

Nah, dengan standard akuntansi itu, laporan keuangan

akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi persyaratan berikut :

- Laporan keuangan disajikan lengkap.
- Bukti audit yang dibutuhkan sesuai dan lengkap.
- Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja.
- Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diberikan, yang ditetapkan juga dengan secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya.
- Kepastian yang lebih tinggi tentang perkembangan di masa yang mendatang. ●



HERMAN DERU: PETANI JANGAN JADI BURUH DI TANAHNYA SENDIRI

Mengawali agenda kerjanya Selasa 27 Oktober 2020 pagi, Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengukuhkan kepengurusan Dewan Riset Daerah (DRD) Sumsel periode 2020-2022 di Graha Bina Praja (Auditorium) Pemprov Sumsel. Sesaat setelah pengukuhan, Herman Deru pun menantang pengurus DRD yang baru dilantik untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Sumsel.

Menurut HD, potensi pertanian di Sumsel sangatlah besar namun sayangnya, kesejahteraan petani masih perlu diperhatikan. Tak ingin petaninya menjadi buruh di tanahnya sendiri, HD berpendapat bahwa satu-satunya cara yang mendesak dilakukan adalah dengan meningkatkan produktivitas hasil pertanian dari sebelumnya dibawah 5 ton menjadi rata-rata 6 ton per hektare.

"Petani tidak bisa kita biarkan bergerak sendiri. Saya sering lakukan hitung-hitungan, mereka masih menjadi buruh di tanahnya sendiri dengan penghasilan Rp80.000-Rp100.000. Makanya Saya tantang bapak ibu sekalian (Dewan Riset Daerah) untuk membenahi pola pikir petani juga inovasi apa yang

bisa dilakukan pada Alsintan," jelas HD.

Selama ini kata HD, alat pertanian cenderung sangat mahal mencapai ratusan juta sehingga sulit dijangkau para petani. Melalui inovasi alat pertanian diharapkan ada alternatif alat yang bisa dimanfaatkan petani untuk meningkatkan produksinya.

"Saya tentu perlu dibantu para ahli. Agar segala kebijakan ini kena sasaran, efektif dan efisien. Semuanya masih mungkin diperbaiki dan ini harus menjadi pemikiran komperhensif. Kita tidak bisa bergerak parsial," jelasnya.

Menurut HD, masukan dan pertimbangan para dewan riset sangat dibutuhkan apalagi menyangkut kebijakan yang melibatkan orang banyak. Iapun berharap setiap inovasi terus diprogress perkembangannya sehingga

tidak menjadi gong yang bergema di awal saja.

"Saya mengajak mereka untuk membuat penelitian atau riset terhadap semua permasalahan yang ada misal tentang bagaimana kita meningkatkan pangan, budaya, teknologi. Itulah yang menjadi pijakan untuk para pemimpin dalam mengambil kebijakan," tambahnya.

Terpenting lagi lanjut HD, jiwa mental inovator jangan hanya menjadi slogan karena sebenarnya inovasi bisa mulai dilakukan dari hal kecil dan murah.

"Saya pernah membuktikan sendiri saat menjadi Bupati bahkan sampai mendapat penghargaan pada 2007. Saya mendapat penghargaan karena dapat membangun daerah dengan cost rendah. Semua Saya libatkan, petani, buruh, ASN dan terpenting para ahli," jelasnya.

Dalam upayanya mendorong tumbuh kembangnya inovasi di daerah, Pemprov Sumsel kata Herman Deru melaksanakannya secara komperhensif yakni dimulai dari hal yang paling mendasar yaitu membentuk mental inovator.

Ada 4 jurus utama yang dipeberkan-nya dalam acara tersebut yakni jurus 4S. Pertama ialah setiap orang adalah inovator, kedua bahwa setiap masalah menjadi peluang inovasi, ketiga sinergi dalam menyusun solusi serta setiap inovasi yang konkrit hasilnya.

Sementara itu Kepala Balitbangda Provinsi Sumsel Dr Ekowati Retnaningsih menjelaskan bahwa Dewan Riset Daerah mempunyai tugas dan fungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di Bidang IPTEK.

Kemudian sebagai gudang pakar (brain trust) yang berperan aktif untuk mencari alternatif pemecahan permasalahan IPTEK yang dihadapi Pemerintah Provinsi.

Sementara itu mengenai total inovasi Sumsel sepanjang tahun 2019 yang berasal dari semua OPD dan Lembaga Litbang serta perguruan tinggi mencapai 795 inovasi. Inovasi itu terdiri dari tata Kelola pemerintah 70 inovasi,

pelayanan publik 196 inovasi. Sedangkan inovasi lainnya 529.

Adapun susunan pengurus DRD Sumsel periode 2020-2022 adalah bertindak selaku Pelindung adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, Pengarah Sekda Sumsel dan Asisten

tuk pula Komisi-Komisi di antaranya Komisi Ketahanan Pangan Prof. Agus Joko dan Dr. Ir. Umar Harun, Komisi Pendidikan dan Kesehatan Dr. dr. Zulkarnaen, M.P dan Dr. Muhammad Idris, M.Pd. Komisi Energi dan Lingkungan Dr Bambang Prayitno, dan Dr. Jaksen



Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumsel serta Penanggung Jawab Kepala Balitbangda Provinsi Sumsel.

Sementara itu sebagai Ketua Prof. Dr. IR. Ri dit Pambayun, M.P, Sekretaris Dr. Tareh Rasyid, M.Si serta diben-

M. Amin, Komisi Ekonomi dan Teknologi Informasi Prof. Barnadette Robiani, M.Sc, dan Muham. ad Izman Hesdiansyah Ph.D serta Komisi Agama dan Budaya Dr Ismail, M.Ag dan Dr Husni Thamrin, S.Pai, SH. MH. •



Jembatan Ampera Palembang di malam hari.

TERPELANTING SEKALI, TAPI BISA MAJU LAGI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, sempat mendiskualifikasi petahana Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam. Namun Mahkamah Agung membatalkan putusan KPU. Jika tidak, Pilkada di tujuh kabupaten di Sumsel akan memiliki tiga pasangan calon tunggal.

KPU Ogan Ilir sempat menyatakan petahana Bupati Ilyas Panji Alam dan pasangannya, Endang Putra Utama terbukti melakukan pelanggaran administrasi sesuai dengan Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

"Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota dilarang menggunakan

kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih."

Pengaduan terhadap pasangan petahana berasal dari pesaingnya, pasangan Panca Wijaya Akbar-Arda-

ni kepada Badan Pengawas Pemilu Ogan Ilir. Dhab K Gumayra, Ketua Tim Advokasi pasangan Panca-Ardani mengatakan, ada dua temuan pokok yang mereka laporkan ke Bawaslu Ogan Ilir dan menjadi dasar keluarnya rekomendasi yang ditindak lanjuti dengan keputusan diskualifikasi oleh KPU Ogan Ilir.

Temuan pelanggaran tersebut adalah penggunaan program tanggap

darurat bencana covid 19 untuk menyosialisasikan pencalonannya, dan kedua menggunakan kegiatan kedisiplinan pelantikan pengurus karang taruna untuk pensosialisasikan pencalonannya.

Putusan diskualifikasi pun keluar dari KPU Ogan Ilir. Namun, pasangan Ilyas-Endang langsung menggugatnya ke Mahkamah Agung. Gugatan terkabul.

"Putusan dari Mahkamah Agung telah keluar hari ini. Dalam amar putusan itu, MA mengabulkan permohonan, tapi salinan surat putusannya belum kami terima," ujar Ketua Tim Advokasi Ilyas Panji Alam-Endang PU Ishak, Firli Darta, saat dikonfirmasi, Selasa, 27 Oktober 2020.

Berkas Perkara itu dilihat melalui situs MA, didaftarkan pada 14 Oktober 2020, dengan nomor register 1P/PAP/2020 disitus perkara MA, dengan jenis permohonan P/HUM, jenis perkara TUN, dengan pemohon HM Ilyas Panji Alam, dan termohon/terdakwa KPU Ogan Ilir, yang diputus pada 27 Oktober.

Firli menilai, laporan Bawaslu kepada KPU Ogan Ilir ini yang meminta mendiskualifikasi calon petahana merupakan putusan yang cacat hukum. "Untuk pertimbangan lainnya, kami belum mendapatkan salinan resmi dari MA, tapi secara tidak langsung putu-

san itu akan dikembalikan pada pasangan. Kami minta KPU menindaklanjuti ini," katanya.

Langkah selanjutnya, kata dia, pihaknya akan melaporkan balik hal ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan menerima pertimbangan dari MA. "Setelah kita menerima salinan putusan MA dan melihat dari adanya pelanggaran ini, kita akan ke DKPP," tandas Firli.

Dalam hal ini, ia menduga KPU memaksakan diri, bahkan cenderung berpihak. Dengan kejadian ini menurutnya tak menyurutkan semangat Ilyas-Endang. "(Kami) akan tancap gas lagi, dan tetap berkampanye dan sosialisasi perkembangan terbaru ini," tuturnya.

Firli bilang, sebenarnya merugikan pasangan petahana. "Tapi semakin ditekan semakin semangat lagi kita di bawah. Kita tegaskan yang benar," ujarnya.

Jika putusan MA berkekuatan hukum tetap, maka Pilkada Ogan Ilir tetap akan diikuti oleh dua pasangan calon. Ini mengurangi jumlah paslon tunggal yang sudah ditetapkan di dua kabupaten lainnya di Sumsel.

Namun, sudah lebih jelas sekarang. Pasangan Ilyas Panji Alam - Endang Putra Utama terpelanting sekali, tapi bisa maju kembali. ●

Daftar Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten OKU

1. Kuryana Azis-Johan Anuar (PKS, PBB, PAN, Golkar, PKPI, PPP, Gerindra, Demokrat, PKB, PDIP, NasDem)

Kabupaten OKU Selatan

1. Popo Ali-Sholihien (PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, Perindo, PPP, PAN, Hanura, Demokrat, PBB)

Kabupaten OKU Timur

1. Lanosin Hamzah-Adi Nugraha Purna Yudha (PKB, Demokrat, NasDem, PKS, Gerindra, Hanura, PPP, PAN, PDIP, Golkar, Perindo)
2. Kolonel Ruslan-Herly Sunawan (jalur perseorangan sebanyak 41.560 dukungan KTP)

Kabupaten Ogan Ilir

1. Ilyas Panji Alam-Endang PU Ishak (PDIP, Golkar, Hanura, PBB, Partai Berkarya)
2. Panca Wijaya Akbar-Ardani (PKB, Gerindra, Perindo, NasDem, Demokrat, PKS, PAN, PPP)

Kabupaten Musi Rawas

1. Hendra Gunawan-Mulyana (Demokrat, PDIP, Hanura, NasDem, PKS, PKB, PBB)
2. Ratna Mahmud-Suwardi (Gerindra, Golkar, PAN)

Musi Rawas Utara

1. Syarif Hidayat-Surian (PBB, Gerindra, PPP, PKS, PAN, Golkar, PKB, Demokrat, Perindo)
2. Devi Suhartoni-Inayatullah (PDIP, NasDem, Hanura)
3. Akisropi Ayub-Baikuni Anwar (jalur perseorangan sebanyak 16.655 dukungan KTP)

Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir

1. Heri Amalindo-Soemarjono (PDIP, Golkar, PKS, NasDem, Gerindra, Perindo, PPP, PBB, PKB)
2. Devi Harianto-Darmadi (Demokrat, PAN, Hanura)



Ilyas Panji Alam dan pasangannya Endang Putra Utama



Pemandangan Makassar

PELAJARAN PASLON TUNGGAL MAKASSAR

Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di Sulawesi Selatan mencakup 12 dari 24 kabupaten dan kota provinsi ini. Ada dua pasangan calon tunggal di Pilkada serentak kali ini: Masing-masing akan berlangsung di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Soppeng.

Di Kabupaten Gowa, Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Malaganni Kraeng Kio sebagai paslon tunggal Bupati dan Wakil Bupati akan menghadapi kotak kosong. Dukungan legislatif dari DPRD setempat menutup kemungkinan pasangan lain maju melawan pasangan ini.

Partai-partai yang mengusung pasangan Adnan-Kio adalah PKB, PDI-P, Golkar, Nasdem, PKS Perindo, PPP, PAN, Demokrat. Semblan partai itu merupakan perwakilan 38 kursi atau 84 persen di DPRD. Dukungan tersisa

16 persen tak memungkinkan calon lain maju karena masih jauh dari syarat minimal 25 persen dukungan. Begitu pula dengan bakal pasangan calon independen di Gowa yang harus mengumpulkan dukungan berupa salinan KTP elektronik.

Partai Gerindra awalnya tidak dimasukkan dalam struktur pengusung saat pendaftaran beberapa lalu di KPU Gowa, namun belakangan partai besutan Prabowo Subianto ini tetap dimasukkan dalam koalisi. Total pendukung Adnan-Rauf kini mencapai 10 partai.

"Sudah ditetapkan dalam berita aca-



Pasangan Adnan Purichta - A Rauf M Krio

ra untuk Kabupaten Gowa hanya diikuti satu pasangan calon yaitu Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Malaganni Kareng Kio,” ujar Ketua KPU Kabupaten Gowa Muchtar Muis, Selasa, 22 September 2020. Soal nomor urut, sambung Muchtar, sesuai regulasi hanya tata letak saja, apakah mau di kiri atau kanan.

Adnan Purichta Ichsan, petahana Bupati Kabupaten Gowa, adalah keponakan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dari perjalanan politiknya, Adnan pernah berada di Partai Demokrat, namun pindah ke Partai Golkar.

Nah, di Kabupaten Soppeng, Andi Kaswadi Razak semula merupakan Wakil Bupati Soppeng. Ia menduduki jabatan Bupati karena pendahulunya, Supriansa, terpilih menjadi Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

Pada Pilkada 2020, Kaswadi berduet dengan Lutfi Halide sebagai paslon tunggal di Soppeng. Tujuh partai nengusung pasangan ini, masing-masing PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, Demokrat. Dukungan tujuh partai

itu merupakan representasi 100 persen kursi di DPRD setempat.

Menanggapi fenomena dua paslon tunggal di Pilkada yang berlangsung di Sulsel, dosen politik Universitas Muhammadiyah Makassar Andi Luhur Prianto menyebut dua pasangan petahana di Sulawesi Selatan menunjukkan kelompok penantang di Soppeng dan Gowa gagal menumpulkan kekuatan melawan kelompok petahana. Kekuatan pun lebih banyak berkumpul di kubu petahana. “Malah penantang lebih memilih bergabung ke petahana,” ujar Luhur.

Menurut Luhur, pilihan calon yang terbatas jadi alasan bagi kelompok golongan putih untuk tidak hadir di tempat pemungutan suara (TPS). Jika kelak petahana di dua daerah jadi pasangan calon tunggal, mereka tidak otomatis meraih suara mayoritas pemilihan. Pertarungan yang sebenarnya masih tetap terjadi di bilik suara.

“Pasangan calon tunggal tetap tidak bisa langsung berpesta, seperti ‘pemenang yang mabuk’. Tetap wasp-

ada...kekuatan infrastruktur politik calon tunggal tidak boleh terlena dengan situasi ini,” ucap Luhur.

Bercermin pada Pilkada Makassar 2018, saat itu kekuatan pendukung kolom kosong terkonsolidasi sehingga bisa mengalahkan pasangan tunggal. Luhur menyebut secara internal, psikologis pemenang yang seolah ‘berada di atas angin’ bisa berbahaya, jika kekuatan pendukung kotak kosong semakin terkonsolidasi.

“Secara eksternal, pembagian dan distribusi tugas-tugas elektoral di koalisi partai besar, kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dominasi dan marginalisasi. Harus ada pembagian kerja proporsional di antara para pendukungnya,” katanya.

Yang dimaksud dengan pelajaran dari Pilkada Makassar 2018 menurut Luhur adalah kekalahan paslon tunggal melawan kotak kosong. Saat itu Pilkada Makassar berlangsung bersamaan dengan pilkada di sebelas daerah lain di Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2018, KPU menggelar



Pasangan Andi Kaswadi - Lutfi Halide

Pilkada Makassar namun berakhir tanpa pemenang. Calon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi gagal meraih suara mayoritas pemilih.

Pilkada untuk memilih Wali Kota Makassar pada 2018 hanya diikuti oleh satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota (calon tunggal), setelah pasangan calon petahana Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari didiskualifikasi oleh Mahkamah Agung.

Munafri Arifuddin, anggota Golkar, keponakan HM Jusuf Kalla, didukung oleh 10 partai. Sebagai CEO klub sepak bola PSM Makassar, ia juga berjanji akan tetap memimpin klub apabila terpilih. Sedangkan Pasangan Arifuddin, Rachmatika Dewi, adalah wakil ketua DPRD dan Ketua Partai Nasdem di Makassar.

Meski partai politik pendukungnya sedikit, Mohammad Ramdhan Po-

manto mendaftar ke KPU sebagai calon independen setelah mendapat 117.492 fotokopi KTP; syarat maju sebagai calon independen adalah mendapat sekitar 65.000 fotokopi KTP. Demokrat adalah satu-satunya partai di DPRD yang mendukungnya. Partai-partai lain sempat mendukung Pomanto, tetapi kemudian membatalkannya.

Pada Februari 2018, pasangan Munafri-Dewi menggugat KPU untuk membatalkan pencalonan Pomanto dengan alasan yang berstatus petahana membagi-bagikan telepon pintar saat menjabat sebagai Wali Kota. Selanjutnya, pada 21 Maret 2018, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sulawesi Selatan memerintahkan KPU membatalkan pencalonan Pomanto.

KPU kemudian membawa kasus ini ke Mahkamah Agung yang juga memperkuat keputusan PTTUN. Pomanto

menyatakan bahwa ia akan memperjuangkan kasusnya secara hukum. Namun, KPU memutuskan untuk mendiskualifikasi Pomanto dalam rapat tertutup sehingga pemilu ini diikuti oleh calon tunggal. Arifuddin masih perlu memenangkan mayoritas suara (pemilih bisa memilih kolom kosong) atau pemilu akan diulang tahun 2020.

Pada hasil resmi, Munafri-Tika meraih 264.245 suara, atau 46,77 persen dari total 565.040 suara sah. Sedangkan 300.795 orang atau 53,23 persen suara memilih kolom kosong. Pilkada pun dinyatakan tanpa pemenang dan diulang pada 2020.

Tim kampanye Munafri-Dewi sempat mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi dan mengklaim "ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif". Mereka menuduh Pomanto mencampuri pemilu dan menuntut kolom kosong dibatalkan. Namun, MK memutuskan menolak gugatan tersebut dan "memenangkan" kolom kosong untuk pertama kalinya dalam sejarah pilkada Indonesia.

Nah pengalaman Pilkada Makassar ternyata tak membuat petahana Bupati Soppeng Kaswadi gentar. Ia optimistik dapat memenangi Pilkada di kabupaten-nya.

Kaswadi yakin dan percaya diri dapat menang lawan kolom kosong. "Tidak menjadi masalah, kita tetap optimistik, meski syarat menang 50 persen plus satu suara. Jangan disamakan Soppeng dengan Makassar. Jelasnya kita optimislah," ujar Kaswadi.

Lebih dari optimistik, pasangan Adnan-Kio sudah menyampaikan enam program prioritas dalam tatap muka dan dialog dengan calon pemilih. Pada Minggu, 11 Oktober 2020 di Kecamatan Somba Opu, Gowa, misalnya, pasangan ini bertatap muka langsung dengan warga.

Salah satunya, pemberian beasiswa bagi putra putri Kabupaten Gowa yang akan kuliah di wilayah Sulawesi Selatan berbasis desa dan kelurahan. "Jadi kita akan biayai anak-anak kita yang tidak mampu secara ekonomi tapi memiliki kecerdasan yang baik untuk kuliah di perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan sebanyak satu orang satu desa dan kelurahan," tandasnya. ●

DAFTAR PILKADA SERENTAK 2020 DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar

Nomor urut 1. Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma) diusung Partai Nasdem dan Gerindra.

Nomor urut 2. Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando (Appi-Rahman) diusung Partai Demokrat, PPP, dan Perindo.

Nomor urut 3. Syamsu Rizal MI-Fadli Ananda (Dilan) diusung Partai PDIP, PKB, dan Hanura.

Nomor urut 4. Irman Yasin Limpo-Andi Muh Zunnun Armin Nurdin Halid (Imun) diusung Partai Golkar, PKS, dan PAN.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru

Nomor urut 1. Mudassir Hasri Gani-Aksah Kasim diusung Partai PKB dan PPP.

Nomor urut 2. Suardi Saleh-Aska M diusung Partai PDIP, Nasdem, PKS, dan Demokrat.

Nomor urut 3. Malkan Amin-A Salahuddin Rum diusung Partai Gerindra dan Golkar.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba

Nomor urut 1. Andi Hamza Pangki-Murniati diusung Partai Golkar, Hanura, dan Demokrat.

Nomor urut 2. Askar HL-Arum Spink diusung Partai Nasdem dan PPP.

Nomor urut 3. Tomy Satria Yulianto-Andi Makkasau diusung Partai PKB, PDIP, dan PBB.

Nomor urut 4. Muchtar Ali Yusuf-Edy Manaf diusung Partai PKS, PAN, Garuda, dan Berkarya.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur

Nomor urut 1. Muh Thorig Husler-Budiman diusung Partai Gerindra, PKB, PDIP, Golkar, PKS, PAN, Hanura, dan PBB.

Nomor urut 2. Irwan Bachri Syam-Andi Muh Rio Patiwi yang diusung Partai Nasdem dan Demokrat akan ditetapkan pada 3 Oktober 2020.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara

Nomor urut 1. Muh Thahar Rum-Rahmat Laguni diusung Partai PKB, Nasdem, dan Perindo.

Nomor urut 2. Indah Putri Indriani-Suaib Mansur diusung Partai PDIP, Golkar, PPP, PAN, dan Demokrat.

Nomor urut 3. Arsyad Kasmar-Andi Sukma yang diusung Partai Gerindra, PKS, dan Hanura akan ditetapkan pada 3 Oktober 2020.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros

Nomor urut 1. Andi Tajerimin Nur-Havid S Fasha diusung Par-

tai PKB, Gerindra, Golkar, dan Demokrat.

Nomor urut 2. Chaidir Syam-Suhartina Bohari diusung Partai PPP, PAN, Hanura, dan PBB.

Nomor urut 3. Andi Harmil Mattorang-Andi Ilham Nadjamuddin diusung Partai Nasdem dan PKS.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan

Nomor urut 1. Muhammad Yusran Lalogau-Syahban Sammana diusung Partai Nasdem.

Nomor urut 2. Abd Rahman Assagaf-Muammar Muhayang diusung Partai PKB, PDI-P, PPP, dan Demokrat.

Nomor urut 3. Andi Ilham-Rismayani diusung Partai Golkar, PAN, dan Partai Berkarya.

Nomor urut 4. Andi Nirawati-Lutfi Hanafi diusung Partai Gerindra, PKS, dan Hanura.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar

Nomor urut 1. Zainuddin-Aji Sumarno diusung Partai PKB, PKS, dan Demokrat.

Nomor urut 2. Muh Basli Ali-Saiful Arif diusung Partai Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, dan PAN.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja

Nomor urut 1. Theofilus Allorerung-Zadrak Tombeg diusung Partai Gerindra, Demokrat, dan PKPI.

Nomor urut 2. Nicodemus Biringkanoe-Victor Datuan Batara diusung Partai Golkar, Nasdem, dan Perindo.

Nomor urut 3. Albertus Patarru-John Diplomasi diusung Partai PDIP, Hanura, dan Berkarya.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara

Nomor urut 1. Yosia Rinto Kadang-Yonathan Pasodung diusung Partai Nasdem dan Hanura.

Nomor urut 2. Yohanis Bassang-Frederik V Palimbong diusung Partai Golkar dan Demokrat.

Nomor urut 3. Kalatiku Paembonan-Etha Rimba P Tandi Payung diusung Partai Gerindra, PDIP, Perindo, dan PKPI.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng

Andi Kaswadi Razak-Lutfi Halide diusung Partai PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, dan Demokrat.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa

Paslon Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Malaganni diusung Partai PDIP, PKB, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, Demokrat, dan Perindo. ●

KOTAK KOSONG RAMAI DI BALIKPAPAN, SEPI DI KUTAI KARTANEGARA

Pilkada serentak 2020 di Kalimantan Timur yang berlangsung di sembilan dari 10 kota dan kabupaten provinsi ini, Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi wilayah yang menyelenggarakan pemilihan dengan pasangan calon tunggal. Yang mungkin menarik, reaksi di Balikpapan dan Kukar tampak berbeda.

Di Kota Balikpapan, pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Rahmad Masud-Thohari Azis menjadi paslon tunggal menghadapi kosong pada pemilu 9 Desember nanti. Sedangkan di Kukar pasangan Edi Damansyah-Rendi Solihin juga diperkirakan akan berkontestasi dengan kotak atau kolom kosong.

Kedua pasangan berasal dari partai politik yang sama. Partai Golkar. Rahmad, bakal calon wali kota diketahui sebagai Ketua Golkar Balikpapan dan petahana Wakil Wali Kota Balikpapan. Sementara Rendi, bakal calon wakil bupati adalah ketua Fraksi Golkar dan anggota DPRD Kukar.

Namun, di Kota Balikpapan, sejak pertengahan September 2020, tampak beberapa titik terpasang spanduk mengajak warganya memilih kotak kosong. Kampanye serupa tidak begitu terasa di Kabupaten Kukar.

Pengamat politik Universitas Mula-warman (Unmul) Samarinda Lutfi Wahyudi mengakui adanya perbedaan intensitas suhu politik melawan kotak



Kota Samarinda

kosong di kedua wilayah tersebut. Menurutnya dia, kampanye kotak kosong cukup intens di Kota Balikpapan, sedangkan di Kukar kurang bergema.

Di mata Lutfi, beberapa faktor tampak mempengaruhi perbedaan itu. Antara lain, pertama soal akses warga terhadap informasi di kedua kabupaten dan kota itu. Sementara di Kota Balikpapan sangat mudah mengakses informasi seputar kotak kosong, warga Kukar menyebar luas hingga pelosok.

Harap maklum, luas Kota Balikpapan sekitar 500 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar setengah juta jiwa

open minded. Bahkan faktor media sosial lebih berefek ketimbang di Kukar. Gaungnya lebih cepat ketimbang di Kukar,” ucapnya.

Toh, sambungnya, suhu politik di Kukar tetap berpotensi meningkat dengan kampanye kotak kosong jika ada tokoh yang bersifat sebagai patron dalam mengajak para klien politiknya, yaitu masyarakat, dalam memilih kotak kosong. Harap maklum, Kukar masih memiliki Keraton Kesultanan Kutai dengan kalangan bangsawannya yang berpengaruh di tengah masyarakat.

“Di Kukar itu masih berlaku panutan,

gian mereka menilai pilihan kotak atau kolom kosong pada Pilkada mendatang sebagai sesuatu yang wajar dan yang terpenting adalah pilihan tersebut termasuk hak politik tiap warga negara. Suriansyah, Ketua Umum Gerakan Putra Asli Kalimantan (GEPAK) Kuning Kaltim, misalnya, berpendapat agar semua pihak dapat menghargai tiap pilihan politik dalam proses pemilihan sebagai bentuk menghargai demokrasi.

Secara pribadi, Suriansyah mengaku ikut mengkampanyekan kotak kosong sebagai pilihan politik, sebab diakui



Edi Darmansyah-Rendi Solihin

dibandingkan dengan Kabupaten Kukar yang tercatat lebih dari 27.263 km persegi dengan populasi penduduk belum mencapai 700 ribu jiwa sehingga sebaran penduduk hingga pedalaman juga membuat kampanye kotak kosong akan lebih sulit diakses..

Selain itu faktor masyarakat yang heterogen di Balikpapan, menurut Lutfi Wahyudi membuat masyarakat lebih open-minded ketimbang Kukar. “Di Balikpapan tren kotak kosong baru juga tetapi masyarakat lebih terbuka,

Ada tokoh yang berperan sebagai patron dalam perilaku politik. Jika sang tokoh mampu menggerakkan dan berpihak kepada kotak kosong, tidak menutup kemungkinan justru ini menimbulkan sikap politik yang tidak diduga banyak orang. Misalnya satu orang tokoh dan sanggup berperan sebagai patron dalam hal perilaku politik maka dia akan membawa pengikut berupa klien politik,” kata Lutfi.

Beberapa tokoh masyarakat di Kota Balikpapan ikut angkat bicara. Seba-

dan dilindungi oleh konstitusi. “Semua ada aturannya dalam konstitusi dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hargailah demokrasi yang sama-sama kita junjung tinggi di Negeri ini”, katanya, Jumat, 18 September 2020.

Sedangkan praktisi hukum Kota Balikpapan, Abdul Rais menyatakan kampanye atau sosialisasi kotak kosong merupakan upaya bersama mengajak warga yang memiliki hak pilih untuk terlibat dalam proses pemilihan, tak terkecuali memilih kotak kosong. “Nah,



Pasangan Rahmad Mas'ud-Thohari Aziz

yang disosialisasikan ini kan haknya orang untuk memilih. Karena undang-undang dan peraturan juga menyatakan demikian”, kata advokat yang juga Ketua GNPF MUI Balikpapan itu.

Menurut Rais, patut dipertanyakan secara logis dan hukum apabila ada anggapan miring mengenai kampanye kotak kosong. “Kok bisanya ada

anggapan seperti itu?. Kecuali kotak kosong itu tidak diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan, baru boleh beranggapan seperti itu. Ini jelas dan terang benderang diatur,” lanjutnya.

Nah, begitulah yang dilakukan oleh KPU Kukar menggelar sosialisasi ke masyarakat mengenai pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19

saat ini termasuk paslon tunggal yang melawan kotak kosong. Misalnya acara sosialisasi Pilkada Serentak 2020 kepada mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Tenggarong, Sabtu, 10 Oktober 2020.

“Secara regulasi dan tahapan, semua sudah maksimal. Meskipun akhirnya hanya satu pasangan calon mendaftar. Sampai akhirnya habis masa pendaftaran, ya tetap satu pasang calon itu saja,” kata Ketua KPU Kukar Erlyando Saputra yang akrab disapa Nando.

Kendati hanya calon tunggal, dalam surat suara juga ada opsi atau pilihan lain bagi masyarakat, ketika menyampaikan hak pilihnya. Sebab di kertas suara, tersedia kolom kosong di samping gambar atau foto pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Kukar 2020.

“Sesuai tahapan, pengundian posisi atau tata letak pasangan peserta Pilkada Kukar, yakni Edi Damansyah-Rendi Solihin selaku calon bupati dan wakil bupati, berada di sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan adalah kolom kosong. Artinya warga selaku pemilih bisa mencoblos ke pasangan calon,



Wagub Hadi Mulyadi

boleh pula ke kolom kosong. Demikian peraturannya,” urai Nando.

Selama sosialisasi digelar, para mahasiswa antusias menyimak. Bahkan mereka juga melontarkan sejumlah pertanyaan. Seperti tentang bagaimana regulasi terkait jumlah suara harus diraih calon tunggal, sebesar 50 persen plus 1, untuk bisa jadi pemenang melawan kolom kosong.

“Artinya begini, pemenang harus bisa meraih suara sebesar 50 persen plus 1 atau lebih, dari jumlah pemilih yang memberikan suara ke TPS. Jadi bukan dihitung 50 persen lebih dari jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap),” tandasnya.

Terlepas dari kontroversi kampanye kotak kosong, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyatakan, yang lebih penting adalah partisipasi pemilih dalam Pilkada, terlebih berlangsung di masa wabah Covid-19.

Hadi menyerahkan pilihan kepada warga untuk memilih mana yang dianggap terbaik. “Saya kira itu bagian dari demokrasi yang kita hormati dan kita silahkan masyarakat memilih yang mana,” ucap Hadi Mulyadi.

Soal partisipasi, fenomena kotak kosong menurut Pak Wagub tidak akan terlalu mempengaruhi jumlah partisipan pemilih saat pencoblosan tanggal 9 Desember mendatang. Dari Pileg pada 2020 lalu misalnya, kata Hadi, partisipan pemilu di Kalimantan Timur sebesar 67 persen alias di bawah rata-rata nasional yang tercatat di atas 80 persen pemilih mencoblos di tempat pemungutan suara.

Jadi, Pak Wagub Hadi mengimbau kepada masyarakat Kaltim untuk tetap menggunakan hak pilihnya saat pencoblosan tanggal 9 Desember mendatang. Sehingga diharapkan proses demokrasi di Kaltim semakin meningkat dalam pilkada 2020 kali ini. “Saya imbau kepada masyarakat Kaltim baik yang calon tunggal tidak ada calon tunggal gunakan hak pilih secara baik dan ikut berpartisipasi dalam Pilkada,” pungkash Hadi Mulyadi.

Perbedaan, dan juga persamaan, antara Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan di Kalimantan Timur masih harus menunggu hasilnya. Kita lihat pada saatnya. ●

DAFTAR PILKADA 2020 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kota Samarinda

1. Andi Harun -Rusmadi, partai pengusung: Gerindra, PDIP, PKS, PKB, PPP, NasDem, Hanura.
2. Zairin Zain- Sarwono, jalur Perseorangan Jumlah Dukungan : 51.600 suara.
3. Muhammad Barkati- Muhammad Darlis, pengusung Golkar, Demokrat, PAN

Kota Balikpapan:

Rahmad Mas’ud -Thohari Aziz, partai pengusung: PKB, Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Perindo,, PPP, PKS, Demokrat

Kabupaten Kutai Kartanegara

Edi Damansyah -Rendi Solihin, partai pengusung: Partai Golkar, PDIP, Gerindra, PAN, PKS, Nasdem, PPP, Hanura dan Perindo, PKB.

Kabupaten Kubar

1. FX Yapan- Edyanto arkan, partai pengusung: Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Nasdem, PKS, Perindo, PAN, Hanura, Demokrat,
2. Martinus Herman Kenton- Abdul Azis dari Perseorangan, dengan jumlah dukungan 12.950 suara.

Kabupaten Mahakam Ulu :

1. Bonifasius Belawan- Yohanes Avun, Partai Pengusul: Gerindra, Golkar, Demokrat dan PKB
2. Y. Juan Jenau- Indra Jaya,Partai Pengusul: PDIP

Kota Bontang:

1. Neni Moerniaeni -Joni partai pengusung : Golkar, NasDem, PKS, Gerindra, PAN, PPP, Hanura, Beringin Karya
2. Adi Darma- Basri Rase, Parpol Pengusul : PKB dan PDI Perjuangan

Kabupaten Kutai Timur:

1. Mahyunadi- Lulu Kinsu, partai pengusung: Golkar, Nasdem, PDIP, Gerindra, PAN, PKB
2. Ardiansyah Sulaiman -Kasmidi Bulang, partai pengusung: PKS, Demokrat, Berkarya
3. Awang Ferdian Hidayat- Uce Prasetyo partai pengusung: PPP

Kabupaten Berau:

1. Hj. Seri Marawiah- Agus Tantomo, Partai Pengusul: Partai Golkar, Partai NasDem, PDIP, Partai Hanura
2. Muharram- Gamalis, menunggu calon pengganti karena salah satu calon dinyatakan berhalangan tetap atau meninggal dunia

Kabupaten Paser:

1. Fahmi Fadli-Syarifah Masitah ASS, partai pengusung: PKB dan Golkar Jumlah Kursi : 11 Kursi
2. Tony Budi Hartono -Aji Sayid Fathur Rahman Pemilihan Perseorangan
3. Sulaiman Eva Merukh- Ikhwani Wirawan, partai pengusung: PDIP, PBB, PAN dan PPP
4. Alphas Syarif -Arbain M. Noor partai pengusung: Demokrat, Nasdem, Gerindra, Berkarya, PKS.



JAWA TENGAH CATAT REKOR PASLON TUNGGAL TERBANYAK

Jawa Tengah menjadi provinsi terbanyak yang memiliki paslon melawan kotak kosong pada Pilkada serentak 2020. Di mana sajakah?

Sementara provinsi lain mencatat hanya 1-2 kabupaten dan kota saja yang memiliki paslon tunggal dalam Pilkada 2020, Jawa Tengah memiliki lima kabupaten dan satu kota seperti itu. Kota Semarang, ibu kota provinsi salah satunya beserta kabupaten-kabupaten Boyolali, Grobogan, Kebumen, Sragen, dan Wonosobo.

Dari enam kabupaten dan kota, hanya Wonosobo saja yang bukan petahana yang lainnya tergolong petahana. "Ke enam kandidat merupakan calon tunggal karena hingga masa perpanjangan pendaftaran ditutup, tidak ada lagi pa-

sangan calon yang mendaftar di KPU," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat, Rabu, 23 September 2020.

Penetapan satu pasangan calon dilakukan setelah KPU Jateng melangsungkan rapat pleno tertutup. Mengingat hanya ada satu pasangan calon, maka untuk tahapan selanjutnya KPU akan berpedoman pada PKPU 13/2018 tentang pilkada dengan satu paslon.

Lebih lanjut Yulianto menjelaskan, pilkada dengan calon tunggal tersebut telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 54 C serta diperjelas dalam

PKPU Nomor 13 Tahun 2018. "Sesuai ketentuan tersebut warga atau pemilih berhak untuk memilih paslon tunggal tersebut atau memilih kolom kosong," jelasnya.

Kedua pilihan tersebut dinyatakan sah dan akan dihitung sebagai suara rakyat. Jika paslon meraih lebih dari 50 persen suara sah maka berhak ditetapkan sebagai pemenang pemilihan.

"Jika suaranya kurang dari 50 persen suara sah, maka dinyatakan tidak terpilih. Dan selanjutnya, posisi bupati akan dijabat oleh pejabat sementara hingga periode pemilihan selanjutnya," tambah Yulianto.



Menurut dia, Pilkada dengan satu pasangan calon atau calon tunggal ini, tetap mengakomodir pilihan rakyat sebagai pemenangnya. Jika mayoritas atau lebih dari 50 persen memilih kotak kosong, maka calon tunggal tersebut dinyatakan kalah," tandasnya.

Salah satu kabupaten dengan paslon tunggal, Kebumen, juga menandai terjadinya pecah kongsi antara petahana bupati dan wakilnya. Pasangan Arif Sugiyanto (petahana Wakil Bupati Kebumen) dan Ristawati Purwaningsih akhirnya menjadi paslon tunggal yang melawan kotak kosong.

Pasangan Arif-Ristawati menyapu bersih dukungan dari partai partai besar, merupakan gabungan 9 partai politik yaitu, PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN dan Demokrat dengan total dukungan kursi di DPRD sebanyak 50 kursi. Dengan begitu, Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz yang sebelumnya mengincar PPP dan Demokrat gagal maju mempertahankan jabatannya.

"Kita sudah memperpanjang pendaftaran pasangan calon, namun

sampai batas waktu yang ditentukan tetap hanya ada satu pasangan yang mendaftar yaitu pasangan Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih," kata Yulianto.

Di Kota Semarang, pecah kongsi tak terjadi meskipun hanya ada paslon tunggal untuk jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang periode 2020-2025. Kali ini pasangan petahana Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu (Hendi-lta) akan memper-

tahankan jabatannya bersaing dengan kotak kosong dalam Pilkada.

Semua partai yang memiliki kursi di DPRD Kota Semarang mengusung pasangan ini. Sembilan partai pendukung itu, yakni PDIP, Gerindra, Partai Demokrat, PKB, PAN, NasDem, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Golkar, dan PKS. Ditambah lagi, lima partai pendukung, yakni PKPI, Partai Hanura, Partai Berkarya, PBB, Partai Gelora, dan PPP.



Di Boyolali, Bupati petahana Seno Samodro sudah dua kali menjabat sehingga tak akan maju lagi dalam Pilkada 2020. Wakil Bupati M Said Hidayat menjadi petahana sebagai

calon bupati. Said berpasangan dengan Wahyu Irawan. Sebagai catatan, Wahyu Irawan adalah seorang pengusaha dan mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum

(PUDAM) Tirta Ampera Boyolali.

M Said Hidayat-Wahyu Irawan diusung oleh PDIP yang bermodal 35 kursi di DPRD Boyolali. Kemudian Partai Golkar (4 kursi), PKB (2 kursi), Gerindra (1 kursi), dan ditambah dua parpol di luar legislatif, NasDem dan PPP. Hanya satu partai yang tidak mendukung jago PDIP itu, yakni PKS yang memiliki 3 kursi.

Sedangkan di Grobogan, semua partai yang ada di kabupaten terluas kedua se-Jawa Tengah setelah Cilacap ini mengusung bupati petahana dan Ketua DPC PDI Perjuangan Grobogan Sri Sumarni berpasangan dengan mantan Direktur RSUD R Soedjati Purwodadi Bambang Pujiyanto. Sebagai catatan, Purwodadi adalah ibu kota kabupaten ini.

Sejak awal deklarasi pada Minggu, 23 Agustus 2020, pasangan Sri Sumarni-Bambang Pujiyanto sudah mendapat dukungan PDIP dan 11 partai lain pengusung lainnya. Selain PDIP Perjuangan ada 11 partai lainnya yang mengusung Sri-Bambang adalah Gerindra, PPP, Partai Golkar, PKB, PAN, Hanura, Partai Demokrat, Nasdem, PKS, Partai Berkarya, dan Perindo. Deklarasinya pun dihadiri oleh seluruh perwakilan partai politik pengusung.

Tim Pemenangan Sri-Bambang, dipercayakan kepada Sekretaris DPC PDIP Perjuangan Grobogan Agus Siswanto. Menurut Agus, sebagai calon tunggal dalam Pilkada 2020, Sri-Bambang akan berhadapan dengan kotak kosong. Hal ini tentu menjadi tantangan tim pemenangan dan partai politik pengusung.

"Kota kosong itu bisa seperti Covid-19, tidak terlihat tapi membahayakan. Oleh karena itu semua partai politik pengusung harus mampu menggerakkan masyarakat untuk datang ke TPS pada 9 Desember," tegas Agus Siswanto.

Sri Sumarni sendiri bersikap realistis dengan mengatakan, sebagai bupati petahana tidak akan janji muluk-muluk namun akan berusaha kerja nyata. Namun, ada beberapa hal yang menjadi fokus agendanya apabila terpilih kembali menjadi Bupati Grobogan untuk periode 2021-2024.

"Saya dan Pak Bambang Pujiyanto jika diberi amanah menjadi Bupati dan



Wakil Bupati akan mengerahkan kekuatan dan pikiran kami untuk melanjutkan pembangunan di Grobogan. Terutama menyelesaikan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Sri Sumarni.

Nah, bagaimana dengan Kabupaten Sragen yang juga hanya memiliki paslon tunggal dalam Pilkada 2020? Sebenarnya pasangan petahana bupati petahana Kusdinar Untung Yuni Sukowati -Suroto sempat berpeluang mendapatkan lawan. Masih ada dua partai yakni Partai Gerindra (lima kursi) dan PKS (enam kursi) yang belum mendaftarkan calonnya.

Gerindra sempat menurunkan rekomendasi kepada pasangan Sukiman-Iriyanto, Kamis, 3 Maret 2020, dengan syarat keduanya mampu meyakinkan PKS untuk berkoalisi. Namun hingga akhir masa perpanjangan pendaftaran, koalisi kedua partai tersebut gagal terjalin.

Alhasil pasangan Yuni-Suroto menjadi calon tunggal Pilkada Sragen 2020. Pasangan ini diusung gabungan partai Koalisi Gotong Royong yakni PDI Perjuangan, PKB, Golkar, PAN, Demokrat, Nasdem.

Sedangkan di Wonosobo, petahana Bupati Eko Purnomo gagal maju mempertahankan jabatannya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonosobo telah menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Afif Nurhidayat dan M Albar sebagai calon tunggal di Pilkada Serentak 2020.

Ketua KPU Kabupaten Wonosobo, Asma' Khozin menyebut, keputusan tersebut telah ditetapkan dalam rapat pleno yang dilakukan KPU secara tertutup di kantot KPU setempat, Rabu, 23 September 2020. Afif-Albar didukung tujuh partai yaitu PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, Nasdem, Hanura, Golkar, PAN dengan 35 kursi di legislatif melenggang menjadi calon tunggal setelah sebelumnya tiga partai yang tersisa yaitu Gerindra, PPP, dan Perindo dengan 9 kursi tidak menemui satu kesepakatan bersama untuk mengusung paslon.

Ini juga menjadi sejarah baru bagi Wonosobo sejak Pilkada langsung pertama pada 2005. Namun bagaimana hasil Pilkada di Jateng, kita tunggu hasilnya pasca 9 Desember 2020. ♦

Daftar Pilkada 2020 di Jawa Tengah

KABUPATEN PEKALONGAN

1. Asip Kholbihi-Sumarwati
2. Fadia Arafiq-Riswadi

KABUPATEN KLATEN

1. Sri Mulyani-Yoga Hardaya
2. One Krisnata-Muhammad Fajri
3. Arif Budiyo-Harjanta

KABUPATEN PEMALANG

1. M. Agus Sukoco-Eko Priyono
2. Mukti Agung Wibowo-Mansur Hidayat
3. Iskandar Ali Syahbana-Akhmad Aguswardana

KABUPATEN BLORA

1. Dwi Astutiningsih-Riza Yuda Prasetya
2. Arief Rohman-Tri Yuli Setyowati
3. Umi Kulsum-Agus Sugiyanto

KABUPATEN REMBANG

1. Harno-Bayu Andriyanto
2. Abdul Hafidz-Mochamad Hanies Cholil Barro'

KABUPATEN PURWOREJO

1. Agustinus Susanto-Kelik Rahman Kabuli Jarwinto
2. Kuswanto-Kusnomo
3. Agus Bastian-Yuli Hastuti

KABUPATEN WONOGIRI

1. Hartanto-Joko Purnomo
2. Joko Sutopo-Setyo Sukarno

KOTA SURAKARTA

1. Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa
2. Bagyo Wahyono-Suparjo Fransiskus Xaverius

KABUPATEN KENDAL

1. Dico M Ganinduto-Windu Suko Basuki
2. Ali Nurudin-Yekti Handayani
3. Tino Indra Wardono-Mukh Mustamsikin

KOTA MAGELANG

1. Muchamad Nur Aziz-M Mansyur
2. Aji Setiawan-Windarti Agustina

KOTA PEKALONGAN

1. Achmad Afzan Arslan Djunaid-Salahudin
2. Balgis Diab-Moch Machrus

KABUPATEN DEMAK

1. Eisti'Anah-Ali Makhsun
2. Mugiyono-Muhammad Badruddin

KABUPATEN SEMARANG

1. Bintang Narsasi-Gunawan Wibisono
2. Ngesti Nugraha-Basari

KABUPATEN PURBALINGGA

1. Muhammad Sulhan-Zaini Makarim Supriyatno
2. Dyah Hayuning Pratiwi-Sudono

KABUPATEN SUKOHARJO

1. Etik Suryani-Agus Santosa
2. Joko Santosa-Wiwaha Aji Santosa

KABUPATEN WONOSOBO

Afif Nurhidayat-Muhammad Albar

KABUPATEN GROBOGAN

Sri Sumarni-Bambang Pujiyanto

KABUPATEN SRAGEN

Kusdinar Untung Yuni Sukowati-Suroto

KABUPATEN KEBUMEN

Arif Sugiyanto-Ristawati Purwaningsih

KOTA SEMARANG

Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu

KABUPATEN BOYOLALI

Mohammad Said Hidayat-Wahyu Irawan.

WHAT'S UP MIKE?

Memang hanya sehari. Tapi, kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Indonesia ada hubungannya dengan menahan pengaruh Tiongkok.



Di mata Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kunjungan Melu AS Mike Pompeo di tengah pandemi ini memiliki arti penting kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika. Presiden Jokowi menerima kunjungan kehormatan Menlu Pompeo, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 29 Oktober 2020.

Menlu Pompeo berkunjung ke Indonesia sebagai bagian dari perjalanan ke Asia yang juga mencakup India, Sri Lanka, dan Maladewa. Kabar rencana kunjungan itu mulai menyebar sehari setelah Duta Besar AS untuk Indonesia yang baru dilantik Sung Kim menyerahkan surat kepercayaannya kepada Presiden Jokowi di Istana Negara pada Rabu, 21 Oktober 2020.

Dalam pertemuan di Istana Bogor Jokowi menyambut baik kunjungan Mike Pompeo untuk yang kedua kalinya ke Indonesia. "Selamat datang di Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda untuk kedua kalinya di Indonesia," ujar Presiden Jokowi mengawali pertemuan.

Presiden Jokowi memandang kunjungan Mike Pompeo di tengah pandemi ini memiliki arti penting kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika. "Selama pandemi ini saling kunjung antara pejabat kita cukup intensif, bahkan dapat saya sampaikan paling intensif," ungkapnya.

Kemungkinan besar, sambutan Presiden terkait dengan kujun-



gan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto ke Amerika Serikat. Sebelumnya, Under Secretary of Defense for Policy AS, James H. Anderson, juga berkunjung ke Indonesia.

Terkait dengan itu, Kedutaan Besar AS di Jakarta menegaskan kunjungan Menlu Pompeo terkait dengan hubungan bilateral kedua negara. "Menlu Pompeo berkunjung ke Jakarta untuk menyampaikan sambutan dan bertemu dengan rekannya dari Indonesia untuk menegaskan visi kedua negara tentang Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," menurut pernyataan resmi Kedubes AS di Jakarta.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan mengatakan, Presiden menyampaikan komitmen kemitraan dan pertemanan yang baik. Presiden Jokowi juga menginginkan Amerika Serikat sebagai *true friend of Indonesia*.

Harapan itu, lanjut Menlu Retno, tentunya tidak bisa didapatkan dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan dan dipelihara. "Sehingga Presiden mengatakan bahwa untuk memelihara kemitraan ini diperlukan

upaya yang serius, diperlukan pemahaman satu sama lain, dan diperlukan juga upaya untuk mewujudkan kerja sama yang konkret, termasuk di antaranya adalah kerja sama ekonomi," jelas Menlu Retno.

Menurut Menlu Retno, Presiden menekankan bahwa Indonesia ingin melihat kerja sama ekonomi kedua negara meningkat di masa yang akan datang, termasuk tentunya harapan terhadap perpanjangan fasilitas Generalized System Preference (GSP) kepada Indonesia.

Di samping itu, Presiden juga menginginkan agar kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat meningkat. Presiden juga ingin melihat Amerika memahami kepentingan negara berkembang dan menekankan ingin Amerika memahami kepentingan negara-negara muslim.

"Presiden juga mengatakan bahwa Indonesia ingin bahwa Amerika juga memahami Asia Tenggara dan bersama dengan negara-negara Asia Tenggara mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan kerja sama di kawasan," ungkap Menlu Retno.

Sementara itu, Mike Pompeo men-

gungkapkan bahwa dirinya senang bisa berkunjung kembali ke Indonesia dan menyampaikan komitmen kuatnya untuk melanjutkan kemitraan strategis dengan Indonesia, termasuk di bidang ekonomi. Pompeo juga menyebutkan, Amerika akan mendorong lebih banyak pengusaha Amerika untuk melakukan *economic engagement* dengan Indonesia.

Di Kawasan, Indonesia dinilai oleh Amerika Serikat memainkan peran yang khusus, yakni sebagai "jangkar" ASEAN. Dengan peran besar Indonesia tersebut, maka Amerika betul-betul ingin menjalin hubungan yang lebih baik dengan Indonesia, termasuk dalam bidang ekonomi dan kerja sama di bidang pertahanan.

"Oleh sebab itu, Mike Pompeo juga mengatakan bahwa ingin tidak saja menjalin hubungan baik pada tingkat pemerintah, tetapi juga menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan grass root, dengan stakeholders di Indonesia," jelas Menlu Retno.

Terakhir, Mike Pompeo menyampaikan penghargaan terhadap peran Indonesia untuk isu Afghanistan. Seperti diketahui, Indonesia dengan

Amerika dan beberapa negara lainnya terus bekerja sama dari awal, mencoba berkontribusi untuk menghadirkan perdamaian di Afghanistan.

Toh di mata pengamat hubungan luar negeri Mike Valecncia yang dikutip Asia Times, kunjungan Menlu AS itu mengagendakan pembahasan bagaimana Indonesia dan AS dapat bekerja sama menuju "Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka", konsep AS untuk menahan "ancaman Tiongkok".

Menurut Valencia, AS telah mende-sak banyak negara Asia Tenggara untuk bergabung dalam upayanya menahan Tiongkok secara politik dan militer. Indonesia, negara besar di Per-

kebijakan non-blok Jakarta dan keinginnannya untuk tetap netral dalam perjuangan AS-Tiongkok untuk dominasi regional. Tapi AS sangat gigih.

Indonesia juga telah mengatakan "tidak" kepada Tiongkok. Pada Desember 2019, ketika 63 kapal nelayan Tiongkok disertai tiga kapal Penjaga Pantai memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang diklaim Indonesia di lepas Natuna, Jakarta melakukan protes keras dan bahkan mengirim kapal perang dan jet tempur ke daerah tersebut.

Jakarta juga telah menolak klaim Tiongkok atas hak-hak tertentu di ZEE Indonesia, serta tawaran Beijing untuk membahas masalah tersebut, dengan

dia, AS mencabut pelarangan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto ke AS dengan mengundangnya ke Washington untuk membahas kerja sama pertahanan.

Sedangkan negara-negara kawasan ASEAN lainnya sudah terang-terangan mendukung AS dalam berhadapan dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Misalnya, kata Valencia, ribuan misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian (ISR) setiap tahun di Laut Cina Selatan dan di sepanjang pantai Tiongkok sebagian terbang dari negara ASEAN. Misi ini meningkat tajam tahun ini, dari 36 pada Mei, 49 pada Juni, dan 67 pada Juli 2020.

Beberapa terbang dari Filipina dan



Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo.

himpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dapat menunjukkan jalan bagi anggota ASEAN lainnya dengan "berani mengatakan tidak" untuk permintaan dari AS dan Tiongkok yang dinilai bertentangan dengan kepentingannya.

Indonesia, misalnya, baru-baru ini menolak permintaan AS untuk mengisi bahan bakar dan melayani pesawat pengumpul intelijen Amerika yang menargetkan Tiongkok. Ini sesuai dengan

mengatakan tidak ada yang perlu dibahas karena klaim Tiongkok tidak valid.

Tekanan terbaru dari AS datang dalam konteks beberapa pernyataan anti-Tiongkok terkait Laut Tiongkok Selatan oleh Pompeo. Intinya, dia sepertinya mengatakan, "Anda bersama kami atau melawan kami."

Valencia menyebutkan, sekarang AS bersandar pada Indonesia untuk bergabung dengan kelompok anti-China di kawasan ASEAN. Indikasinya, kata

Singapura. Malaysia juga telah menawarkan akses untuk mengisi bahan bakar pesawat mata-mata AS di Labuan. Terlepas dari penolakannya, negara-negara ini jelas-jelas sejalan di mata Tiongkok dan karenanya merupakan target potensial dalam konflik militer AS-Tiongkok. Masih kata Valencia, AS juga mempertimbangkan akan memasok Vietnam dengan pesawat ISR yang kemungkinan akan digunakan Hanoi untuk memantau aktivitas



Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menemui Gerakan Pemuda Ansor organisasi sayap Nahdlatul Ulama.

MIKE POMPEO INGATKAN BAHAYA TIONGKOK DI GP ANSOR

Dalam agenda resminya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menemui Gerakan Pemuda Ansor organisasi sayap Nahdlatul Ulama selama kunjungan ke Indonesia untuk membahas kebebasan beragama sebagai bagian dari rencana Negeri Paman Sam itu memicu percakapan lintas negara tentang prinsip-prinsip umum kemanusiaan.

Toh tak terelakkan bahwa Pompeo mengemukakan kepentingan AS untuk menahan pengaruh Tiongkok di kawasan ASEAN. Secara terang-terangan ia menyebut Partai Komunis Tiongkok sebagai salah satu ancaman terbesar bagi kebebasan beragama di masa depan.

"Tapi fakta ancaman paling besar terhadap kebebasan beragama adalah tekanan Partai Komunis Tiongkok terhadap semua orang dari kelompok agama," kata Pompeo di forum yang digelar oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Kamis, 29 Oktober 2020.

Pompeo menilai Partai Komunis Tiongkok yang berlandaskan ateisme telah menekan semua golongan masyarakat dari agama apapun selama ini. Baik Islam, Kristen, Budha dan

agama lainnya.

Ia mencontohkan Partai Komunis Tiongkok ingin meyakinkan kepada dunia bahwa tindakan brutal yang selama ini dilakukan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang merupakan langkah anti-terorisme dan pengentasan kemiskinan. "Tapi kita semua tahu, bahwa tidak ada penanggulangan terorisme yang membenarkan dan memaksa Muslim di Uighur yang memakan babi selama bulan Ramadan," kata dia.

Pompeo juga menilai Partai Komunis Tiongkok telah mengambil banyak anak-anak Muslim Uighur dari orang tuanya selama ini. Menurut dia, hal itu bukan termasuk dalam program pengentasan kemiskinan.

Menlu AS ini juga mengatakan banyak pejabat Partai Komunis Tiongkok yang mencoba meyakinkan Indonesia untuk berpaling dari kejadian brutal tersebut. Menurut dia, pejabat-pejabat Partai Komunis Tiongkok banyak membelokkan narasi dengan memperlihatkan kehidupan di Uighur menjadi lebih modern dan sejahtera.

"Lihat ke dalam hati anda, lihat fakta, dengarkan kisah para penyintas dan keluarga mereka," tandasnya. •



► Tonggak Baru Energi Surya

NEGARA TETANGGA TEMPATNYA

Pernahkah terbayangkan 100 persen pasokan energi listrik wilayah seluas hampir sejuta kilometer persegi berasal dari energi surya?

Untuk memasok keperluan 1,7 juta warganya pula. Sudah terjadi malah, meski hanya satu jam saja.

Lebh dari sekadar memanfaatkan energi surya, pasokan energi itu sebagian besar berasal dari panel energi surya yang bertengger di atap rumah. Demikianlah, tonggak baru energi terbarukan itu tercatat di negara bagian Australia Selatan, Australia. pada Minggu, 11 Oktober, selama satu jam antara pukul 12 hingga 13 tengah hari waktu setempat.

Momentum ini menjadi rekor pertama untuk kawasan administrasi seluas negara bagian. Operator Pasar Energi Australia, Australian Energy Market Operator (AEMO), mengkonfirmasi sekitar 77 persen daya elektrik berasal dari pasokan sistem panel surya di atap rumah warga.

Tenaga surya populer di Australia Selatan, saat langit terang berlimpah

sinar surya yang cukup cerah. Jadi tidak heran jika satu dari tiga rumah di negara bagian ini menggunakan panel surya di atapnya. Baru pada 2020 sebenarnya, sekitar 2.500 rumah telah dilengkapi dengan panel surya pribadi mereka.

Secara total, sekitar 228.000 sistem atap di Australia Selatan sudah terpasang, dan ini membantu menyediakan 992 megawatt (MW) selama jam penggunaan energi surya murni pada 11 Oktober. Fasilitas tenaga surya skala besar menyumbang 313 MW pada hari itu.

CEO AEMO, Audrey Zibelman mengungkapkan, "Dominasi dan integrasi yang sukses dari tenaga surya di atap-atap rumah warga di Australia Selatan menandai kebangkitan lagi sistem energi negara bagian di Australia." Be-

lum pernah sebelumnya, kata dia, ada wilayah seukuran Australia Selatan yang sepenuhnya mendapat pasokan tenaga surya, terlebih dengan sistem surya atap konsumen berkontribusi 77 persen.

Sebelum momen penting pada Oktober 2020 itu, jumlah energi yang berhasil diciptakan negara bagian ini melalui tenaga surya baru mencapai 89 persen dari kebutuhan energinya. Pada saat itu, sistem tenaga surya rumah menyediakan 900 MW untuk pertama kalinya.

Prospek keberhasilan Australia Selatan ini adalah agar jenis keluaran energi surya menjadi konsisten dan berskala besar di masa mendatang. "Australia Selatan sedang mengalami lonjakan instalasi surya di atap gedung," jelas Zibelman.

AEMO memperkirakan tambahan 36.000 sistem tata surya atap baru dalam 14 bulan ke depan, yang berarti bahwa jaringan listrik Australia Selatan akan melihat nol permintaan. "Karena tenaga surya di atap saja akan mampu memenuhi 100 persen permintaan. Ini benar-benar fenomena di lansekap energi global," ungkap Zibelman.

Mungkin pengalaman Jackie Thomson yang baru saja memasang 20 panel di atap rumahnya di Ade-

laide, ibu kota Australia Selatan, dapat menjadi contohnya. "Saya sudah lama memikirkannya, apalagi tagihan listrik saya terus membengkak," katanya mengenai alasan memasang panel surya di atap.

Dia langsung setuju ketika tawaran energi alternatif itu diperkenalkan pada September 2020 meskipun dapat mengganggu jaringan distribusi listrik

lebih efektif dan saya tidak peduli tentang itu. Jadi itu tidak memengaruhi jadwal saya memasang panel surya," katanya.

Tampak Jackie masa bodoh terhadap AEMO yang khawatir panel tenaga surya di atap tambahan dapat mengganggu stabilitas voltase dan akhirnya menyebabkan pemadaman. Solusinya, inverter (pengubah arus



konvensional pasokan SA Power Networks dan membuatnya berwenang menyetop pemasangan baru instalasi surya.

"Saya paham bahwa ini sebenarnya tentang mengelola jaringan secara

listrik AC/DC baru harus memiliki perangkat lunak yang memungkinkannya dikontrol dari jarak jauh.

Boleh jadi tantangan ini akan memicu temuan teknologi baru. Termasuk bisnis baru juga tentu. ●

INDONESIA BERKUTAT PADA JARINGAN MIKRO

Di acara 2nd Global Ministerial Conference on System Integration of Renewable yang berlangsung melalui konferensi online lantaran wabah Covid-19 masih merajalela, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengungkapkan keterbatasan ekonomi dan kondisi geografis, sistem distribusi kelistrikan yang terpusat belum mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Untuk yang belum terjangkau itulah energi terbarukan semodel dengan listrik tenaga surya lebih mengarah ke wilayah terpencil dan jaringannya pun mikro (*microgrids*).

"Dengan pemanfaatan sumber energi terbarukan lokal yang tersedia di setiap wilayah, *microgrids* dapat digunakan sebagai solusi untuk menciptakan wilayah mandiri energi untuk wilayah terpencil dan terdepan," papar Arifin pada 2nd Global Ministerial Conference on System Integration of Renewable, seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian pada Kamis, 29 Oktober 2020.

Lebih lanjut Arifin menjelaskan, *microgrids* dirancang untuk

mencapai fleksibilitas jaringan dan kemampuan pemrosesan data. Fleksibilitas diperoleh melalui kombinasi berbagai sumber energi terbarukan, seperti matahari dan angin, dengan baterai dan genset diesel yang terhubung ke jaringan pusat.

"Lebih penting lagi, *microgrids* juga sejalan dengan target pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan porsi penggunaan energi terbarukan," ungkapnya.

Saat ini Indonesia memiliki total potensi energi terbarukan lebih dari 400 giga watt (GW), namun pemanfaatan potensi tersebut masih berkisar 10 GW. Untuk meningkatkan porsi bauran energi baru terbarukan dalam sistem kelistrikan, pemerintah mulai memasukkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung (Floating Solar PV) bersama dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) untuk memitigasi masalah intermittency (gangguan) dari PLTS.

Proyek pertama yang dikembangkan adalah PLTS Terapung di PLTA Cirata, Jawa Barat. Proyek ini mendapat dukungan dari International Energy Agency. ●



KEMENANGAN BIDEN UNTUNGKAN INDONESIA

Joseph R Biden tinggal menunggu pelantikan sebagai Presiden AS periode 2021-2025 setelah mengungguli Donald J Trump dalam pemilihan Presiden awal November 2020. Apa peluang dan tantangan untuk Indonesia?

Latar belakang Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat akan menjadi salah satu perbedaan dengan pendahulunya, Donald Trump, yang berasal dari Partai Republik. Terutama dalam kebijakan luar negeri.

Biden akan menjadi presiden ke-46 AS yang mengendalikan banyak hal di salah satu kantor paling berkuasa di dunia, Gedung Putih. Sedangkan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris akan mengukir sejarah sebagai wanita pertama dan wakil presiden kulit hitam dan Asia Amerika.

Namun, banyak pengamat sepakat bahwa prioritas tahun pertama

kepresidenan Biden akan berfokus membenahi kondisi dalam negeri sepeninggal Trump. Majalah Forbes misalnya mengemukakan Biden akan mewujudkan janji kampanyenya yang berpusat di sekitar rencana besar meninggalkan kebijakan konservatif Trump yang kurang memihak lapisan bawah masyarakat AS.

Jadi, di dalam negeri AS, Biden berencana menyediakan stimulus atau pemicu pertumbuhan ekonomi seiring dengan wabah Covid-19 yang mencatatkan negeri itu sebagai salah satu negara yang warganya paling banyak terinfeksi virus corona. Terlebih lagi, penelitian mengenai kondisi ekonomi



AS menunjukkan partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan penurunan selama tiga tahun terakhir. Programnya adalah *Build Back Better* (membangun kembali dengan lebih baik).

Seiring dengan itu, sejumlah program asuransi kesehatan yang dirancang Biden memerlukan penggelontoran dana yang akan meningkatkan defisit 1,35 triliun dolar AS. Sementara defisit anggaran AS saat ini saja sudah mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah, mencapai sekitar 3 triliun dolar AS.

Biden juga menjanjikan kredit mahasiswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan warganya. Selanjutnya, Biden akan meningkatkan pajak bagi kalangan menengah atas di AS dan mengalokasikannya antara lain untuk dana pensiun. Program-program ini sepenuhnya tampak sebagai kelanjutan Presiden AS asal Demokrat sebelumnya. Katakan saja kebijakan Barack Obama pada masa pemerintahannya.

Nah, bagaimana dengan kebijakan luar negeri AS jika Biden menjabat

“
Persaingan AS-China dalam istilah yang sangat ideologis, sebagai pertarungan global yang membayangkan antara kebebasan dan otoritarianisme.

Presiden? Sebastian Strangio yang menjadi penanggung jawab *desk* Asia Tenggara di media *The Diplomat* menggambarkan wilayah yang juga mencakup Indonesia ini sebagai kawasan “Indo-Pasifik” klasik dunia, dan medan perang penting di dunia: persaingan Amerika dengan Cina. Efek yang mungkin terjadi, kata dia, akan terjadi perubahan relatif pada gaya

dan implementasinya, di samping kontinuitas relatif pada substansinya.

Yang akan terlihat, kata Strangio, yang pertama adalah koherensi atau jalinan yang konsisten secara umum. Sebaliknya di masa Trump lebih banyak inkoherensi. Misalnya, dalam hubungannya dengan Tiongkok, pejabat Kementerian Luar Negeri AS biasanya menggambarkan persaingan AS-China dalam istilah yang sangat ideologis, sebagai pertarungan global yang membayangkan antara kebebasan dan otoritarianisme. Namun, AS mendukung gaya tangan besi “perang narkoba” Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Strangio juga melihat pemerintahan Biden akan lebih banyak berinvestasi di bidang diplomasi. Sedangkan kebijakan luar negeri di masa Trump, dianggap lebih banyak mengenai sanksi yang kerap menghasilkan masalah baru. Katakan saja misalnya kebijakan imigrasinya.

Penasihat senior Biden Anthony Blinken sudah menegaskan, “Presiden

Biden akan muncul dan melibatkan ASEAN dalam masalah kritis.” Lebih banyak diplomasi tidak selalu menjanjikan lebih banyak keefektifan, tetapi hal itu akan memastikan bahwa kebijakan AS diformulasikan dengan lebih akurat dan dikirimkan ke ibu kota Asia Tenggara secara andal, lebih teruji konsistensinya.

Di Asia Tenggara, Presiden Biden yang diduga, seperti Trump dan Obama sebelumnya, akan menghadapi tantangan untuk mendorong kebijakan yang demokratis dan liberal berkembang di kawasan dengan sedikit pemerintahan demokratis atau liberal. Pemerintahan akan membuat

ekonomi ketimbang ideologi.

Dari sudut pandang ekonomi, tak terelakkan bahwa persaingan antara AS dan Tiongkok tetap akan membayang-bayangi ekonomi dan bisnis di Indonesia. Data situs The Global Economy menyebutkan AS merupakan negara dengan sumbangan terbesar terhadap produk domestik bruto dunia, pada 2018 tercatat sekitar 24,14 persen disusul oleh Tiongkok dengan sumbangan terhadap PDB dunia mencapai 16,34 persen. Sementara sumbangan rata-rata setiap negara lainnya terhadap PDB dunia hanyalah 0,54 persen.

Di mata ekonom dari Universitas In-

tidak banyak memiliki pengaruh karena ekonomi Indonesia sangat erat dengan kebijakan domestik.

Meski demikian, dampak terpilinya Biden pada perbaikan perdagangan dunia bisa dimanfaatkan. Syaratnya pemerintah Indonesia mampu meningkatkan pertumbuhan perdagangan menjadi 9,8 persen per tahun. Angka sebesar itu juga yang perlu dicapai Indonesia jika masih berharap keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah per 2045 dengan bantuan perdagangan selain faktor domestik.

Sebagai perbandingan, Bank Dunia mencatat pertumbuhan perda-



kemajuan ketika berurusan dengan kawasan ini secara pragmatis, dan mengalami kebalikan ketika mendorong nilai-nilai liberal terlalu tekun. Apa pun dampaknya, kebijakan pemerintahan Biden terhadap China dan Asia Tenggara akan terus ditimbulkan oleh kontradiksi yang telah berlangsung lama antara cara-cara demokrasi liberal dan tujuan-tujuannya.

Namun, itu semua adalah perspektif AS. Bagaimana dengan sudut pandang kawasan Asia, khususnya Indonesia? Tetap masih ada perbedaan meskipun Indonesia secara umum lebih menekankan aspek bisnis dan

Indonesia Fithra Faisal Hastiadi, dampak pemilu AS sebenarnya akan relatif kecil bagi Indonesia, meskipun Biden menang dan ada perbaikan tren perdagangan dunia. Alasannya, Bank Dunia mencatat porsi perdagangan luar negeri Indonesia terhadap PDB hanya 37,3 persen per 2019. Beda dengan Singapura 319 persen, Malaysia 123 persen, dan Thailand 110 persen.

BPS bahkan mencatat porsi ekspor RI per 2019 hanya 18,41 persen PDB. Angka itu jauh di bawah konsumsi rumah tangga sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi yang tercatat, 56,62 persen. Jadi, keputusan Presiden AS terpilih

gangan Indonesia hanya 2,57 persen per tahun selama 2018. Dengan kata lain, syaratnya cukup berat. Persoalan sebenarnya adalah, apa yang akan diperdagangkan yang menyangkut ekspor-impor?

Namun, peluang tetap ada. Antara lain dengan kunjungan sehari Menteri Luar Negeri Mike Pompeo ke Jakarta pada awal November 2020. Rupanya dalam kunjungan itu pemerintahan Trump memberikan perpanjangan fasilitas *Generalized System of Preferences* (GSP) yang membebaskan bea pada banyak komoditas ekspor Indonesia ke AS. Menteri Perdagangan

Agus Suparmanto mengatakan Indonesia dengan cepat menindaklanjuti usulan kesepakatan perdagangan terbatas dengan AS. "Perpanjangan GSP dan kesepakatan perdagangan terbatas akan berdampak positif bagi perdagangan AS-Indonesia dengan meningkatkannya menjadi \$ 60 miliar pada 2024. GSP ini harus dimanfaatkan pelaku usaha," kata Agus.

GSP memangkas tarif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang. Sementara Indonesia tetap menjadi negara penerima GSP, AS menghentikan status perdagangan preferensial India tahun lalu.

Bagi Indonesia, mengikuti siapa



pun yang memenangkan Gedung Putih lebih dari sekadar keingintahuan, terutama karena AS adalah salah satu mitra dagang strategisnya. Agus mengatakan AS merupakan negara tujuan ekspor nonmigas terbesar kedua Indonesia setelah China. Pada 2019, total nilai perdagangan AS-Indonesia mencapai 27,6 miliar dolar, dengan ekspor mencapai 18,3 miliar dan impor 9 miliar dolar.

Dengan perpanjangan GSP, sebenarnya peluang untuk meningkatkan ekspor lebih terbuka. Tinggal apa yang mau diekspor ke AS, produk maupun jasa. ●



PENINGGALAN TRUMP DI INDONESIA

Sebenarnya bukan semata peninggalan, melainkan bisnis Trump yang telah masuk ke Indonesia. Bisnis properti mewah bernama Trump Residences memilih pengembangan di dua kawasan dengan menggandeng perusahaan MNC Land di bawah naungan Hary Tanoesoedibjo.

Trump Residences merupakan resor dan hunian ultra mewah yang terintegrasi pertama di Indonesia. Proyek unggulan ini hadir di Lido, Jawa Barat dan Bali.

Namun, wabah Covid-19 sudah jelas mengganggu banyak sektor bisnis, tak terkecuali properti, termasuk proyek properti kelas atas kerja sama antara PT MNC Land Tbk dan Trump Hotel Collection: Trump Residences Tanah Lot, Bali, dan Trump Residences Lido, Jawa Barat. Proyek kerja sama antara perusahaan milik Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Hary Tanoesoedibjo ini pun terkena pukulan corona sehingga mundur dari rencana semula.

Analisis Mirae Sekuritas Indonesia, Joshua Michael mengatakan pandemi corona membuat 2020 sebagai tahun yang sulit bagi para pengembang properti, termasuk MNC Land. Apalagi, Bali yang terkenal sebagai kawasan wisata sebagai wilayah yang paling terpukul selama pandemi.

"Peluncuran Trump Residences Bali dan Lido akan tergantung pada seberapa cepat pandemi Covid-19 dapat mereda, lalu dilanjutkan 1 - 2 tahun periode konstruksi," kata Joshua dalam riset yang dipublikasikan pada awal Mei 2020 lalu.

Proyek Trump Residences milik MNC Land dan Trump Hotel Collection merupakan proyek properti kelas atas yang menyasar orang-orang terkaya di Tanah Air karena harganya yang premium. Harga jual rata-rata properti Trump Residences Bali dan Lido berkisar Rp 8 - 15 miliar per unit untuk kondominium, dan Rp 30 - 80 miliar untuk vila.

Menurut Joshua, harga jual setinggi itu hanya akan terjangkau bagi 10% orang berpenghasilan tertinggi di Indonesia. Menurut data Bank Dunia, 10 persen orang terkaya ini menguasai hingga 30 persen dari total pendapatan penduduk negeri ini atau masuk ke dalam kuartil pertama kelompok pendapatan dunia. "Karena Indonesia masih berada di kuartil kedua GNI (gross national income) dunia per kapita," ujarnya.

Yang tak boleh dilupa pula, belum tentu pasar kedua proyek properti itu hanya untuk warga negara Indonesia. Katakanlah misalnya, untuk para investor luar negeri yang memerlukan tempat peristirahatan di wilayah tropis yang berarti sektor pariwisata, bukan semata properti.

Tapi, dengan lengsernya Trump sebagai Presiden AS, masih perlu waktu untuk melihat kelanjutan investasi Trump di Indonesia. Kita nantikan bersama. ●



PENUNDAAN - Rapat antara Polri, PSSI, PT LIB, dan perwakilan klub mengenai penundaan kompetisi Liga 1 dan 2 di Yogyakarta, Selasa (13/10/2020).

SEPAK BOLA MUMET KABEH

▲ Ancaman Liga Dihentikan

Kompetisi sepak bola Liga 1 dan Liga 2, dipastikan ditunda. Menyusul wabah pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai. Klub-klub di tanah air pun terancam dari sisi finansial. Terutama para pemain yang harap-harap cemas karena mata pencaharian utamanya sirna.

Badai besar datang menerpa kompetisi sepak bola tertinggi di tanah air, dengan tidak turunnya izin keramaian dari Polri. Penundaan itu diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Moch Irwan 29 September 2020 di Halaman Kantor Kemenpora RI.

Ditemani langsung oleh Kemenpora RI Zainudin Amali setelah melakukan diskusi panjang kurang lebih dua jam sebelum melakukan konferensi pers, pria yang akrab disapa Iwan Bule itu akhirnya memutuskan untuk menunda kelanjutan Liga 1 dan Liga 2.

"PSSI menghormati dan memahami keputusan dari Kapolri dengan tidak turunnya izin keramaian dengan alasan kasus corona masih tinggi," tu-

turnya.

Padahal jadwal Piala Dunia U-20 2021 sudah ditetapkan, dan tidak bisa diubah. PSSI pun berharap kompetisi dapat digulirkan dalam waktu dekat. Minimal awal November.

Jika itu terjadi, kompetisi akan selesai pada Maret 2021. "Kalau kompetisi dimulai Desember, dipastikan sulit terjadi karena awal April sudah masuk bulan Ramadhan dan Mei-Juni sudah Piala Dunia," paparnya.

Lantas apakah ada jaminan pandemi corona akan mereda satu bulan ke depan sehingga Polri bisa mengeluarkan surat izin keramaian?

Iwan Bule memang tidak bisa memastikan. Yang pasti dirinya hanya berharap kompetisi musim ini tetap



UNTUK GENERASI MUDA – SSB Putra Ragatama yang dihidupkan kembali oleh Komarudin.

ada. "Karena kalau dilanjutkan pada Agustus tahun depan, ini akan menghilangkan satu generasi. PSSI terutama Timnas tentu tidak akan bisa ikut agenda FIFA dan AFC. PSSI juga akan dipandang kurang baik oleh FIFA dan AFC nantinya," ujarnya.

Apa yang dikatakan oleh Iwan Bule ini berbeda jauh dengan alasan dari Plt Sekjen Yunus Nusi.

Yunus menyebut PSSI getol ingin memutar kompetisi agar tidak terlihat 'lucu' di mata dunia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun depan. Tidak dipandang lucu karena jadi tuan rumah tapi kompetisinya tidak ada selama pandemi corona.

Keras kepalanya PSSI untuk ingin terus memutar kompetisi tampaknya akan membuat PT LIB kembali pusing. Terutama Direktur Utama LIB Akhmad Hadian Lukita yang baru saja menjabat.

Lukita harus kembali dihadapkan kemarahan klub-klub peserta yang merasa rugi besar dengan ditundanya kompetisi untuk kali kedua karena

pandemi korona ini.

Apalagi, beberapa klub sudah meminta garansi kalau kompetisi akan kembali digelar awal November. Beban berat itu kian bertambah dengan permintaan klub yang ingin LIB menambah nilai subsidi karena kompetisi yang molor sampai Maret tahun depan jika dilanjutkan pada awal November.

Dia menegaskan LIB masih belum punya jawaban apapun soal garansi hingga tambahan subsidi. "Ke depan LIB dan PSSI akan berdiskusi banyak hal dengan klub-klub," jelasnya.

Saat diwawancara, Lukita mengaku sedang melakukan perjalanan ke Jogjakarta untuk menemui sejumlah klub luar Pulau Jawa yang sudah tiba dan latihan di sana. Sebut saja PSM Makassar, Barito Putera, dan Persiraja Banda Aceh.

Nah, jika garansi dan subsidi tak pasti, pria yang akrab disapa Luluk itu menyebut klub-klub tidak usah khawatir masalah swab test. Pihaknya akan menjadwalkan ulang swab test gratis yang diberikan oleh LIB kepada

Yunus menyebut PSSI getol ingin memutar kompetisi agar tidak terlihat 'lucu' di mata dunia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun depan. Tidak dipandang lucu karena jadi tuan rumah tapi kompetisinya tidak ada selama pandemi corona.



TUNDA- Liga 1 terancam penundaan.

Selain para pemain sudah melakukan persiapan, penundaan itu akan menimbulkan masalah baru. Salah satunya terkait kontrak. "Tapi kami harus berbesar hati menerima karena kondisi pandemi ini," tuturnya.

peserta untuk kompetisi di November mendatang. "Kami akan jadwal ulang semuanya," jelasnya.

Jika LIB juga sedang pusing, begitu juga yang kini dirasakan oleh Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI). General Manager APPI Ponaryo Astaman justru menyebut penundaan itu sangat mengecewakan.

Selain para pemain sudah melakukan persiapan, penundaan itu akan menimbulkan masalah baru. Salah satunya terkait kontrak. "Tapi kami harus berbesar hati menerima karena kondisi pandemi ini," tuturnya.

Saat ini, pihaknya masih tidak mau berandai-andai terkait masalah yang timbul mengenai kontrak pemain, dari efek penundaan ini. Pastinya, APPI masih fokus untuk mengawal beberapa hal terkait kelanjutan kompetisi terlebih dahulu. "Situasinya sekarang belum pasti. Mumet kabeh," paparnya lantas tertawa.

Nasib Pemain di Ujung Tanduk

Tertundanya kompetisi Liga 1 dan

Liga 2 punya efek domino. Selain akan mengganggu regenerasi sepak bola Indonesia, nasib orang-orang yang menggantungkan hidup di kompetisi juga akan terkena dampaknya. Terutama para pemain yang selama ini hanya menggantungkan hidup dari gaji bermain bola saja.

Abdul Aband Rahman masih sangat percaya 100 persen jika kompetisi musim ini tidak akan benar-benar berhenti. Walau sudah di-PHP dengan ditundanya Liga 1, dia yang sudah berlatih bersama PSIS Semarang, selama beberapa pekan tetap optimistis kalau apa yang sudah dipersiapkan tidak akan sia-sia. "Insya Allah jalan lagi," katanya singkat.

Dia juga masih belum mau memikirkan apa yang akan dilakukan jika pilihan terburuknya adalah Liga 1 musim ini benar-benar dihentikan. Mantan pemain Kalteng Putra itu masih berharap kompetisi dilanjutkan. Terutama untuk mendapatkan pundi-pundi uang dari hasil jerih payahnya di lapangan hijau.

Tapi, jika faktanya kompetisi harus

berhenti, Abanda hanya bisa pasrah. Dia tak lantas berdiam diri dan mengutuk nasib. Karena, perutnya masih harus tetap diisi walaupun tidak ada kompetisi.

Nah, Abanda sendiri sudah punya rencana jika memang kompetisi Liga 1 benar-benar dihentikan musim ini. Rencana yang akan dilakukannya adalah kembali ke laut. Alias kembali jadi nelayan seperti pekerjaan yang dilakukan keluarganya sejak dulu.

Dia akan pulang ke Kendari, Sulawesi Tenggara untuk kembali bergelut dengan ombak dan angin laut. "Alhamdulillah saya sudah punya kapal untuk menangkap ikan, biasanya ketika saya main bola kapal itu disewakan ke orang. Tapi kalau kompetisi berhenti, saya akan pakai untuk hidup sehari-hari," ujarnya.

Tidak sulit baginya untuk beradaptasi dengan kejamnya lautan. Pria berusia 30 tahun itu menegaskan sudah terbiasa dengan laut. Sudah hafal betul bagaimana laut. Laut sudah jadi sahabatnya sejak kecil.

Ya, tinggal di pesisir pantai, Abanda tidak hanya sekali melaut. Bahkan, sejak masih sangat kecil, sang ayah yang juga nelayan, kerap mengajaknya menangkap ikan. "Saya sudah terbiasa dengan kerasnya hantaman ombak. Jadi tidak ada masalah," jelasnya.

Memang, Abanda masih harus kembali mengasah skill melaut yang sudah lama hilang. Maklum, skill itu mungkin sedikit luntur karena aktivitasnya di sepak bola hampir belasan tahun terakhir. "Mungkin saya akan ikut ayah dulu, kapalnya tidak sebesar punya saya, tapi bisalah untuk belajar lagi," jelasnya.

Malu? Tidak. Abanda merasa jadi nelayan bukanlah pekerjaan yang wajib disembunyikan. Bahkan, namanya sebagai pesepakbola nasional dan berkostum PSIS pun tidak membuatnya malu ketika akhirnya nanti kembali ke laut. "Sudah jalan hidup kan?" katanya.

Selain melaut, mungkin hal lain yang akan dilakukannya adalah bermain tarkam. Tentu, bermain tarkam tidak semata-mata hanya untuk mencari pundi-pundi uang saja. melainkan agar skill sepak bola tetap terjaga.

Sebab, dia tidak mau ketika nanti timnya PSIS membutuhkan lagi jasanya, Abanda kehilangan sentuhan bola. Kondisi fisiknya turun drastis. "Saya mau tetap dalam kondisi fit dan 100 persen siap tanding," paparnya.

Saat ini, selain masih berlatih bersama PSIS, Abanda sendiri sedang memperjuangkan gajinya yang masih ditunggak oleh Kalteng Putra. Tim yang dibelanya musim lalu. Kalteng Putra menunggak gajinya dan 25 pemain lain.

Dia bahkan sempat pasrah ketika nomor kontaknya diblokir oleh manajemen Kalteng Putra. Dia tidak tahu lagi harus bertanya ke mana perihal haknya ketika membela Kalteng Putra musim lalu. Apalagi dirinya sempat takut Kalteng Putra lepas dari tanggung jawab setelah Liga 2 ditunda karena pandemi corona.

"Kami semua dijanjikan dari November tahun lalu, janji akan diselesaikan tapi sampai sekarang tidak ada bukti.

Saat ini, selain masih berlatih bersama PSIS, Abanda sendiri sedang memperjuangkan gajinya yang masih ditunggak oleh Kalteng Putra. Tim yang dibelanya musim lalu. Kalteng Putra menunggak gajinya dan 25 pemain lain.



TIDAK PUSING - Kahar Kalu akan kembali menjadi petani cengkeh di kampung halamannya.

Usianya memang masih 25 tahun. Baru dua tim yang dibela Komarudin di kasta tertinggi, yakni Persegres Gresik United pada 2017. Lalu dia berseragam PSIS Semarang 2018 sampai sekarang. Tapi, rasa utang budinya kepada Sekolah Sepak Bola (SSB) masa kecilnya begitu besar.

kontak saya diblokir, telepon tidak nyambung. Mereka semua lari dari tanggung jawab," ucapnya kesal.

Beruntung, APPI akhirnya gerak cepat bertemu dengan PT LIB setelah Liga 2 secara resmi digulirkan lagi pada awal November. APPI memberi warning kalau Kalteng Putra termasuk dari 5 klub yang sudah diputuskan oleh NDRC tidak boleh mendaftarkan pemain dalam 3 periode jendela transfer jika tunggalkn kepada mantan pemainnya musim 2018 tidak dibayarkan.

Walau begitu, Abanda masih harap-

ke depannya tidak ada masalah seperti ini lagi di sepak bola Indonesia," harapnya.

Pilih Jadi Pelatih SSB

Usianya memang masih 25 tahun. Baru dua tim yang dibela Komarudin di kasta tertinggi, yakni Persegres Gresik United pada 2017. Lalu dia berseragam PSIS Semarang 2018 sampai sekarang. Tapi, rasa utang budinya kepada Sekolah Sepak Bola (SSB) masa kecilnya begitu besar.

SSB bernama Putra Ragatama itu kini dilahirkan kembali oleh Komar. "Sempat bubar ketika saya sudah jadi pesepakbola profesional," katanya. Proses dilahirkan kembali itu dilakukannya ketika kompetisi ditunda sejak Maret lalu akibat pandemi.

Bersama 5 orang temannya, Komar kembali membangkitkan SSB tersebut. dia mengajak anak-anak kecil kelahiran 2006-2011 di Desa Pesawahan, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. "Gratis tanpa dipungut biaya. Sudah 50-an anak sekarang," terangnya.

Selain akan kembali melatih di SSB masa kecilnya, pemain asli Kendal itu juga akan total mengurus toko olahraga miliknya. Toko kecil yang dibangun dari hasil jerih payahnya selama ini di sepak bola. "Tidak besar, paling tidak bisa untuk investasi masa depan," tuturnya.

Komar sebenarnya sama sekali tidak ingin kompetisi dihentikan. Beberapa kali, di akun instagramnya, dia selalu mengatakan kecewa jika kompetisi dihentikan. Sudah terlanjur berlatih keras agar bisa menampilkan performa terbaik.

Apalagi, usianya masih muda. Dia masih punya harapan untuk bisa mengenakan kostum merah-putih dengan logo Garuda di dada. Untuk bisa membela negara, dan membuat Pelatih Timnas Shin Tae-yong kepincut dengan penampilannya. "Doakan saja yang terbaik," harapnya.

Selain dua aktivitas tersebut, Komar juga akan mulai fokus lagi kuliah. Maklum, dia masih tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Olahraga Universitas Wahid Hasyim. "Ya meski jadi pesepakbola, pendidikan tetap nomor satu," ungkapnya.



UTANG BUDI - Komarudin lebih memilih menjadi pelatih SBB dan mengelola toko olahraga.

harap cemas. Walau dia bersyukur di klubnya saat ini tidak ada permasalahan mengenai gaji. Tapi tetap saja ada dia masih membutuhkan haknya yang masih ditunggak di Kalteng Putra.

"Itu hak saya, harusnya memang saya wajib mendapatkan itu. Sekarang saya hanya berharap LIB, PSSI, dan Komdis tegas atas keputusan yang sudah dijatuhkan oleh NDRC. Agar

Ada yang Bertani Cengkeh

Kahar Kalu tidak pusing ketika Barito Putera memotong gajinya akibat pandemi corona. Atau pun ketika nanti kompetisi Liga 1 resmi dihentikan.

Dia sudah punya pemasukan lain jauh sebelum jadi pesepakbola. Pesepakbola berposisi sebagai striker itu saat ini kembali berkebun cengkeh untuk menambah pemasukan.

Dia kembali menggarap ladang warisan sang ayah, Kalu, untuk menambah pemasukan selama pandemi korona. Maklum, sebagai pemain muda, gajinya yang dipotong di Barito Putera tidak akan cukup untuk kebutuhan sehari-hari jika tidak ada pemasukan lainnya. Malah nanti ketika kompetisi Liga 1 berhenti

Lelah? Sudah biasa. beruntung, aktivitas yang dilakukannya bukan hal baru. Bahkan, ketika menginjak sekolah dasar, hidup di ladang jadi aktivitas sehari-harinya.

Tidak heran jika Kahar sangat terampil ketika menanam cengkeh. Tangannya cukup terampil ketika mencoba memainkan sekop untuk menggali tanah. Beberapa menit sebuah lubang sudah terbentuk. Dia pun langsung memasukkan bibit cengkeh plus pupuk dan menutupnya. Tak lupa sedikit disiram dengan air. "Beberapa bulan lagi tumbuh jadi batang, baru bisa dipetik hasilnya," tuturnya.

Hampir setiap hari dirinya memang selalu menengok kebun warisan sang ayah itu. baik sekedar memantau kondisi cengkeh, hingga mencoba belajar memetik cengkeh pada beberapa tukang kebun senior di sekitarnya.

"Saya kurang bisa memetik cengkeh, tidak bisa tahu mana yang bagus. Biasanya minta tolong orang, tapi mumpung sekarang libur saya belajar sekalian," katanya.

Hasil dari cengkehnya tersebut lumayan. Tiap kali panen, setahun dua kali, 22 karung dihasilkan. 1 karungnya kurang lebih 100 kilogram isinya. "Kalau ditanya penghasilannya berapa, tidak mesti. Harganya naik turun, paling tidak lumayanlah untuk nambah pemasukan," tuturnya

Pesepakbola yang mengawali karir di PSM U-21 itu menuturkan beruntung dengan adanya warisan sang

ayah tersebut. walau harus terjun langsung karena sang ayah sudah meninggal tahun lalu, paling tidak baginya hasil dari cengkeh ternyata bisa memperpanjang nafasnya saat kompetisi berhenti. "Untungnya sejak dulu ayah selalu ngajari saya. Alhamdulillah bisa meneruskan," katanya.

Biasanya, dia masuk ke kebun cengkeh hanya ketika libur. Itu pun hanya jadi mandor. Tapi jika nanti Liga 1 berhenti, dia terpaksa harus turun langsung.

Selain itu, paling tidak turunnya Kahar ke kebun lagi juga meneruskan apa yang sudah diamanatkan almarhum ayahnya. Yakni menjaga warisan kebun itu agar bisa terus menghidupi keluarga. "Saya bersyukur saat ini, banyak



BAKAL MELAUT - Abdul Aband Rahman memilih menjadi nelayan jika liga dihentikan musim ini.

pengalaman yang saya dapat selama libur kompetisi. bisa jadi Kahar yang dulu lagi, ingat dari mana saya berasal, tidak tinggi hati dulu," ungkapnya.

Walau bisa dikatakan nyaman, Kahar tetap menyimpan harapan agar kompetisi kembali lanjut. Dia sendiri tetap memantau perkembangan saat ini PSSI bakal segera merilis kejelasan kompetisi. "Kebetulan saya bersaudara sama Irfan Jaya (pemain Persebaya), kami sama-sama sering ketemu dan ngobrol. Banyak ngomongin kompetisi gimana. Sama-sama berdoa semoga jalan lagi, saya rindu main bola lagi," harapnya. ●fa

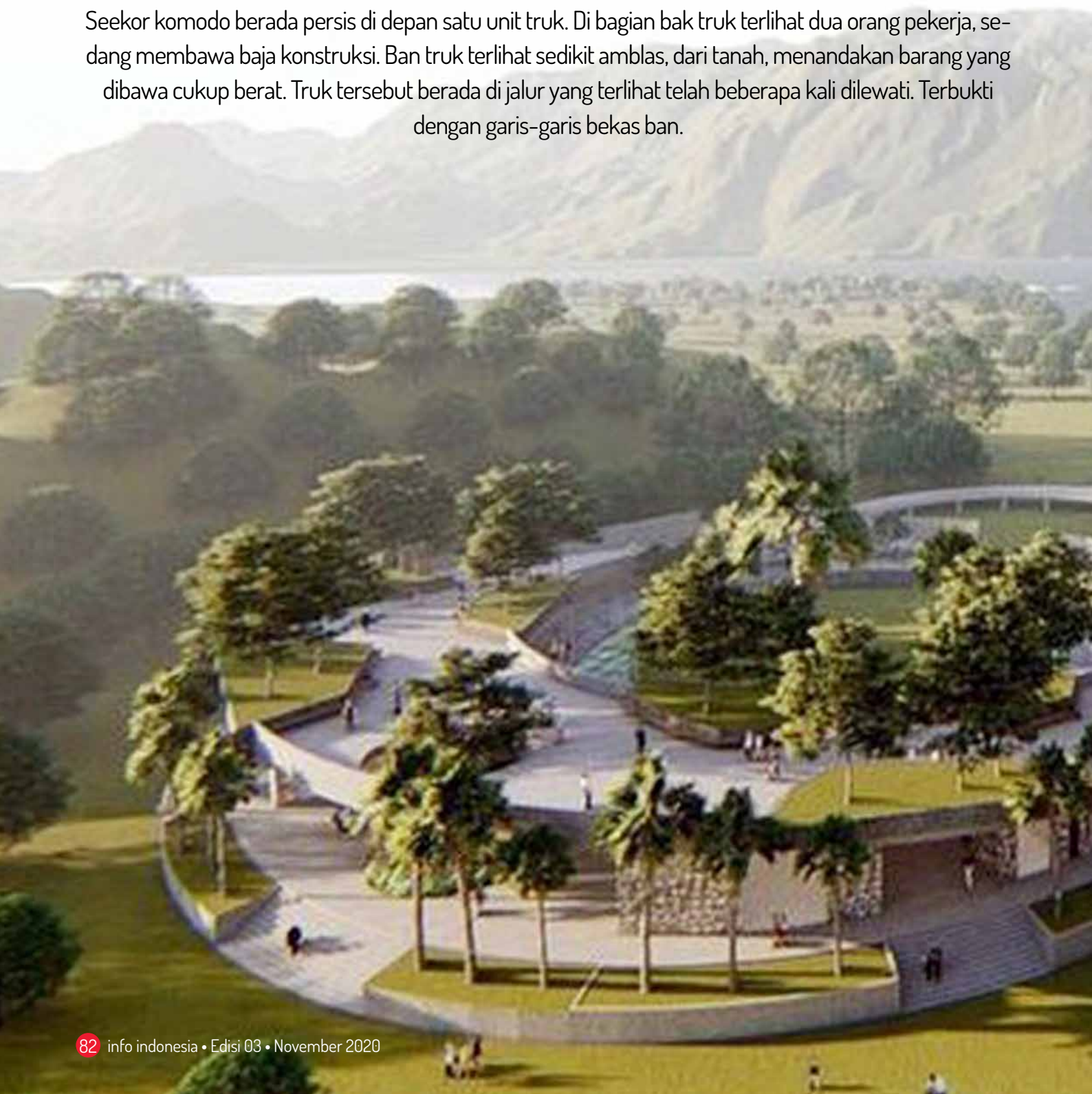
Hampir setiap hari dirinya memang selalu menengok kebun warisan sang ayah itu. baik sekedar memantau kondisi cengkeh, hingga mencoba belajar memetik cengkeh pada beberapa tukang kebun senior di sekitarnya.



"JURASSIC PARK" DI PULAU RINCA

► Si Komo Dijual atas Nama Ekowisata

Seekor komodo berada persis di depan satu unit truk. Di bagian bak truk terlihat dua orang pekerja, sedang membawa baja konstruksi. Ban truk terlihat sedikit amblas, dari tanah, menandakan barang yang dibawa cukup berat. Truk tersebut berada di jalur yang terlihat telah beberapa kali dilewati. Terbukti dengan garis-garis bekas ban.



Gambaran seekor komodo dengan satu unit truk itu adalah foto yang kemudian menjadi viral di media sosial. Foto tersebut diambil di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo (TNK), Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Saat ini TNK memang sedang dalam tahap pengerjaan pembangunan geopark. Pelaksananya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Habitat 'Si Komo', hewan purba itu, akan disulap menjadi resort mewah, berkonsep modern, yang akan menjadi wisata orang-orang borjuis. Konsep pengembangan geopark ini populer dinamakan "Jurassic Park".

"Tujuan utama konsep ini adalah mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan dengan mengem-

bangkan potensi yang ada dengan cara yang berkelanjutan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Melalui Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR telah mengalokasikan Rp 69,96 miliar untuk menata kawasan Pulau Rinca yang meliputi bangunan pusat informasi, sentra souvenir, kafe, dan toilet publik.

Kemudian dibangun pula kantor pengelola kawasan, selfie spot, klinik, gudang, ruang terbuka publik, penginapan untuk peneliti, dan pemandu wisata.

Area trekking untuk pejalan kaki dan shelter pengunjung didesain melayang atau elevated agar tidak mengganggu lalu lintas komodo. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas dermaga di Pulau Rinca, dibangun sarana dan prasarana pengaman pantai dan dermaga Loh Buaya yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Air pada 2020 ini.

Pulau Rinca memiliki luas 20.000 hektare, sementara luas Lembah Loh Buaya adalah 500 hektare atau 2,5 persen dari luas Pulau Rinca. Estimasi populasi komodo di Pulau Rinca pada 2019 diperkirakan sebanyak 1.300 ekor, sementara populasi komodo di Lembah Loh Buaya sekitar 66 ekor.

KLHK tidak bisa mengelak mengenai rencana pembangunan "Jurassic Park" ini. Meski dibangun lebih modern, tapi KLHK akan tetap fokus pada pelestarian habitat komodo. Hal ini merupakan upaya berkelanjutan terhadap populasi reptil purba tersebut di kawasan TNK.

"Upaya konservasi terus dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini



dengan menyinergikan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan,” tulis KLHK melalui twitter resminya, @KementerianLHK pada Selasa (27/10/2020).

Selain di Pulau Rinca, TNK juga meliputi empat pulau lain, yakni Pulau Komodo, Padar, Nusa Kode (Gil Dasami), dan Gili Montang. KLHK menegaskan, upaya konservasi terhadap habitat Komodo atau yang disebut ‘ora’ oleh masyarakat sekitar, tidak dilakukan serampangan.

“Sebab, Komodo merupakan hewan dilindungi berdasar Peraturan Menteri LHK Nomor. 106/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2018,” jelas KLHK.

KLHK menjelaskan, pengembangan wisata di TNK akan diarahkan menjadi destinasi wisata super prioritas berdasarkan amanat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. “Karenanya KLHK menjaga betul tentang hal ini, penggunaan alat-alat berat pun telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian”.

Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno dalam konferensi pers secara daring kepada awak media membeberkan, wacana pembangunan “Jurassic Park” sejatinya sudah dilakukan pada 2014. Namun, baru disetujui pada 2019, dengan menunjuk PT Segara Komodo Lestari sebagai pengelola.

Dia menyatakan perusahaan swasta boleh beroperasi di TNK. Dia mengatakan izin tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah. “Ini sebetulnya secara aturan boleh,” ujar dia.

Wiratno membeberkan beberapa perusahaan swasta yang mendapat izin berbisnis di TN Komodo. Pertama, PT Segara Komodo Lestari yang mengelola 22,1 hektare lahan di Pulau Rinca.

Kedua, PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) yang memperoleh izin pada tahun 2014. Perusahaan itu mendapat izin mengelola lahan 151,9 Ha di Pulau Komodo.

Selain di Pulau Komodo, PT KWE juga mendapat izin berbisnis di Pulau Padar pada tahun 2014. Dia mendapat izin mengelola lahan 274 Ha di Pulau Padar.

Selanjutnya, pemerintah juga memberi izin kepada PT Synergindo

Niagatama untuk berbisnis di atas lahan seluas 15,3 Ha di Pulau Tatawa. Izin itu baru keluar tahun ini.

Namun, Wiratno tak menyebut satu perusahaan lain yang disebut-sebut juga menerima izin berbisnis di TNI Komodo, yakni PT Flobamora dan mitranya di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Informasi yang beredar izin perusahaan itu masih dalam proses.

Meski telah memiliki izin, Wiratno menyebut seluruh perusahaan itu belum beroperasi hingga saat ini. Sebab, dia berkata terjadi banyak penolakan terkait dengan izin tersebut pada tahun 2019.

“Padahal secara aturan izin itu dibolehkan. Mendapatkan izin usaha sarana pariwisata alam dibolehkan,” ujarnya.

Di sisi lain, Wiratno mengklaim izin wisata alam diterbitkan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Namun, dia tak menjelaskan secara spesifik keberpihakan izin itu terhadap warga lokal.

Dia hanya mengatakan warga lokal boleh menjadi pemandu bagi wisatawan. “Mari kita bicarakan tentang strategi ekowisata berbasis masyarakat dan berbasis budaya,” ujar mengalihkan pertanyaan wartawan.

Terkait dengan izin bagi perusahaan, Wiratno menambahkan masih akan dibicarakan lebih lanjut. Namun, dia meyakini kehadiran perusahaan swasta di TNK akan memberi manfaat ekonomi bagi warga lokal.

“Itu tidak bisa kita pungkiri. Saya punya detil siapa-siapa yang mendapatkan manfaat ekonomi dari keberadaan komodo ini,” ujarnya.

“Yang jelas unsur masyarakatnya masih kurang maka harus ada community based ecotourism yang didorong terus sehingga masyarakat menjadi salah satu pelaku utama dari wisata yang khas di TN Komodo,” sambung Wiratno.

Pembangunan Disebut Tidak Membahayakan

Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) memastikan pembangunan di Loh Buaya, Pulau Rinca yang masuk dalam kawasan TNK dilakukan dengan sangat hati-hati



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dengan mempertimbangkan keamanan dari satwa komodo.

“Pembangunan di Loh Buaya dilakukan dengan sangat hati-hati. Setiap pagi dilakukan briefing terkait keamanan dan keselamatan baik untuk para pekerja, dan juga yang paling penting adalah keamanan satwa yang ada di Loh buaya, agar jangan sampai ada satwa terganggu, sangat hati-hati dengan api,” kata Direktur Utama BO-PLBF Shana Fatina dikutip dari Antara. Ia mengatakan bahwa viral adanya



GENCAR TINGKATKAN WISATAWAN - Presiden Joko Widodo bersama sang istri Iriana Joko Widodo saat mengunjungi Taman Nasional Komodo.

truk yang diadang seekor reptile dengan *Veranus Komodoensis* sebaiknya tidak ditafsirkan berlebihan. Sebab penggunaan truk di lokasi itu dilakukan untuk membawa tiang pancang yang berat, dan membutuhkan alat berat di lokasi itu untuk mengangkutnya.

Shana menambahkan bahwa pemerintah sudah pasti mengutamakan kelestarian dan keseimbangan ekosistem dalam melaksanakan pembangunan yang ada, dan semuanya sudah melalui prosedur dan kajian

yang mendalam.

"Pengelolaan TNK merupakan wewenang KLHK, pembangunan dilakukan oleh KemenPUPR, dan untuk mendukung pariwisata premium berkelanjutan yang didorong Kememparekraf. Ini merupakan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Kita pun terlibat dalam setiap prosesnya, dan memastikan bahwa semua menjaga prinsip pariwisata berkelanjutan dengan komitmen sesuai peran dan fungsi masing-masing," tutur dia.

Shana mengatakan pihaknya selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan semua stakeholder baik lokal, nasional, maupun internasional khususnya untuk menjelaskan rencana pengembangan pariwisata berkelanjutan di TNK.

"Dan peningkatan pariwisata di sana menjadi *quality tourism* dan minat khusus. Justru sekarang memungkinkan untuk pelibatan masyarakat dalam kawasan lebih aktif sebagai subyek dari konservasi dan pariwisata," kata dia.



SURGA DUNIA - Wilayah Taman Nasional Komodo yang berada di Nusa Tenggara Timur.

Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Timur, Marius Jelamu menyebut bahwa konsep pembangunan itu bukan seperti "Jurassic Park". "Konsep pembangunan di Pulau Rinca adalah ekowisata, bukan Jurassic Park," kata dia.

Marius menjelaskan pembangunan di Pulau Rinca hanya dilakukan di wilayah seluas lima hektare dari total luas pulau yang mencapai 20 ribu hektare.

"Jadi nanti, pengunjung tidak lihat langsung komodo dari dekat, tapi

cukup dilihat dari jauh melalui ruangan ranger itu. Mereka tidak langsung berhadapan secara fisik. Akan disiapkan teknologi agar bisa dilihat dari jarak jauh," kata Marius.

Pembangunan itu, kata Marius, sekaligus menjadikan Pulau Rinca sebagai pusat ekonomi baru, guna menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Apalagi Labuan Bajo sudah menjadi destinasi wisata kelas super premium sehingga sarana prasarana yang disiapkan juga harus setara.

Menurut Marius, salah satu alasan

penataan kawasan wisata Labuan Bajo dimaksudkan untuk menyambut Asean Summit dan pertemuan G20 pada 2023. Labuan Bajo pun diperkirakan akan dikunjungi oleh ribuan orang.

Terkait warga yang direlokasi akibat pembangunan itu, Marius membantahnya. Menurut dia, tidak ada masyarakat yang direlokasi dari pulau Rinca. Justru masyarakat dilibatkan dalam pembangunan di sana.

"Masyarakat tidak direlokasi, mereka justru dilibatkan dalam semua kegiatan, seperti pembangunan der-



maga atau dijadikan ranger. Bahkan, diharapkan mereka bisa terlibat di restoran atau home stay yang akan dibangun,” kata Marius.

Menurut Marius, Pemprov NTT juga telah meminta KLHK dan Kementerian PUPR yang mengerjakan proyek tersebut untuk memperhatikan konservasi dan ekosistem komodo agar tetap terjaga.

“Masih ada ribuan hektare untuk konservasi 1.300 komodo yang ada di Pulau Rinca,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Walhi NTT,

Umbu Wulang menegaskan pihaknya menolak pembangunan dengan konsep Jurassic Park itu karena dinilai tidak berbasis sains dan hanya branding untuk kepentingan bisnis semata. Proyek itu dianggap mengganggu ruang hidup komodo dan dinamika mata rantainya.

Menurut Umbu, pembangunan di kawasan Loh Buaya itu dapat mengubah bentang alamnya dan memaksa satwa komodo untuk beradaptasi dengan bentang alam baru. Hal tersebut bisa merugikan kepentingan

konservasi komodo sebagai satwa endemik NTT.

“Walhi NTT menolak pembangunan infrastruktur berskala besar dan rakus lahan di kawasan asli komodo atas nama kepentingan investasi pariwisata,” tegas Umbu.

Pemerintah, menurut Umbu, semestinya mendorong wisata kawasan yang ramah lingkungan serta tidak berbasis infrastruktur skala besar dan tidak rakus lahan.

“Dan itu hanya bisa dicapai bila mengembangkan pariwisata berbasis komunitas yang terbatas dan berkelanjutan. Syaratnya, sains dan urusan konservasi-nya sudah beres,” kata dia.

Dalang Pihak Swasta

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT Wayan Darmawa mengkonfirmasi soal nama KWE dan SKL. Namun ia menampik pembangunan kawasan wisata semata-mata melibatkan dua perusahaan. “Terkait konsesi pembangunan Labuan Bajo hanya pada dua perusahaan tidak ada (tidak benar),” ujar Wayan.

Wayan mengatakan ruang lingkup pemegang izin pembangunan Taman Nasional Komodo saat ini bersifat konkuren atau bersama. Artinya, kewenangan pengelolaan usaha pariwisata khususnya di dalam kawasan taman nasional ditangani oleh Pemprov NTT untuk pengembangan destinasi super premium.

Adapun izin dua perusahaan diberikan sebelum pemerintah pusat menetapkan pembangunan destinasi Labuan Bajo bersifat super premium. “Sehingga berpeluang ada penyesuaian-penyesuaian,” tuturnya.

Dalam akta perusahaan KWE, saham perseroan digenggam oleh PT Prima Mandiri Logistic dengan 1.250 lembar saham dan PT Agro Tekno Nusantara dengan 1.250 lembar saham. Akta itu mencatatkan nama Heri Pranyoto sebagai direktur, Wibhianto Papan sebagai komisaris utama, dan Wirdhana Papan sebagai komisaris.

Merujuk pada akta yang sama, putra sulung Setya Novanto, Rheza Herwindo, pernah menjabat sebagai komisaris utama di perusahaan itu. Sujono, orang yang kerap mewakili urusan bisnis Setya Novanto, juga

pernah duduk sebagai direktur.

Baik Sujono maupun Rheza sempat tercatat sebagai pemegang saham Prima Logistic dengan komposisi masing-masing 13.500 lembar dan 1.500 lembar saham. Namun dua tahun lalu, nama Rheza dan Sujono hilang dari akta perusahaan KWE.

Kemudian dalam akta perusahaan SKL, izin usaha diberikan pada 17 Desember 2015. David Makes yang menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Pengembangan Ekowisata tercatat sebagai pemegang saham. Sahamnya berjumlah 143 lembar. David juga menduduki posisi sebagai komisaris.

David adalah adik pengusaha perhotelan dan restoran, Yosua Makes. Keduanya mendirikan resor mewah seperti Plataran Cangu, Ubud, Borobudur, hingga di Pulau Komodo. Di samping itu, saham KSL juga digenggam PT Catur Anugerah Sejahtera dengan kepemilikan 395 lembar. Nama Lili Indarti tercatat sebagai direktur.

Sayangnya, kedua perusahaan

tersebut tidak ada memberikan satu keterangan pun kepada awak media, terkait pembangunan di TNK.

Saat ini penataan di Pulau Rinca tengah memasuki tahap pembongkaran bangunan eksisting dan pembuangan puing, pembersihan pile cap, dan pembuatan tiang pancang.

Untuk keselamatan pekerja dan perlindungan terhadap satwa komodo, telah dilakukan pemagaran pada kantor direksi, bedeng pekerja, material, lokasi pembesian, pusat informasi, dan penginapan ranger.

"Kami selalu didampingi ranger dari Balai Taman Nasional Komodo, sehingga proses pembangunan prasarana dan sarana tidak merusak atau mengganggu habitat komodo," kata Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi NTT Herman Tobo.

Dunia Harus Melindungi Komodo
Foto seekor komo menghadang truk yang viral di media sosial, hingga tagar #savekomodo yang berseliweran di lini masa Twitter, ikut membuat media-media internasional

menyoroti pembangunan geopark di Pulau Rinca.

Kantor berita Reuters menurunkan berita terkait Jurassic Park di Taman Nasional Pulau Komodo pada Selasa (27/10/2020), dengan judul Indonesia says 'Jurassic Park' project no threat to Komodo dragon.

Media asing lainnya yang menyoroti pembangunan proyek Jurassic Park di Taman Nasional Pulau Komodo adalah BBC. Dalam artikelnya, BBC memasang judul Viral photo sparks concerns about Indonesia's 'Jurassic Park' yang diterbitkan pada Selasa (27/10/2020).

Pemberitaan tersebut menyoroti foto seekor komodo yang tengah menghadang truk dan menimbulkan kekhawatiran tentang dibangunnya proyek Jurassic Park.

Berikutnya, media asal AS, New York Daily News juga menyoroti pembangunan proyek Jurassic Park di Taman Nasional Komodo. Diterbitkan pada Selasa (27/10/2020), pemberitaan tersebut berjudul 'Jurassic Park'



Seekor komod menghadang truk yang melintas membawa material untuk pembangunan resort di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

like attraction sparks fear of Komodo dragons' fate.

Ditulis dalam pemberitaan, aktivis khawatir proyek "Jurassic Park" yang dibangun di pulau Indonesia bisa menimbulkan malapetaka bagi reptil yang dapat tumbuh hingga 3 meter, dengan berat 160 kilogram yang terancam punah. Apalagi, Indonesia adalah habitat asli, yang hanya ditemukan di alam liar di beberapa pulau di mana mereka telah berkeliaran selama jutaan tahun.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman

meminta Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Persekitaran Bangsa Bangsa (UNESCO) menyurati Presiden Joko Widodo secara resmi agar menghentikan mega proyek pemugaran kawasan TNK.

"Saya minta PBB dalam hal ini UNESCO secara resmi menyurati Presiden RI untuk menghentikan proyek tersebut! Harus mutlak dihentikan," kata Benny melalui pesan WhatsApp kepada INFO INDONESIA, Rabu (28/10/2020).

Dia menyatakan bahwa mega

proyek pemugaran kawasan TNK sangat mengganggu ekosistem komodo sebagai hewan purba tertua di dunia.

Legislator asal NTT itu pun mengingatkan bahwa komodo merupakan hewan yang ekosistemnya harus dilindungi. Menurut Benny, kelestarian dan keseimbangan ekosistem di kawasan TNK harus dijaga karena merupakan aset milik dunia.

"Itu bukan saja milik Indonesia, melainkan dunia. Dunia harus melindungi ekosistem komodo ini," tegas anggota Komisi II DPR RI itu. •ra

REALISASI PROYEK PEMBANGUNAN SARANA WISATA ALAM PT. SEGARA KOMODO LESTARI DALAM ANGKA

@SUNSPIRIT2018

9 FASILITAS YANG DIBANGUN

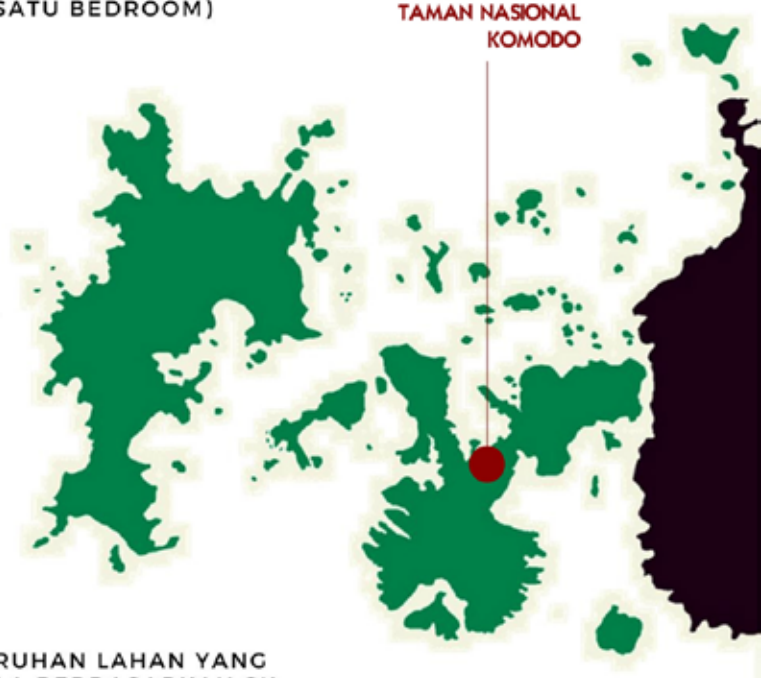
- 10** UNIT DOUBLE DECK VILLA(DUA BEDROOM)
- 7** UNIT DOUBLE DECK VILLA(SATU BEDROOM)
- 3** UNIT RESTAURANT
- 3** UNIT PENGINAPAN STAFF (12 KAMAR)
- 3** UNIT OFFICE PARK
- 2** UNIT PENGINAPAN UNTUK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (8 KAMAR)
- 1** UNIT PLAZA OPEN AIR
- 1** UNIT GEDUNG GENSET
- 1** UNIT PENGOLAHAN AIR LIMBAH

2,21 HEKTA ARE LAHAN YANG DIIZINKAN UNTUK PEMBANGUNAN FISIK

22,1 HEKTA ARE TOTAL KESELURUHAN LAHAN YANG DIBERIKAN UNTUK DIKELOLA BERDASARKAN SK KEMENHUT NO. S.1145/MENHUT-IV/PJLKKHL/2013, TERTANGGAL 22 OKTOBER 2013



LOH BUAYA
PULAU RINCA
TAMAN NASIONAL
KOMODO



* Dokumen perencanaan realisasi sarana dan prasarana wisata PT. Segara Komodo Lestari/2013



YANG BERHASIL DAN BATAL MAJU DI PILKADA 2020

Pesohor yang menekuni karir politik memang kisah usang di negara-negara demokrasi. Namun, memang tetap menarik terlepas dari kegagalan dan keberhasilannya. Sebut saja, antara lain bintang film

laga Arnold Schwarzeneger, bahkan Presiden Ronald Reagan di Amerika Serikat yang berlatar belakang aktor film layar lebar.

Demikian pula dengan India yang banyak memiliki selebriti yang terjun dan berhasil dalam karir politiknya. Amitabh Bachchan yang paling mudah diingat

Mungkin Amerika Serikat dan India terlalu jauh dari Indonesia. Yang dekat, Filipina. Tetangga Indonesia di kawasan ASEAN ini pernah memiliki pesohor yang kemudian menjadi Presiden. Joseph Estrada namanya.

Tapi, memang tak semua selebriti berhasil meniti karir politik. Banyak juga yang gagal dan harus berjuang lagi untuk mencapai niatnya.

Nah, di Indonesia menjelang Pilkada 2020 banyak media menginformasikan sejumlah pesohor yang berhasil masuk arena kompetisi memilih kepala daerah. Misalnya Sahrul Gunawan, Adly Fairuz, Lucky Hakim, David Chalik, dan aktor Firman Mutakin Itu pesohor lelaki

Tapi perempuan pesohor ada juga ternyata. Penyanyi dangdut Iyeth Bustami, misalnya. Kemudian Laila Fadia Elfouz Rafiq, putri pedangdut senior, almarhum A Rafiq.

Jadi, setidaknya ada enam pesohor yang maju di Pilkada serentak 2020. Tapi ada juga yang gagal atau batal. Berikut pesohor yang akhirnya batal mengikuti Pilkada 2020 menurut laporan berbagai media sejauh ini:

1. Presenter Ramzi Geys Thebe alias Ramzi.

Semula Ramzi mengaku akan memeriahkan Pilkada Tangerang Selatan



(Tangsel) 2020. Pria berusia 44 tahun tersebut telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon wakil wali kota mendampingi Ir Kemal Pasya.

Menurut rencana, pasangan ini akan maju melalui jalur independen alias perseorangan. Ramzi beralasan, keputusannya mencoba dunia politik murni karena ketertarikannya dengan perkembangan dunia politik.

Sayangnya, hingga hari pendaftaran bakal pasangan calon di Pilkada Tangsel 2020 ditutup, Ramzi tak kunjung mendaftarkan diri. Ia pun batal mengikuti Pilkada Tangerang Selatan 2020.

2. Pasha Ungu

Sigit Purnama Said alias Pasha juga gagal mengikuti Pilkada Sulawesi Tengah 2020. Bersama pasangannya, Anwar Hafid, vokalis band Ungu itu gagal maju karena tidak memenuhi persyaratan.

Semula, Anwar Hafi-Pasha akan maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Sulteng 2020. Pasangan Anwar-Pasha juga telah mengumpulkan dukungan dari Partai Demokrat, PAN, dan PPP.

Namun menjelang pendaftaran calon kepala daerah, PAN serta PPP berbelok arah dan mengalihkan dukungan ke pasangan calon lainnya. Alhasil, Anwar Hafid-Pasha Ungu hanya mengumpulkan tujuh dari sembilan kursi yang diperlukan, sehingga tak memenuhi syarat minimal 25 persen dukungan suara parlemen setempat.

3. Aldi Taher

Selain Pasha Ungu, artis Aldi Taher juga gagal maju dalam Pilkada Sulawesi Tengah 2020. Sebelumnya, bintang sinetron Emak Ijah Pengen Ke Mekah ingin maju bersama Rusli Baco Daeng Palabbi.

Ia maju sebagai Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan mengaku didukung empat partai politik, yakni Perindo, Golkar, PPP, dan PAN. Namun, syarat dukungan menghalangi mantan suami Dewi Persik ini menjadi calon Wagub Sulteng

"Kecewa iya, tapi jangan lama-lama. Bismillah bangkit, insyaAllah maju lagi, membangun Indonesia," ungkap Aldi

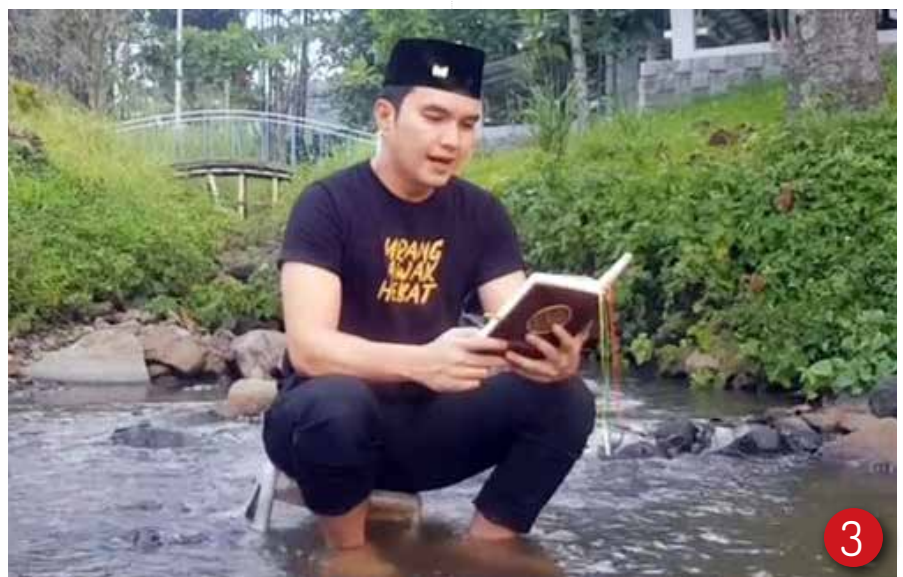
Taher tentang kegagalannya.

Selain itu, ia akan berusaha kembali untuk mengikuti Pilkada 2022. "Alhamdulillah gagal Pilkada Sumatera Barat, Pilkada Sulteng tetap belajar memper-lancar baca Alquran," tandasnya.

4. Krisyanto Jamrud

Vokalis band Jamrud, Krisyanto berniat mengikuti Pilkada Pandeglang, Banten. Pasangannya Hendra Pranova.

Namun pasangan ini dinyatakan gagal menjadi kontestan pilkada dari jalur independen. Krisyanto-Hendra rupanya belum memenuhi syarat berdasarkan penghitungan dokumen dukungan perbaikan yang diverifikasi KPU Pandeglang setelah penyerahannya pada Senin, 27 Juli 2020. ●





TRANSAKSI "UANG PANAS" LEVEL INTERNASIONAL DI INDONESIA

► Diduga untuk Beli Sukhoi, Keterlibatan Mandiri dan BNI



Setidaknya ada 19 bank, yang juga tertulis di dalam dokumen Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), diduga menjadi tempat lalu lintas transaksi mencurigakan tingkat internasional. Tidak tanggung-tanggung, jumlah transaksi janggal yang terjadi pada 19 bank di Tanah Air itu mencapai USD 504,66 juta atau setara Rp 7,46 triliun.

Dokumen FinCEN tersebut diperoleh oleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ). BuzzFeed News menjadi media pertama yang memperolehnya.

FinCEN merupakan lembaga intelijen keuangan di bawah Departemen Keuangan Amerika Serikat. Skandal yang terjadi pada perbankan di seluruh dunia tersebut bocor pada pertengahan September 2020.

Nilainya fantastis. Transaksi janggal dalam dokumen tersebut nilainya mencapai Rp 28.000 triliun. Jika digunakan untuk keperluan negara, mungkin bisa menghidupi Indonesia selama 10-15 tahun.

Kegiatan perbankan di Indonesia di dalam dokumen FinCEN yang setebal 2.657 halaman, memang hanya sebagian kecil saja. Dalam dokumen tersebut dituliskan terjadi 496 transaksi, selama 2013 hingga 3 Juli 2017 yang melibatkan bank di Indonesia.

Transaksi tersebut diproses melalui empat bank yang berbasis di Amerika Serikat, yakni The Bank of New York Mellon sebanyak 312 transaksi, Deutsche Bank AG 49 transaksi, Standard Chartered Plc 116 transaksi, dan JP Morgan Chase & Co sebanyak 19 transaksi. Keempat bank itu mengajukan laporan mencurigakan tersebut kepada FinCEN.

Jika dirinci, ke-19 bank yang dilaporkan melakukan transaksi janggal yakni Bank DBS Indonesia, Bank Mandiri, Bank Windu Kentjana International, Hong Kong Shanghai Banking Corp, Bank Central Asia (BCA), dan Bank CIMB Niaga.

Selain itu, Bank Negara Indonesia (BNI), Panin Bank, Nusantara Parahyangan, Bank of India Indonesia, OCBC NISP, Bank Danamon, dan Bank Commonwealth. Ada pula Bank UOB Indonesia, Bank ICBC Indonesia, Chinatrust Indonesia, Standard Chartered, Bank International Indonesia, dan Citi-

BELI SUKHOI - Terjadi aliran dana yang mencurigakan dari Rosoboronexport selaku perusahaan agen penjual Pesawat Jet Tempur Sukhoi kepada salah seorang pengusaha asal Indonesia, Sujito.



bank. (selengkapnya lihat grafis)

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) berpendapat laporan transaksi janggal dari FinCEN berpotensi menjadi preseden buruk bagi perbankan. Kondisi ini bahkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat ke bank bila tidak segera diantisipasi.

Senior Faculty LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan laporan dari FinCEN harus mendapat perhatian penuh dari semua pemangku kepentingan. Bank pun harus memiliki perhatian ekstra terkait dengan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ke depan.

"Menurut saya agak kurang bagus bagi industri perbankan di Indonesia, tetapi tetap harus menjadi perhatian. Fungsi pengawasan internal untuk LTKM harus makin ditingkatkan," katanya.

Trioksa berpendapat sistem pelaporan TKM saat ini sudah tergolong bagus. Namun, kenyataannya masih saja ada kejadian yang selalu saja ditemui di lapangan.

Oleh karena itu, dia berharap bank tidak sekadar

melaporkan. Tetapi juga mampu meningkatkan intervensi dalam setiap TKM atau turut aktif menganalisa secara reguler.

Di sisi lain, Direktur Core Indonesia Piter Abdullah menilai temuan dalam dokumen FinCEN Files terkait 19 bank di Indonesia yang menjadi sarana transaksi diduga mencurigakan, tidak akan banyak berdampak terhadap perbankan.

"Kita punya PPATK, tentunya klaim FinCEN itu akan menjadi tugas dan wewenang PPATK untuk menindaklanjuti," jelas dia.

Apabila klaim itu terbukti, lanjutnya, tentunya PPATK dan OJK serta penegak hukum Indonesia harus mengambil langkah sesuai ketentuan perundangan yang mengatur lalu lintas transaksi mencurigakan.

Namun, apabila klaim itu tidak benar, regulator juga harus mengambil langkah untuk melindungi bank-bank nasional. "Semua aturannya jelas. Saya yakin klaim ini benar atau salah, tidak akan banyak berdampak ke perbankan," imbuhnya.

Sejak FinCEN Files diterbitkan oleh sejumlah media di Tanah Air, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak banyak

bertindak, dan cenderung preventif. Dalam setiap kalimat yang diucapkan Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot tidak menyiratkan adanya tindak lanjut dari laporan tersebut.

Selaku lembaga tertinggi yang mengawasi perbankan bersamaan dengan Bank Indonesia, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hanya sekadar berucap bahwa, antisipasi terus dilakukan demi mencegah terjadi kejahatan pencucian uang atau money laundry.

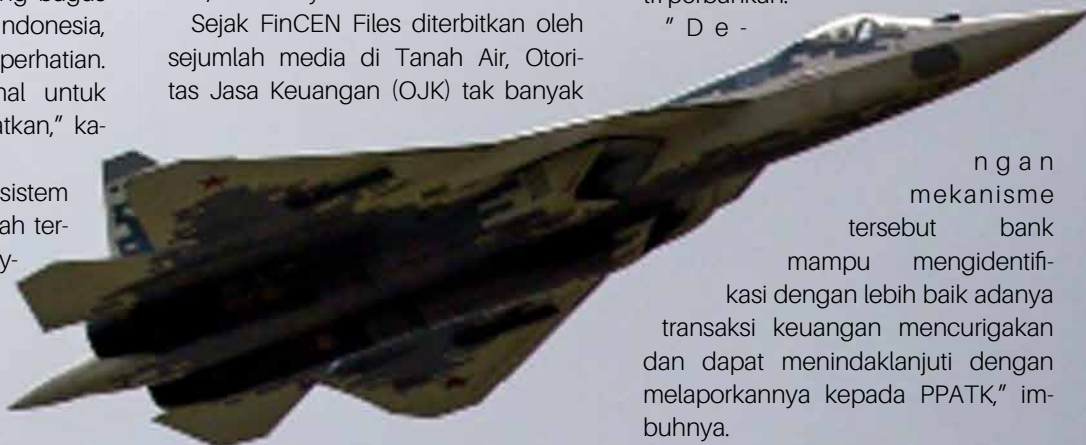
Antisipasi tersebut dilakukan melalui program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan (APU PPT), yang diklaim oleh Sekar sudah maksimal diterapkan pada industri perbankan Indonesia.

"Programnya sudah berjalan, semua ketentuan jelas seperti yang dijelaskan dalam POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan," tulis Jubir OJK dalam keterangan pers yang diterima wartawan.

Di sisi lain, Sekar memaparkan berdasarkan jumlah dan persentase kumulatif LTKM menurut jenis pihak pelapor sampai dengan April 2020, sebagian besar telah disampaikan oleh perbankan.

Jumlah LTKM dari bank ini menunjukkan bahwa pelaporan LTKM masih didominasi oleh bank dibandingkan dengan sektor lainnya, sehingga sistem APU PPT sudah dimiliki dengan parameter yang cukup memadai dan telah diterapkan secara efektif di industri perbankan.

" D e -



ngan mekanisme tersebut bank mampu mengidentifikasi dengan lebih baik adanya transaksi keuangan mencurigakan dan dapat menindaklanjuti dengan melaporkannya kepada PPATK," imbuhnya.

Jika OJK memilih untuk lebih mengambil sikap untuk tetap tenang, beda halnya dengan PPATK. Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyebut bahwa informasi yang beredar yang diperoleh dari ICIJ tidak berasal dari sumber yang resmi. Dalam hal ini FinCEN, sebagai mitra FIU daripada PPATK.

Meski demikian, PPATK akan menggunakan segala informasi yang berasal dari mana saja sebagai masukan dalam melakukan analisis dan pemeriksaan.

"Kami tidak dapat melakukan konfirmasi terhadap informasi seperti ini kepada publik. Tapi kita memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan," kata Dian.

Dian melanjutkan produk laporan dari PPATK merupakan laporan intelijen

| Bank dengan Jumlah Laporan Terbanyak di Dokumen FinCEN | |
|--|----------------|
| Bank | Jumlah Laporan |
| Deutsche Bank | 982 |
| Bank of New York Mellon | 325 |
| Standard Chartered | 232 |
| J.P. Morgan Chase | 107 |
| Barclays | 104 |
| HSBC Bank | 73 |

yang bersifat rahasia. Hanya digunakan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan oleh aparat penegak hukum.

Adapun, kerja sama PPATK dengan lembaga intelijen keuangan negara lain semakin ditingkatkan untuk menelusuri transaksi keuangan yang mencurigakan dan penelusuran aset.

"Tapi itu semua bersifat sangat rahasia sesuai praktek intelijen keuangan internasional dan undang-undang yang berlaku," ujarnya.

Dalam catatan, sepanjang 2013-2019 lembaga intelijen keuangan milik negara ini, telah menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan yang diduga terkait dengan tindak pidana.

Tindak pidana pajak memiliki nominal paling banyak dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Nilai penerimaan pajak dari hasil analisis tersebut mencapai Rp 8,07 triliun. Angka ini jauh melampaui penerimaan dari pengungkapan kasus yang kemudian ditangani KPK yang hanya Rp 790,89 miliar dan Kepolisian di angka Rp 161,2 miliar.

Keterlibatan Bank di Indonesia

Dari 19 nama yang tertulis di dalam dokumen yang bikin geger di seluruh dunia itu, ada 3 bank besar. Yakni BCA, BNI, dan Mandiri. Bahkan dua di antaranya berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Keterlibatan ketiga bank besar ini tercatat melayani 132 transaksi janggal. Dengan jumlah mencapai USD 304 juta atau sekitar Rp 4,4 triliun (kurs tengah BI Rp 14.500).

Bank Mandiri menjadi satu di antara ketiganya yang dilaporkan paling banyak melakukan transaksi. Sebanyak 111 transaksi dengan jumlah uang yang dikirim USD 250,39 juta. Sedangkan uang yang masuk ke dalam brankas bank tersebut mencapai USD 42,33 juta.

Terhadap laporan itu, Bank Mandiri tak mau buka suara. Corporate Secretary Bank Mandiri, Rully Setiawan menyampaikan seluruh informasi terkait nasabah merupakan rahasia bank sebagaimana yang diatur oleh undang-undang.

Rully mengklaim perusahaan tempatnya bekerja secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Termasuk menjaga konsistensi dan secara sistematis menerapkan APU PPT sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT, Peraturan Otoritas Jasa OJK dan ketentuan PPATK.

Termasuk menjalankan kewajiban pelaporan sebagaimana diamanatkan undang-undang, apakah itu kriteria transaksi mencurigakan atau nominal tertentu, sesuai yang diatur Undang-undang.

"Sejalan dengan hal tersebut, Bank Mandiri juga dalam menerapkan Program APU PPT-nya selain tunduk atas ketentuan tersebut di atas, juga berusaha agar selaras dengan international best practices sebagaimana rekomendasi FATF (Financial Action Task Force On Money Laundering)," terangnya.

Sementara itu, BNI yang tercatat melakukan dua transaksi seperti dituliskan dalam dokumen FinCEN memilih untuk menutup pintu rapat-rapat. INFO INDONESIA mencoba untuk menghubungi Corporate Secretary BNI Meiliana, na-

Adapun, kerja sama PPATK dengan lembaga intelijen keuangan negara lain semakin ditingkatkan untuk menelusuri transaksi keuangan yang mencurigakan dan penelusuran aset.

mun tak kunjung mendapat jawaban mengenai perusahaannya juga masuk dalam dokumen yang diduga melakukan transaksi janggal di level internasional.

Berbeda dengan dua bank BUMN di atas, BCA yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Grup Djarum lebih memilih terbuka, dan mengajak dialog media di Indonesia mengenai dokumen FinCEN tersebut.

Di dalam dokumen tersebut, Bank BCA menjadi sarana lalu lintas 19 transaksi. Total penerimaan dana di bank berkode saham BBKA ini yang diidentifikasi FinCEN sebagai transaksi mencurigakan sebesar USD 753.760 atau setara Rp 11,14 miliar.

Jika dirinci, ada transaksi dari Western Union Business Solutions ke PT Bank Central Asia Tbk. sebanyak 12 transaksi senilai USD 382.096. Selain itu, ada transaksi dari First City Monument Bank ke BCA sebanyak 2 transaksi senilai USD 109.946.

Selanjutnya, transaksi dari Banque Misr ke BCA sebanyak 2 transaksi senilai USD 256.631. Berikutnya, transaksi dari AS Expobank ke BCA sebanyak 3 transaksi senilai USD 5.086.

Terkait laporan tersebut, Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA, Hera F Haryn menyampaikan, dalam menjalankan operasional, perusahaannya senantiasa mengikuti dan patuh terhadap ketentuan dan undang-undang terkait penerapan program APU dan PPT.

BCA juga melakukan monitoring atas semua transaksi nasabah seperti yang telah diatur oleh regulator atas ketentuan tersebut. BCA berupaya terus menerus melakukan mitigasi dengan mengevaluasi secara berkesinambungan berdasarkan peraturan mengenai penerapan program APU dan PPT.

"Perseroan berkomitmen terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku secara nasional maupun internasional," jelas dia.

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) angkat bicara terkait pemberitaan dokumen FinCEN mengenai transaksi mencurigakan yang mengalir ke per-

bankan di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Dalam keterangan resminya, Himbara menilai pelaporan transaksi nasabah bank telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (UU APU PPT).

Beleid tersebut mengatur bahwa penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan yang memenuhi kriteria tertentu termasuk transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Selanjutnya, berdasarkan UU APU PPT tersebut, juga ditetapkan bahwa Direksi, Komisaris, Pengurus atau Pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

"Dengan dukungan sistem yang andal, bank-bank Himbara senantiasa

Rully mengklaim perusahaan tempatnya bekerja secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Termasuk menjaga konsistensi dan secara sistematis menerapkan APU PPT sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT, Peraturan Otoritas Jasa OJK dan ketentuan PPATK.

Daftar Transaksi 19 Bank di Dokumen FinCEN

| Bank | Jumlah Transaksi | Dikirim | Diterima |
|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| DBS Indonesia | 8 | USD 1,51 | USD 1,99 juta |
| Mandiri | 111 | USD 250,39 juta | USD 42,33 juta |
| Windu Kentjana International | 49 | 0 | USD 130,81 juta |
| BCA | 19 | 0 | USD 753.760 |
| CIMB NIAGA | 7 | 0 | USD 4,88 juta |
| BNI | 2 | USD 10,21 juta | USD 428.052 |
| Panin | 19 | USD 5,42 juta | 0 |
| Bank Nusantara Parahyangan | 10 | USD 708.541 | 0 |
| Bank of India Indonesia | 5 | 0 | USD 20,76 juta |
| OCBC Nisp | 13 | USD 2,65 juta | USD 44.095 |
| Danamon | 28 | 0 | USD 3,1 juta |
| Commonwealth | 152 | USD 6,59 juta | USD 2,96 juta |
| UOB Indonesia | 24 | USD 2,39 juta | 0 |
| ICBC Indonesia | 1 | USD 49.990 | 0 |
| Chinatrust Indonesia | 39 | USD 57.440 | USD 496.858 |
| Standard Chartered Bank | 3 | USD 5,8 juta | USD 5.400 |
| BII | 34 | USD 348.228 | USD 4,88 juta |
| Citibank, N.A. | 1 | 0 | USD 2 juta |



TRANSAKSI JANGGAL - Bank Mandiri dilaporkan melakukan 111 transaksi di dalam laporan dokumen FinCEN dengan nilai sebanyak USD 292,72 juta atau sekitar Rp 4,24 triliun.

berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pelaporan dimaksud kepada Regulator (PPATK) sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Ketua Umum Himbara, yang juga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sunarso dalam keterangan resminya.

Himbara pun memastikan bahwa seluruh transaksi perbankan mengikuti ketentuan otoritas, yakni BI, OJK, dan PPATK, serta akan terus selaras dengan international best practices dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

Tapi menurut Ekonom Institute for

Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto laporan FinCEN ini tak boleh dipandang sebelah mata. Dia mendorong PPATK, selaku lembaga terkait untuk segera melakukan tindak lanjut atas temuan tersebut. Sebab temuan FinCEN dinilai dapat mengganggu kinerja perbankan.

“Saya rasa PPATK selaku lembaga terkait perlu mengusut terkait hal ini. Di tengah pandemi, isu-isu semacam ini dapat mengganggu kinerja perbankan,” ujar dia.

Selain itu, langkah PPATK atas klaim FinCEN tersebut diperlukan untuk



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

menjaga iklim kepercayaan pelaku pasar terhadap kinerja pasar keuangan domestik.

"Sehingga ini untuk membuktikan benar tidaknya klaim itu, otoritas pemerintah yang berwenang perlu masuk, di kita ada PPATK, OJK, dan BI," terangnya.

Kendati demikian, dia meminta pelaku pasar keuangan untuk tidak merespons secara berlebihan atas pencatutan FinCEN terhadap 19 bank di Indonesia yang diduga memiliki aliran dana yang janggal. Hal itu karena aturan ketatnya aturan transaksi di perbankan Tanah Air.

"Sungguh pun aturan tentang transaksi di perbankan sudah cukup ketat, terlebih lagi yang menyangkut pencucian uang dan transaksi mencurigakan lainnya," imbuh dia.

Untuk Beli Sukhoi

Dari investigasi ini, terungkap bagaimana bank-bank besar diduga menyembunyikan uang panas yang berasal dari transaksi gelap seperti penipuan uang pensiunan, penambangan emas ilegal, penjualan narkoba, dan aktivitas kriminal lainnya.

Dokumen itu juga menunjukkan bagaimana bank-bank besar masih terus memindahkan sejumlah besar uang tunai yang dicurigai terkait transaksi ilegal. Padahal, otoritas Inggris dan AS sudah menjatuhkan sanksi terhadap institusi keuangan itu.

Salah satu transaksi terkait uang panas itulah yang menyinggung nama Sujito. Nama Sujito Ng sempat tenar sekitar 8 tahun lalu. Ketika itu, nama tersebut muncul setelah terjadi kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet100 yang jatuh di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat.

Sujito disebut-sebut sebagai pemilik PT Trimarga Rekatama, perusahaan yang bertindak sebagai agen pesawat Sukhoi di Indonesia. Kecelakaan itu memicu ramainya pembicaraan publik karena ada pertanyaan mengapa transaksi antara Rosoboronexport, sebagai perwakilan penjual Sukhoi dari Pemerintah Rusia, dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Indonesia harus melalui pihak ketiga.

Ada pula rumor tentang kedekatan antara Sujito dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang kala itu berkuasa. Namun, Sujito tidak pernah muncul di publik.

Dalam pernyataannya terkait kecelakaan itu, Trimarga hampir selalu diwakili oleh Sunaryo selaku Konsultan Pertahanan dan Pengembangan Bisnis perusahaan tersebut.

Di dalam dokumen FinCEN, Tempo berhasil menemukan dugaan transaksi janggal, pembelian jet tempur Sukhoi oleh Pemerintah Indonesia pada 2011-2013.

Disebutkan adanya lalu lintas transfer yang melibatkan Sujito dengan pe-

Salah satu transaksi terkait uang panas itulah yang menyinggung nama Sujito. Nama Sujito Ng sempat tenar sekitar 8 tahun lalu. Ketika itu, nama tersebut muncul setelah terjadi kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet100 yang jatuh di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat.

Sebelum masuk ke rekening pengusaha ini di Bank Mandiri cabang Singapura, duit itu diputar dahulu ke JSCB International Financial Club di Moskow, Rusia serta J.P. Morgan Chase Bank di New York, AS.

rusahaan dari Rusia Rosoboronexport, sepanjang 2011-2013. Perusahaan yang diberikan mandat sebagai agen untuk menjual dan membeli produk atau teknologi militer itu, disebut mentransfer sekitar USD 52.000, sekitar Rp765 juta (kurs tengah BI Rp 14.500) ke rekening Sujito pada 28 Oktober 2011.

Sebelum masuk ke rekening pengusaha ini di Bank Mandiri cabang Singapura, duit itu diputar dahulu ke JSCB International Financial Club di Moskow, Rusia serta J.P. Morgan Chase Bank di New York, AS.

Dalam dua kali kesempatan, pada 29 Desember 2011 dan 24 Januari 2012, perusahaan tersebut kembali mengirim

but sebagai Wakil Bendahara Umum tim kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Disebutkan bahwa rekening Andi di Bank Mandiri pernah menerima transfer senilai total USD 47,9 juta, sekitar Rp 670 miliar, pada 8-19 Oktober 2014. Dana itu dikirim oleh perusahaan yang beralamat di British Virgin Island, sebuah negara yang dikenal sebagai suaka pajak.

Selain batu bara, bisnis Andi juga mencakup sawit, karet, gula, kesehatan, dan pendidikan. Bisnisnya di sektor-sektor tersebut dijalankan melalui Jhonlin Group. Selain berkantor di Jakarta, perusahaan ini juga memiliki kantor di Batulicin, Kabupaten Tanah



DIDUGA TERLIBAT - Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam diduga telah menerima sejumlah uang sebanyak USD 47,9 juta dari British Virgin Island pada 8-19 Oktober 2014.

uang ke Sujito sebesar USD 272.000, sekitar Rp4 miliar, dengan pola yang sama. Namun, saat itu, J.P. Morgan membatalkan transaksi tersebut.

"Lantaran kebijakan manajemen risiko yang melibatkan Rosoboronexport," demikian tertulis di dokumen itu.

Selain Sujito, transaksi jumbo mencurigakan yang juga masuk dalam dokumen itu menyinggung nama Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Pengusaha batu bara dari Kalimantan Selatan (Kalsel) ini pernah disebut-se-

Bumbu, Kalsel.

Selain Jhonlin Group, bocoran data FinCEN Files memuat transfer janggal yang melibatkan PT Tujuan Utama. Dalam salinan dokumen FinCEN Files, ada transaksi mencurigakan senilai USD 124,155 juta antara perusahaan emas yang berbasis di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) tersebut dengan Metalor Technologies Ltd, perusahaan logam mulia yang berbasis di Swiss, pada 2015.

Hubungan kedua perusahaan ini

terekam dalam putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukum Tujuan Utama dengan denda Rp500 juta pada 2017, karena memalsukan dokumen importasi emas ke Metalor. Direktur Tujuan Utama Dicson Liusdyanto mengatakan tidak ingat ihwal transaksi tersebut. Tapi, baik Sujito maupun Andi tidak mau memberikan konfirmasi terkait dokumen ini.

Berbeda dengan Panama Papers yang bocor, dan jauh lebih menghebohkan, pada April 2016 silam. Dokumen FinCEN ini berlalu begitu saja di Tanah Air. Menyusul kian maraknya persoalan pandemi Covid-19 dan persoalan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Selain itu, Bank sentral Uni Emirat Arab juga dilaporkan gagal menindaklanjuti peringatan tentang perusahaan lokal yang membantu Iran menghindari sanksi. Bank-bank AS juga dikatakan terlibat pencucian uang Korea Utara (Korut).

Dalam laporan itu, Deutsche Bank juga disebut memindahkan uang kotor pencucian uang untuk kejahatan terorganisir, teroris dan pengedar narkoba. Sementara Standard Chartered memindahkan uang tunai untuk Arab Bank selama lebih dari satu dekade setelah rekening klien di bank Yordania digunakan untuk mendanai terorisme.

Tapi, yang lebih heboh adalah, keterlibatan HSBC. Bank tersebut telah

Dalam laporan itu, Deutsche Bank juga disebut memindahkan uang kotor pencucian uang untuk kejahatan terorganisir, teroris dan pengedar narkoba. Sementara Standard Chartered memindahkan uang tunai untuk Arab Bank selama lebih dari satu dekade setelah rekening klien di bank Yordania digunakan untuk mendanai terorisme.



Padahal, nama-nama yang tertulis dalam dokumen itu sangat luar biasa. Sebut saja Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Korea Utara Kim Jong Un.

Dalam laporan tersebut dijelaskan, salah satu rekan terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin yang menggunakan Barclays Bank di London untuk menghindari sanksi yang ditujukan untuk menghentikannya menggunakan layanan keuangan di Barat. Sebagian uang tunai digunakan untuk membeli karya seni.

mengizinkan penipu untuk memindahkan jutaan dolar uang curian di seluruh dunia, bahkan setelah mengetahui dari penyidik AS bahwa skema tersebut adalah penipuan.

JP Morgan mengizinkan sebuah perusahaan untuk memindahkan lebih dari USD 1 miliar melalui rekening London tanpa mengetahui siapa yang memilikinya. Bank kemudian menemukan bahwa perusahaan itu mungkin dimiliki oleh mafia dalam daftar 10 orang paling dicari oleh FBI. ●ra

BIKIN GEGER - Dokumen Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) FinCEN yang dikerjakan oleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ) juga melaporkan adanya dugaan transaksi janggal pada 19 bank di Indonesia.

**HERMAN
DERU:**
PETANI
JANGAN JADI
BURUH DI
TANAHNYA
SENDIRI

